

**EVALUASI PELAKSANAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* DALAM
PEROLEHAN PROPER HIJAU
(Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang)**



Tesis

**Eko Sumardiyono
L4K005011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI PELAKSANAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* DALAM
PEROLEHAN PROPER HIJAU
(Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang)**

Disusun oleh:

Eko Sumardiyono
NIM: L4K005011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 07 Agustus 2007 di Semarang
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji,
Ketua

Tanda Tangan

Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D

.....

Anggota

Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum

.....

Dr. Tukiman Taruna

.....

Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

**Mengetahui,
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,**

Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D.

BIODATA PENULIS

Eko Sumardiyono lahir di Sidomulyo, sebuah desa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 April 1961 anak seorang guru Sekolah Dasar Negeri. Setelah



lulus Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo di Kudus pada tahun 1972, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Jekulo di Kudus, selesai pada tahun 1975, Sekolah Menengah Menengah Atas Negeri 1 Kudus jurusan IPA, selesai pada tahun 1979. Bercita-cita sebagai seorang ahli mesin, dia melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) Universitas Diponegoro, selesai pada tahun 1983. Selepas lulus kuliah hingga tahun 1986, menjadi guru Taman Madya (SMA) Taman Siswa di PT. Arun NGL Co.- Lokseumawe mengajar Matematika dan Fisika. Menjadi sales komputer dan sales mobil juga pernah dijalannya sebelum bergabung di PT. Pupuk Kaltim pada tahun 1988.

Bercita-cita suatu saat nanti bisa menjadi salah seorang advokat keturunan Jawa yang terkenal sebagaimana advokat-advokat terkenal yang mayoritas keturunan Batak, dia kuliah di Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Trunajaya Bontang dan diselesaikannya pada tahun 2002, suatu hal yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan pendidikan sebelumnya dan juga pekerjaannya di bidang engineering.

Seiring dengan perjalanan waktu, dia semakin tertarik dengan masalah-masalah lingkungan di Bontang dan sekitarnya, sehingga tergerak menambah pengetahuannya dengan belajar di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Kegiatan di luar pekerjaan sehari-hari di antaranya adalah sebagai Ketua Pengurus Cabang Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kota Bontang, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaneisme (PNI-M) Kota Bontang, Sekretaris Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) Kalimantan Timur, Tim Forum Kota Sehat (Forkohat) Kota Bontang mewakili unsur perusahaan, Tim Pelestarian Hutan Lindung Bontang, dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bontang.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun dengan judul *EVALUASI PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT* DALAM PEROLEHAN PROPER HIJAU (Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang) belum pernah disusun oleh orang lain dan merupakan hasil penelitian dan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian – bagian atau kalimat tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma – norma dan kaidah etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik dan menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Semarang, 07 Agustus 2007

Yang menyatakan,

Eko Sumardiyono

MOTTO

Al Qur'an Surat Al Mujadilah Ayat 11 :

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

 Jer Basuki Mawa Bea

Untuk memperoleh kesuksesan, diperlukan pengorbanan. Pengorbanan tersebut bisa berupa waktu, tenaga, materi, ataupun harga diri

PERSEMBAHAN

Terima kasih yang tiada tara kupersembahkan kepada anak – anak dan isteri tercinta, serta Bapak dan Ibu yang kumuliakan yang telah memberikan dorongan semangat kepadaku untuk sesegera mungkin menyelesaikan tesis ini setelah terbelengket cukup lama akibat kegiatan sehari-hari dan yang pasti penyebabnya adalah ketidak mampuan mengatur waktu dengan baik.

Tesis ini dipersembahkan pula untuk Bapak Ir. Sutarman Hadiwijaya, M.Si. sebagai pribadi maupun sebagai atasan unit kerja selaku Koordinator Inspeksi Teknik, Teknologi, dan K3LH yang senantiasa memberikan semangat agar tesis ini segera selesai.

Semoga segala simpati, perhatian, dan bantuan yang tulus dari orang-orang yang kukasihi sebagaimana di atas benar-benar memberikan semangat kepadaku untuk lebih baik dan lebih maju di dalam berkarya dan beramal dalam keluarga, masyarakat Bontang, dan juga pada nusa – bangsa tercinta, amin.

Semoga pula orang-orang yang kukasihi tersebut senantiasa diberkahi dan diberikan bimbingan dari Allah, Tuhan Penguasa Alam Semesta untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akherat. Amin.

Kupersembahkan pula untuk bangsa dan negaraku tercinta, Indonesia yang saat ini menangis dan merana akibat ulah perbuatan kita, dengan penuh ketamakan dan kesombongan menghancurkan ekosistem kepunyaan anak-cucu kita. Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan karuniaNya agar bangsa dan negara kita bangkit dari kebangkrutan dan keterpurukan, bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya yang maju dan sejahtera. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua khususnya terhadap penulis sehingga Tesis ini dapat disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Strata - 2 pada Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengambil judul “EVALUASI PELAKSANAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* DALAM PEROLEHAN PROPER HIJAU (Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang)”, dengan harapan bisa memberikan manfaat kepada kita semua khususnya terhadap manajemen PT. Pupuk Kaltim di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan seiring dengan industri berwawasan lingkungan dalam antisipasinya menghadapi Kota Bontang pasca gas.

Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai oleh PT. Pupuk Kaltim di dalam pelaksanaan program *community development*, namun program *community development* yang dilaksanakan dengan baik dan benar tentu memberikan citra yang sangat baik bagi PT. Pupuk Kaltim di mata masyarakat dan *stake holder* lainnya di Kota Bontang khususnya dan juga di daerah-daerah lain yang mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan PT. Pupuk Kaltim di daerahnya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan proposal tesis ini, di antaranya penulis tujukan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof. dr. Susilo Wibowo, MS., MD., Ph.D., Sp. Andrologi
2. Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Dosen pembimbing tesis penulis, Bapak Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D.
3. Ibu Dra. Hartuti Purnaweni, MPA. Dosen pembimbing tesis penulis di Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staff adminstrasinya.

5. Direksi PT. Pupuk Kaltim dan pengurus Korps Karyawan PT. Pupuk Kaltim, atas dukungannya program kelas kerjasama Program Pasca Sarjana MIL Undip di PT. Pupuk Kaltim bisa berjalan dengan baik dan lancar.
6. Bapak Ir.H. Sutarman Hadiwijaya, M.Si. selaku pribadi maupun sebagai Koordinator ITK PT. Pupuk Kaltim yang menjadi atasan langsung dan juga pembimbing serta motivator utama penulis untuk bisa melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana MIL Universitas Diponegoro Semarang
7. Manajemen dan karyawan PT. Pupuk Kaltim, atas kesudiannya memberikan dukungan serta bantuan informasi yang penulis perlukan.
8. *Stakeholders* diantaranya adalah masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Kota Bontang.
9. Teman-teman Mahasiswa MIL kelas Bontang.
10. Keluarga penulis tercinta, khususnya bapak-ibu, serta isteri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan moril dan pengorbanan waktu untuk keluarga.

Tiada gading yang tak retak, alangkah lebih indah bilamana retaknya diukir. Demikian pula penulis mohon kepada semua pihak untuk bisa memaklumi segala kekurangan yang terdapat di dalam tesis ini karena hal tersebut diakibatkan oleh masih dangkalnya pengetahuan penulis, dan untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon saran dan masukan demi lebih sempurnanya tesis ini.

Semarang, 07 Agustus 2007

Penulis

Eko Sumardiyono

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Kebijakan Publik dan Pengelolaan Lingkungan.....	10
2.2.Program Peringkat Lingkungan (PROPER).....	12
2.2.1. Latar Belakang PROPER.....	12
2.2.2. Dasar Hukum PROPER.....	15
2.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan dan Strategi.....	15
2.2.4.Lembaga Pelaksana.....	18
2.2.5.Indikator Keberhasilan.....	18
2.2.6. Keuntungan PROPER Bagi <i>Stakeholder</i>	19
2.2.7. Kriteria Penilaian.....	19
2.2.8. Sumber Data Penilaian.....	21
2.3. <i>Community Development</i> di dalam <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2.3.1Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2.3.2Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
2.3.3 <i>Stakeholders</i> Program CSR: Peranan dan Kepentingannya.....	27
2.3.4Gambaran Umum Program CSR.....	29
2.3.5Motif Perusahaan dalam Program CSR.....	32
2.3.6Hubungan CSR dengan Pembangunan Berkelanjutan.....	35
2.3.7Dasar Hukum Pelaksanaan CSR.....	43
2.3.8 <i>Community Development</i> Sebagai bagian CSR.....	48
2.3.8.1 Pengertian <i>Community Development</i>	49
2.3.8.2 Tujuan <i>Community Development</i>	52
2.3.8.3 Mitra Kerja Pelaksanaan <i>Community Development</i>	55
2.3.8.4 Fasilitator <i>Community Development</i>	59
2.3.8.5 Manfaat <i>Community Development</i> Bagi Perusahaan.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
1.	Perkembangan Penduduk Kota Bontang	4
2.	Penilaian PROPER Sistem Gugur	20
3.	Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR	27
4.	Gambaran Umum Program CSR	30
5.	Motif Perusahaan dalam Manjalankan Program CSR	32
6.	Jumlah dan Jenis Responden	69
7.	Data Teknis PT. Pupuk Kaltim	73
8.	Penduduk Menurut Pendidikan	78
9.	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	79
10.	Fasilitas Umum Yang Tersedia	81
11.	Struktur Organisasi Pelaksana Program Bina Lingkungan	89
12.	Responden Berdasarkan Usia	96
13.	Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
1.	Pabrik PT. Pupuk Kaltim	6
2.	PROPER dan Instrumen Penaatan lainnya	17
3.	Diagram Alir Prosedur Penilaian PROPER	20
4.	Lokasi Kelurahan Loktuan	75
5.	PS Bontang PKT	85
6.	<i>Marching Band</i>	86
7.	Masjid Karyawan	86
8.	Studio PKTV	87
9.	Pasar Citramas	91
10.	Sumur Dalam	93
11.	Gereja Immanuel	94
12.	Rumah Baca	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
1.	Kuesioner
2.	Hasil Kuesioner

ABSTRAK

Pembangunan, selain membawa dampak positif juga membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup karena lingkungan dianggap sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan terus dieksploitasi tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan adalah melalui Program Peringkat Lingkungan (PROPER).

Dalam penilaian untuk PROPER Hijau dan Emas, tiga aspek yang dinilai adalah penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumberdaya serta Pemberdayaan Masyarakat (*community development*). Perusahaan yang mengedepankan *community development* lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat dengan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang.

Program *community development* yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim perlu dievaluasi dengan adanya suara sumbang dari sebagian *stakeholder* dan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan penelitian di Kelurahan Loktuan sebagai daerah yang terkena dampak langsung dengan beroperasinya PT. Pupuk Kaltim. Program *community development* yang diambil sampelnya untuk penelitian adalah pembuatan pasar Citramas, pembuatan sumur dalam, pembangunan gereja Immanuel, dan pembuatan rumah baca.

Tipe penelitian adalah deskriptif. Data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dan kuesioner kepada 29 *stakeholders* yang berusia di atas 40 tahun dan telah berada di Loktuan lebih dari 25 tahun, dengan pertimbangan mereka sudah lama mengenal PT. Pupuk Kaltim dan mengetahui perjalanan sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Mata pencaharian responden adalah di sektor informal karena mereka sebagai penerima langsung manfaat program *community development* dari PT. Pupuk Kaltim

Analisis *community development* PT. Pupuk Kaltim mempergunakan prinsip-prinsip *community development* yang memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Usulan perbaikan pelaksanaan program *community development* PT. Pupuk Kaltim dibuat melalui analisis SWOT. Usulan perencanaan untuk *community development* di masa yang akan datang melalui kajian landasan teori dengan pendekatan 7 langkah perencanaan (*the seven magic steps of planning*) dan usulan strategis

Kata kunci : PROPER, PT. Pupuk Kaltim, *corporate social responsibility*, usulan perencanaan.

ABSTRACT

Development has positive impact, but also has brought many disasters to environment and humanity since environment is still considered mainly as an object. Therefore environment is heavily exploited without considering its carrying capacity. One program in promoting sustainable development is Business Performance Rating Program (PROPER).

There are three aspects for Golden and Green PROPER assessment, covers Environmental Management System, the Use of Natural Resource, and Community Development. Company that prioritizes community development concept focuses more on social development and societal capacity building by making use of local potencies as the company's social assets to grow and develop.

Community development program implemented by PT Pupuk Kaltim needs to be evaluated since there are some negative perception among some stakeholders and the local community. Therefore, this research is held at *Kelurahan* Loktuan as one of the impacted areas of PT Pupuk Kaltim operation. Community development programs which were taken as samples are the development of Citramas market, deep well, Immanuel church, and reading-house.

Type of the research is descriptive. Primary data was yielded through interview and questionnaire to 29 stakeholders aged more than 40 years and have been living in Loktuan for more than 25 years, based on a consideration that they have been knowing PT Pupuk Kaltim's operation well enough and witness the history of the company. The respondent's jobs are in informal sector, since they are direct beneficiaries of PT. Pupuk Kaltim's community development programs.

Analysis on PT. Pupuk Kaltim's community development made use the three main characteristics of community development programs, namely: community based, local resource based, and sustainability.

Suggestions for the improvement of PT. Pupuk Kaltim's community development programs are made through SWOT analysis. Planning for future community development of the company is proposed by applying seven magic steps of planning and strategic proposal.

Key words : PROPER, PT. Pupuk Kaltim, corporate social responsibility, proposed planning

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam Bab I ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap orang berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Modernisasi dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan akibat dari lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional, lingkungan hidup dianggap sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk semata menunjang pembangunan. Skala pragmatisme serta pendekatan dan tujuan yang didominasi oleh metodologi positivisme atas esensi lingkungan hidup telah menjadi racun bagi skala kerusakan dan dampak bawaan lingkungan hidup.

Pada dasarnya kegiatan suatu industri adalah mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Keluaran yang dihasilkan suatu industri adalah berupa produk yang diinginkan beserta limbah. Limbah dapat yang bernilai ekonomis sehingga dapat dijual atau dipergunakan kembali dan yang tidak bernilai ekonomis yang akan menjadi beban lingkungan. Limbah ini dikeluarkan melalui media udara, air dan tanah yang merupakan komponen ekosistem alam.

Lingkungan, yang merupakan wadah penerima akan menyerap bahan limbah tersebut sesuai dengan kemampuan asimilasinya. Kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri sendiri karena interaksi pengaruh luar, disebut daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda. Bahan pencemar yang masuk ke dalam lingkungan akan berinteraksi dengan satu atau lebih komponen lingkungan. Perubahan komponen lingkungan secara fisika, kimia dan biologi sebagai akibat dari adanya bahan pencemar akan mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan mengubah kualitas bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Oleh karena itu sangat perlu diketahui sifat limbah dan komponen bahan pencemar yang terkandung dalam limbah tersebut.

Kegiatan industri juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih besar terhadap pendidikan dan peningkatan standar kehidupan yang lebih baik. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal di

sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, proses produksi merangsang munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alamnya tidak bisa diekplotasi lagi. Masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan tidak memiliki kesempatan itu lagi. Keadaan akan menjadi lebih buruk apabila pada waktu perusahaan-perusahaan sudah habis masa kontraknya dan harus meninggalkan daerah operasinya masih menyisakan masalah kerusakan fisik lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan proses produksi yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan masyarakat lokal karena kerusakan lingkungan bisa menimbulkan erosi, banjir, dan tanah longsor. Sementara pencemaran bisa mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi keluarga.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, pasal 5, menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara parsial. Lingkungan hidup harus dipandang secara holistik dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara.

Esensi lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (hak asasi lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. lingkungan hidup sebagai sebuah sistem tentu tunduk pada sebuah sistem hukum alam yang ditakdirkannya. Sistem tersebut dapat berlangsung dengan seimbang jika kualitas komponen di dalamnya tetap berjalan stabil.

Hadi dan Adji (2007:13) mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan masih dipandang sebagai beban. Terdapat ciri-ciri lingkungan yang menyebabkan para

pengambil keputusan dan kalangan bisnis tidak begitu mudah terdorong untuk menginternalisasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya. Ciri-ciri tersebut meliputi :

- 1 Bahwa lingkungan itu bersifat *intangibile* artinya sulit dikuantifikasi dalam nilai moneter,
- 2 Dampak lingkungan terjadi dalam jangka panjang,
- 3 Dampak lingkungan bersifat eksternalitas negatif, dan
- 4 Bahwa lingkungan sebagai ruang dan sumber daya alam dianggap sebagai milik publik.

Dalam kaitannya dengan *intangibility*, maka valuasi terhadap sumber daya alam dan dampak lingkungan menjadi sesuatu yang *urgent* untuk dilakukan. Valuasi dimaksud menjadi basis penghitungan pendapatan regional hijau dan biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan, suatu pendapatan yang telah memasukkan nilai deplesi sumber daya alam.

Hadi dan Adji (2007), mengatakan bahwa kehadiran usaha bisnis memiliki peran penting di era globalisasi dan otonomi daerah. Usaha bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Selanjutnya mereka berdua mengatakan bahwa hubungan bisnis dengan lingkungan nampak pada dua bentuk, yaitu :

- 1 Dalam usaha menambah kegunaan suatu barang, kegiatan bisnis mendayagunakan sumber daya alam
- 2 Dalam proses pengolahan sumber daya alam itu, pembuangan limbah (*unwanted product*) akan membawa konsekuensi buruk pada lingkungan.

Keberadaan industri PT. Pupuk Kaltim dan industri-industri lainnya di Kota Bontang membawa perubahan yang cukup signifikan di Bontang yang semula dalam keadaan terisolir dari daerah lainnya dengan adanya industri tersebut Bontang menjadi lebih terbuka, perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya usaha rumah sewa / penginapan, dan warung-warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi keberadaan industri tersebut apabila tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat bisa berdampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, yang pada akhirnya meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihannya.

Salah satu dampak sosial dengan adanya pembangunan industri khususnya PT. Pupuk Kaltim adalah meningkatnya jumlah penduduk mengingat industri merupakan salah satu penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdatangan pula penduduk pencari kerja. Penduduk Kota Bontang pada tahun 1977, awal kegiatan proyek PT. Pupuk Kaltim diperkirakan hanya sekitar 15.000an jiwa, kini telah mencapai lebih dari 125.187 jiwa sebagaimana Tabel 1. di bawah ini (data BPS Kota Bontang, 2007).

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Kota Bontang

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Bontang Selatan	106,40	44.636	46.084	42.685	48.378	52.152	48.980	53.612
Bontang Utara	26,20	54.981	56.769	43.253	47.357	47.731	50.016	51.274
Bontang Barat	17,20	Belum Terbentuk		19.758	21.347	18.349	22.086	20.301
Jumlah	149,80	99.617	102.853	105.696	117.082	118.232	121.082	125.187

Meningkatnya jumlah penduduk dalam waktu relatif cepat tersebut akan membawa berbagai macam pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung yang menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan berakibat pada masalah-masalah yang semakin kompleks dan sulit penanganannya. Pengaruh-pengaruh negatif tersebut diantaranya adalah :

1. Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan limbah rumah tangga
2. Rasa ketidak puasan penduduk lokal akibat kalah bersaing dengan pendatang
3. Timbulnya masalah kriminalitas
4. Menurunnya kualitas estetika dan ketidak serasian penggunaan tata ruang
5. Menurunnya norma sosial dan tata nilai dalam masyarakat, misalnya muncul kedai penjual minuman keras, prostitusi, dan lain-lainnya.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, kinerja pengelolaan lingkungan wajib diungkapkan dan disampaikan oleh setiap orang / penanggung-jawab kegiatan. Kecuali AMDAL dan pengendalian pencemaran udara, seluruh informasi kinerja pengelolaan lingkungan tersebut hanya disampaikan kepada instansi lingkungan hidup.

Sebagai sebuah perusahaan BUMN, PT. Pupuk Kaltim mengikuti program audit lingkungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui PROPER. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KLH tahun 2004/2005 dan tahun 2005/2006, PT. Pupuk Kaltim baru bisa memperoleh peringkat biru.

PROPER atau Program Penilaian Peringkat Pengelolaan lingkungan pada perusahaan merupakan instrumen yang digunakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. PROPER adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan suasana yang kondusif dan menguntungkan bagi perusahaan yang bersungguh-sungguh menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

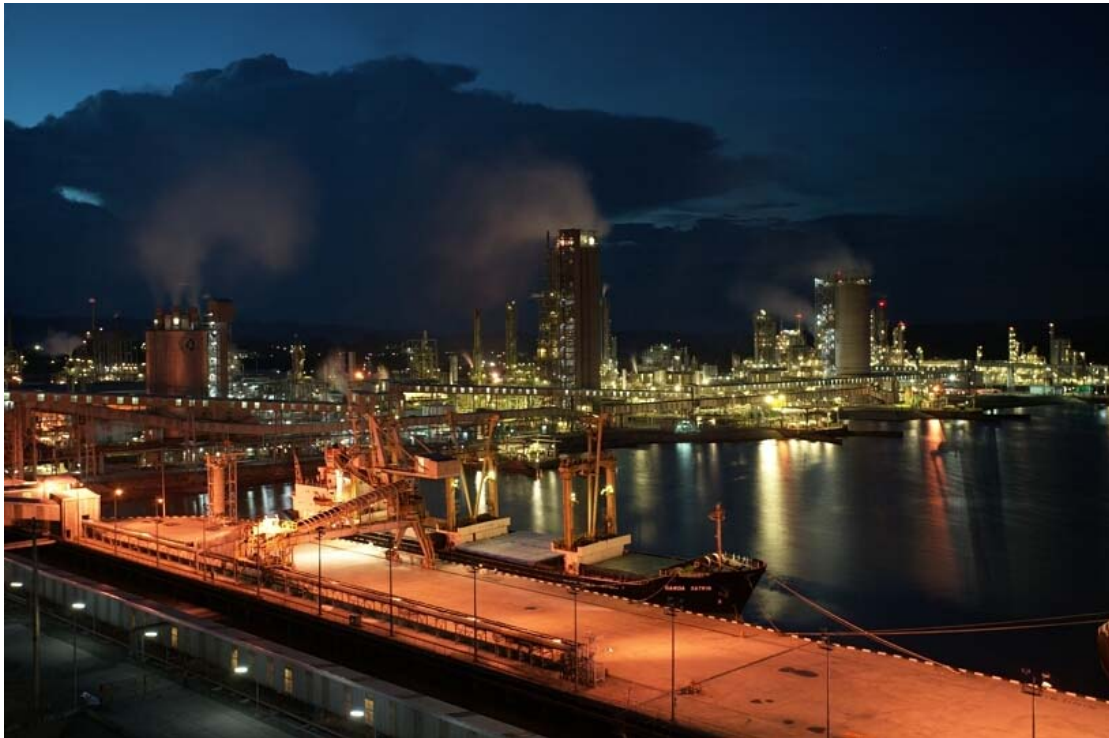
Aspek penilaian PROPER adalah ketaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, AMDAL serta pengendalian pencemaran laut. Ketentuan ini bersifat wajib untuk dipenuhi. Jika perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut (*in compliance*) maka akan diperoleh peringkat BIRU, jika tidak maka MERAH atau HITAM, tergantung kepada aspek ketidak-taatannya.

Dalam penilaian untuk peringkat hijau dan emas (*beyond compliance*) pada program PROPER, tiga aspek yang dinilai adalah Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumberdaya serta Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (*community development*).

Dikaitkannya pelaksanaan program *community development* dengan perolehan PROPER hijau dan emas di perusahaan karena dengan pelaksanaan *community development* yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Misi untuk mencapai profitabilitas dan kesinambungan pertumbuhan perlu ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), di mana terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh bersama. Untuk itu perlu kolaborasi antara seluruh stakeholder guna mendapatkan hasil yang optimal.

Gambar 1. Pabrik PT. Pupuk Kaltim

PT. Pupuk Kalimantan Timur walaupun telah berbuat banyak dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bontang, namun sebagian dari *stakeholder* (pemangku



kepentingan) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah Kota Bontang, dan juga penerima manfaat yaitu masyarakat yang menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bontang belum optimal, memihak masyarakat tertentu, bahkan dikatakan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur belum banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Guntung, Loktuan, dan Bontang Kuala yang merupakan daerah penyangga (*buffer zone*), yaitu wilayah paling dekat dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Dengan adanya suara sumbang sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur masih terdapat kekurangan, dan hal ini bisa diakibatkan belum adanya sinergi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antara PT. Pupuk Kalimantan Timur, industri lainnya dan Pemerintah Kota Bontang. Masing-masing pihak menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut berjalan sendiri sesuai dengan konsep dan pemikirannya mengenai pemberdayaan masyarakat, sehingga penyaluran dana sering tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Seluruh temuan tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup yang didampingi oleh pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan oleh PT. Pupuk Kaltim dengan hasil diterimanya PROPER Biru pada tahun 2005 dan tahun 2006, berusaha sekuat tenaga diperbaiki dan dilakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan antara auditor dan auditee dengan harapan pada tahun 2007 PT. Pupuk Kaltim bisa memperoleh PROPER Hijau.

PROPER Hijau dan PROPER Emas (penghargaan yang paling tinggi di dalam program peringkat lingkungan) selalu dikaitkan dengan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pemberdayaan masyarakat (*community development*) telah dilakukan akan tetapi belum banyak diketahui apakah telah mampu membawa perubahan sebagaimana tujuan yang diharapkan karena masyarakat dan juga Pemerintah Kota Bontang masih juga menanyakan dan mempermasalahakan sejauh mana PT. Pupuk Kaltim melaksanakan pembinaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan berapa besar dana yang dialokasikan untuk program tersebut. Hal ini tentunya bisa dipahami karena persepsi para pihak berbeda dalam memandang pembinaan wilayah dan *community development* tersebut.

Beberapa pokok persoalan yang bisa menyebabkan ketidak sesuaian manajemen PT. Pupuk Kaltim dalam pelaksanaan program *community development* sebagaimana yang digariskan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam pencapaian PROPER Hijau dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya suara sumbang dari sebagian *stakeholder* (pemangku kepentingan) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah Kota Bontang, dan juga penerima manfaat yaitu masyarakat yang menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bontang belum optimal, memihak masyarakat tertentu, bahkan dikatakan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur belum banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang
2. Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan *community development* di lingkungan PT. Pupuk Kaltim semenjak dicanangkan sampai dengan saat ini dari sisi proses manajemen.
3. PT. Pupuk Kaltim ingin memperoleh PROPER Hijau, sehingga perlu diketahui proses *community development* yang dilaksanakannya sebagaimana yang digariskan dalam format PROPER.

Bertolak dari kenyataan di atas, dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa masih terdapat suara sumbang terhadap proses dan pelaksanaan *community development* oleh PT. Pupuk Kaltim?
2. Bagaimana proses *community development* dilaksanakan?
3. Bagaimana efektifitas *community development* dari perspektif masyarakat?
4. Apakah hasil *community development* telah sesuai dengan format Proper?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di Kota Bontang, khususnya di Kelurahan Loktuan dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. mendapatkan gambaran upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim dalam kegiatan *community development* di Kelurahan Loktuan dikaitkan dengan persyaratan perolehan Proper Hijau
2. mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan *community development* oleh PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan
3. mengajukan usulan proses dan bentuk *community development* dalam Proper

Sedangkan tujuan subyektifnya adalah untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan di dalam penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Magister Ilmu Lingkungan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

1.4 Manfaat Penelitian.

Berawal dari permasalahan dan tujuan tersebut maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dipergunakan oleh manajemen PT. Pupuk Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakannya dalam pelaksanaan *community development*, khususnya kesesuaian dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
2. Dapat dipergunakan oleh manajemen PT. Pupuk Kaltim untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan *community development* untuk bisa memperoleh Proper Hijau atau bila memungkinkan mendapatkan penghargaan Proper Emas.

Adapun manfaat secara umum diharapkan PT. Pupuk Kaltim lebih meningkatkan program perbaikan di bidang pengelolaan lingkungan dan kegiatan *community development* yang memberikan nilai tambah bagi PT. Pupuk Kaltim di mata masyarakat Kota Bontang khususnya dan juga manfaat secara umum, di antaranya adalah :

1. Memberikan citra yang lebih baik bagi PT. Pupuk Kaltim di dalam maupun di luar negeri bilamana bisa mendapatkan Proper Hijau dari pemerintah.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar PT. Pupuk Kaltim dengan adanya program *community development* yang dilaksanakan secara benar.
3. Peningkatan laba PT. Pupuk Kaltim jika prinsip *community development* bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga adanya kepuasan masyarakat di sekitar perusahaan dan juga para pelanggan yang akan menimbulkan rasa aman dan meningkatkan kebanggaan para karyawan, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat produktivitas karyawan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab II ini, diuraikan tentang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan, program peringkat lingkungan (Proper), dan *Cmmunity development*

2.1 Kebijakan Publik dan Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan *public goods* yang harus dijaga kelestariannya sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa pengecualian. Udara, air, dan lahan-lahan yang bersih dan sehat dan tidak tercemar merupakan hak setiap orang.

Potret buruk pengelolaan lingkungan di Indonesia bermuara pada persepsi dan pemahaman tentang sumber daya alam yang tidak lebih dari sekedar komoditas, cara pandang yang reduksionis dan eksploitatif, belum tuntasnya berbagai masalah fundamental yang terkait sumber daya alam, pembagian keuntungan yang tidak merata, serta desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang tidak disertai paradigma pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hadi dan Adji (2007:20), dalam pandangan konvensional, perusahaan hanya perlu memperhatikan kepentingan pemilikinya saja, dan hanya untuk keamanan sang pemilik saja tanpa memperhatikan kepentingan lain. Pandangan demikian naif sekali, sebab dalam prakteknya untuk menjamin kelestarian usaha, faktor lain termasuk masyarakat perlu diperhatikan kepentingannya. Pandangan kedua ini sering disebut *the stakeholders principle* atau lebih dikenal dengan *the hold stake something* yang berarti mempunyai kepentingan dalam sesuatu.

Menurut Hadi dan Adji (2007: 67), dalam konteks kerusakan lingkungan, kegiatan bisnis seringkali dituding sebagai penyebabnya karena tindakannya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan yang dapat / bahkan dalam beberapa hal harus dilakukan oleh pebisnis selaku pemrakarsa kegiatan. Instrumen tersebut secara kategori terdiri atas :

1. Tindakan bersifat pre-emptif, lebih dititik beratkan kepada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh usaha / kegiatan sebelum kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berlangsung dan pencantuman beberapa persyaratan teknis sebelum izin diberikan atau dijalankan. Termasuk dalam kategori ini adalah penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL, dan UKL-UPL.
2. Tindakan bersifat preventif, menekankan kepada hasil yang telah dicapai oleh usaha / kegiatan berkaitan dengan pentaatan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh usaha / kegiatan tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan pengawasan baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper), dan
3. Tindakan bersifat pro-aktif, termasuk di dalamnya adalah sertifikasi ISO 14001, Audit Lingkungan atas prakarsa sendiri.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam kegiatan bisnis perusahaan pada era sekarang dan itu merupakan bagian wujud tanggung jawab sosial perusahaan di masa

kini dan masa mendatang. Di era kompetisi sekarang ini, reputasi baik perusahaan yang ditunjukkan dengan tanggung jawabnya melindungi lingkungan merupakan sebuah *competitive advantage*.

Memperhatikan adanya perbedaan persepsi dan kepentingan di dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan nasional lingkungan hidup yang digariskan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Kebijakan nasional lingkungan hidup yang merupakan nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan terdiri dari :

- a. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsinya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (constraint) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan konsekuen.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya.
- d. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir.
- e. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan.
- f. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkannya
- g. Pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggung jawaban.

2.2 Program Peringkat Lingkungan (PROPER)

2.2.1 Latar Belakang PROPER

PROPER telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh KLH sejak tahun 1995 dengan nama PROPER PROKASIH. Efektifitas PROPER sebagai salah satu instrumen penaatan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan PROPER PROKASIH pada tahun 1995 – 1997, dimana PROPER PROKASIH mampu meningkatkan tingkat

penaatan perusahaan sebesar 9,4 % dari 213 perusahaan yang telah dinilai peringkatnya selama periode Desember 1995 – Maret 1997.

Namun hasil kinerja PROPER PROKASIH belum mencerminkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, dimana kinerja lingkungan yang ada hanya mencerminkan kinerja pengendalian pencemaran air. Untuk mendapatkan gambaran kinerja penaatan pengelolaan lingkungan yang komprehensif maka penilaian kinerja perlu diarahkan kepada kinerja pengelolaan lingkungan yang meliputi : air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

PROPER telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penaatan perusahaan di berbagai negara, antara lain Filipina, Mexico, dan Kolombia.

Pada tahun 1996, PROPER telah mendapatkan penghargaan *Zero Emission Award* dari UN University Tokyo sebagai program inovatif dalam pengelolaan lingkungan. Sementara itu, para peneliti dari World Bank menyebutkan PROPER sebagai salah satu *Landmark Initiative* dalam pengelolaan lingkungan.

Sistem peringkat kinerja PROPER memiliki 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat, perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan yang taat, sedangkan perusahaan hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungannya lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan di Indonesia. Dengan demikian untuk perusahaan berperingkat emas, hijau, dan biru mendapatkan insentif reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat merah dan hitam mendapatkan disinsentif reputasi. Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat karena masyarakat dapat mengetahui tingkat penaatan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat peringkat warna yang ada.

Pelaksanaan PROPER merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, dengan kata lain PROPER juga merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam pengendalian dampak lingkungan.

Jika pada pencapaian peringkat biru digunakan penilaian sistem gugur, maka pada pencapaian peringkat hijau atau emas digunakan penilaian sistem pembobotan. Dalam penilaian untuk peringkat hijau dan emas (*beyond compliance*) pada program PROPER, tiga aspek yang dinilai adalah Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumberdaya serta Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (*community development*). Sampai hari ini belum ada satupun perusahaan yg memperoleh peringkat emas karena indikator pencapaian kriteria kegiatan Pengembangan Masyarakat (*community development*) masih harus dikembangkan ke tingkat yang terukur.

Menurut Hadi dan Adji (2007:92), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian lingkungan yang berbasis insentif dan disinsentif. Artinya dengan diumumkannya peserta

PROPER dengan peringkat Hijau, Biru, Merah dan Hitam, akan diketahui oleh masyarakat dan bisa menimbulkan citra sesuai dengan peringkat yang mereka capai. PROPER merupakan inovasi dalam mengendalikan pencemaran di sektor industri. Kalau pola ADA (Atur dan Awasi) disertai sanksi, pola ADS (Atur Diri Sendiri) menyerahkan kesukarelaan (*voluntary*) kepada industri, dengan PROPER dilakukan pembinaan secara langsung sehingga secara bertahap bisa mendapatkan peringkat lebih baik.

Hadi dan Adji juga mengatakan, menilai masih buruknya kinerja lingkungan dari industri agaknya perlu mengkaitkan instrumen satu dengan instrumen lainnya. Insentif dan disinsentif sebaiknya bukan hanya dalam bentuk citra saja, tetapi juga dalam bentuk perhatian dan tekanan dari pihak-pihak terkait. Bagi yang mendapatkan PROPER Hijau atau Biru selayaknya diberi insentif berupa keringanan pajak, keringanan pajak pengadaan Unit Pengolah Limbah (UPAL), dan sebagainya. Bagi yang berperingkat buruk (Merah atau Hitam), pemerintah harus melakukan pembinaan. Jika dengan pembinaan masih membandel, maka bentuk tekanan yang bisa dilakukan adalah dengan tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menetapkan bahwa pencemaran lingkungan termasuk tindakan yang dapat diberi sanksi. Bahkan pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang tanggung jawab mutlak. Bila terjadi pencemaran lingkungan, maka pelaku usaha wajib membayar ganti rugi secara langsung dan seketika.

PROPER memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok. Agar informasi yang dikeluarkan oleh Proper *legitimate* di mata masyarakat maka pelaksanaan PROPER menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG), antara lain transparansi, *fairness*, partisipasi *multi stakeholder* dan akuntabel.

Sasaran dari pelaksanaan PROPER ini adalah mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui instrumen insentif dan disinsentif reputasi, dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*). Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PROPER di perusahaan di antaranya adalah :

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha / kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
5. Meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat;
6. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan

Saat ini data PROPER sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk mengetahui tingkat kinerja penaatan pengelolaan lingkungan pada perusahaan. Sektor perbankan paling banyak menggunakan data PROPER, selain itu beberapa investor yang akan melakukan *due-diligence*. Hanya saja sampai saat ini komunitas pasar modal belum menggunakan data PROPER untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan yang tercatat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Bapepam maupun BEJ mengenai pengungkapan informasi pengelolaan lingkungan pada Laporan Keuangan perusahaan khususnya yang mempunyai dampak besar dan penting, hanya bersifat anjuran. Di beberapa negara, kinerja pengelolaan lingkungan telah dijadikan sebagai salah satu benchmark untuk pemilihan investasi seperti pada Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) maupun FTSE4Good Index Series.

2.2.2 Dasar Hukum PROPER

Dasar hukum pelaksanaan PROPER dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

2.2.3 Faktor Kunci Keberhasilan dan Strategi

1. Faktor Kunci Keberhasilan

- a. Tumbuhnya sikap proaktif dan kesadaran para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam mensikapi paket informasi penaatan yang telah dikeluarkan oleh KLH merupakan salah satu faktor penting dari keberhasilan pelaksanaan PROPER.
- b. Kualitas informasi PROPER yang disampaikan kepada para *stakeholder* sehingga mampu mendorong para stakeholder melakukan langkah proaktif;
- c. Kepedulian perusahaan terhadap reputasi atau citra sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PROPER.

2. Strategi

- a. Paket informasi PROPER yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para *stakeholder*. Menurut KLH, untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para *stakeholder* maka peringkat kinerja penaatan perusahaan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:
 - **Peringkat Emas** ~ untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
 - **Peringkat Hijau** ~ untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Peringkat Biru** ~ untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - **Peringkat Merah** ~ untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - **Peringkat Hitam** ~ untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.
- b. PROPER harus dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di mata para *stakeholder*. Untuk itu pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pelibatan *multi stakeholder*;
- c. PROPER perlu diarahkan kepada perusahaan yang peduli terhadap reputasi atau citranya di mata para *stakeholdernya*;
- d. Pelaksanaan PROPER harus dilakukan secara bersama-sama dengan instrumen penataan lainnya, seperti; instrumen ekonomi dan instrumen penegakan hukum, seperti ditampilkan dalam Gambar 2



Gambar 2. PROPER dan Instrumen Penataan lainnya

- *Pemberian penghargaan untuk perusahaan yang berperingkat Emas dan Hijau agar menjadi contoh pengelolaan lingkungan*

yang baik bagi perusahaan lainnya, dan didorong untuk melakukan produksi bersih;

- *Perusahaan yang berperingkat Hitam perlu diikuti dengan upaya penegakan hukum, dan untuk perusahaan berperingkat Merah perlu dilakukan pembinaan dan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan sebelum diikuti dengan upaya penegakan hukum.*
- e. Pelaksanaan PROPER ke depan harus melibatkan jumlah perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat mencerminkan tingkat penataan perusahaan secara keseluruhan, dan tercapainya konsistensi serta berkeadilannya pengelolaan lingkungan di Indonesia.
- f. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota agar pelaksanaan PROPER dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2.4 Lembaga Pelaksana

Untuk mewujudkan *Good Environmental Governance* maka pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pendekatan partisipatif *multi stakeholder*. Pelaksanaan PROPER secara teknis dilakukan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun dalam beberapa tahapan pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif *multi stakeholder* yang meliputi tahap kegiatan, sebagai berikut:

- a. Dalam tahapan persiapan dan perencanaan PROPER, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan berbagai *stakeholder*, antar lain: sektor terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. Proses penilaian PROPER dilakukan melalui beberapa tahapan pengkajian teknis di internal KLH (*peer review*), dimulai dari **Tim Teknis PROPER KLH** terdiri dari para **Pengawas Lingkungan Hidup** (PPLH), para **Eselon I KLH**, dan masukan dari para anggota **Dewan Pertimbangan PROPER**. Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan PROPER terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yaitu: Pemerintah, Tokoh masyarakat yang kredibel, Perguruan Tinggi / Pakar Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. Hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dan atau *stakeholder* lainnya dapat bereaksi terhadap informasi tersebut sesuai dengan kapasitasnya

2.2.5 Indikator Keberhasilan

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, maka beberapa hal di bawah ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Proper yaitu :

- a. Menurunnya beban pencemaran (pollution load) yang dikeluarkan oleh perusahaan ke lingkungan;
- b. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan;
- d. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menaati peraturan lingkungan;
- e. Meningkatnya kepercayaan para *stakeholder* terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan yang telah dilakukan.

2.2.6 Keuntungan PROPER Bagi Stakeholder

Pelaksanaan PROPER memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan para *stakeholder* lainnya, antara lain:

- a. Sebagai instrumen *benchmarking* bagi perusahaan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja terhadap kinerja perusahaan lainnya secara nasional (*non financial benchmarking*);
- b. Sebagai media untuk mengetahui status ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Sebagai salah satu *clearing house* bagi investor, perbankan, masyarakat dan LSM sekitar perusahaan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan;
- d. Sebagai alat promosi bagi perusahaan yang berwawasan lingkungan terutama untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam perdagangan;
- e. Sebagai bahan informasi bagi pemasok teknologi lingkungan terutama berkaitan teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh perusahaan;
- f. Meningkatkan citra dan kepercayaan perusahaan di mata para *stakeholder*;
- g. Memberikan ruang partisipatif bagi para *stakeholder* untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.

2.2.7 Kriteria Penilaian

Peringkat kinerja PROPER berorientasi kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakupi 7 (tujuh) aspek yaitu:

1. *Pentaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air;*
2. *Pentaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran udara;*
3. *Pentaatan terhadap peraturan pengelolaan Limbah B3;*
4. *Pentaatan terhadap peraturan AMDAL;*
5. *Sistem Manajemen Lingkungan;*
6. *Penggunaan dan pengelolaan sumber daya;*
7. *Community Development, Participation, dan Relation.*

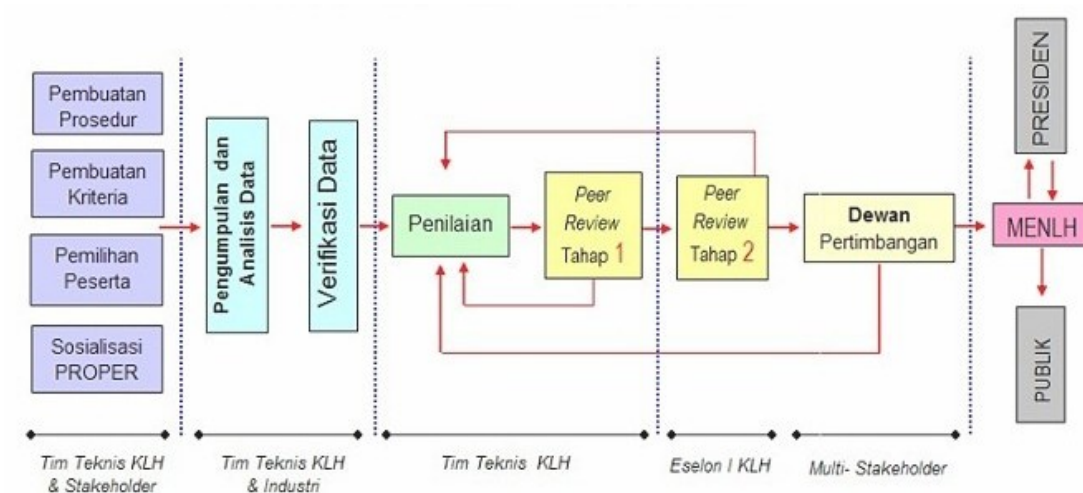
Dasar penilaian dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*) yang sudah dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, dititik beratkan pada 4 (empat) area penilaian utama dengan metode sistem gugur sebagaimana dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2. Penilaian PROPER Sistem Gugur

No.	Area penilaian	Dasar Nilai
1.	Pengendalian Pencemaran Air dan Laut	Baku Mutu per Parameter Kunci
2.	Pengendalian Pencemaran Udara	Baku Mutu per Parameter Kunci
3.	Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3	Izin dan Progres Pengelolaan Terukur
4.	Persyaratan AMDAL	Progres Pentaatan RKL/RPL

Peringkat kinerja perusahaan disaring berdasarkan tingkat pentaatan perusahaan terhadap aspek baku mutu / izin air limbah dan emisi udara untuk setiap parameter dan setiap aspek pengelolaan Limbah B3.

Gambar 3 merupakan alur prosedur penilaian PROPER untuk menghasilkan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penilaian PROPER

- a. Untuk peringkat Hitam, Merah dan Biru penilaian dilakukan berdasarkan tingkat penaatan terhadap baku mutu / izin, terhadap air limbah, emisi udara dan penaatan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- b. Untuk peringkat Hijau dan Emas disamping penilaian terhadap tingkat penaatan, juga dilakukan penilaian terhadap sistem manajemen lingkungan, output minimisasi limbah, kegiatan community relation, community development, dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

2.2.8 Sumber Data Penilaian

Data yang digunakan untuk penilaian berasal dari berbagai sumber dan hasil verifikasi oleh Tim Teknis PROPER yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

- 1 Data primer dari tim teknis;
- 2 Data swapantau oleh pihak perusahaan;
- 3 Data pemantauan oleh pemerintah daerah terkait;
- 4 Data pemantauan oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

2.3 *Community Development di dalam Corporate Social Responsibility*

2.3.9 Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Pemikiran tentang korporasi yang lebih beradab, sebetulnya telah muncul sejak lama. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat *beyond compliance*, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju *sustainability* (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya. Penerapan kegiatan dengan definisi CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an,

dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti integrasi ke dalam tata cara perusahaan mengoperasikan usahanya.

Sejak awal pemunculannya hingga kini, konsep CSR berkesan amat moralis. Kata "sosial" dalam CSR bermakna *peyoratif* yang berarti "sukarela", lebih bermakna sebagai tindakan filantropi, altruistik, kebaikan budi, bukan sebuah kewajiban. Padahal, terkait dengan advokasi hak asasi manusia, imbauan moralis serta semangat altruistik di balik kata "sosial" sama sekali tidak memadai. Konsep hak asasi manusia mengimplikasikan adanya "tanggung jawab" atau "kewajiban", baik politik maupun hukum. Namun, sudah jamak, hukum bukanlah hukum tanpa enforcement, atau dalam perspektif filsafat hukum sering disebut "faktisitas", yaitu keterterimaan oleh masyarakat dan subyek hukum lainnya, seperti pebisnis. *Enforcement* itu, tidak bisa tidak, pasti mengandaikan politik. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab terpenting terkait dengan CSR adalah tanggung jawab politik.

Konsep hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disampaikan Nicholas Eberstadt. Beberapa pengamat menyatakan *corporate social responsibility* (CSR) berhutang sangat besar pada konsep *muamalah* dalam *syariat* Islam dan etika perusahaan yang dikembangkan gereja Kristen.

Pada tahun 1933, A Berle dan G Means, meluncurkan bukunya berjudul *The Modern Corporation and Private Property*, yang mengemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, ketimbang institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F Drucker pada 1946, lewat bukunya *The Concept of Corporation*. Di sini, Drucker menegaskan tentang peran manajemen: "*Management has become a major leadership group in industrial society and as such have great responsibilities to their own profession, to the enterprise and to the people they manage, and to their economy and society.*"

Istilah CSR sendiri baru menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku *Social Responsibility of Businessmen* pada 1953. CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sejak itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dimulai. Gema CSR pada era 1960-an semakin ramai dengan terbitnya buku legendaris yang berjudul *Silent Spring*. Di dalam buku ini untuk pertama kalinya persoalan lingkungan diwacanakan dalam tataran global. Penulis buku itu, Rachel Carson adalah seorang ibu rumah tangga biasa, mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa betapa mematakannya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan. Melalui karyanya itu sepertinya ia ingin menyadarkan kita bahwa tingkah laku korporasi mesti dicermati sebelum berdampak menuju kehancuran. Semenjak itu perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapatkan perhatian yang kian luas.

Pemikiran tentang korporasi yang lebih beradab, juga muncul dalam *The Future Capitalism* yang ditulis oleh Lester Thurow pada tahun 1966. Menurutnya, kapitalisme yang menjadi *mainstream* saat itu tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis yang nantinya disebut *sustainable society*.

Pada dasawarsa 1970-an, terbitlah buku *The Limits to Growth*, hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome*. Buku ini mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak ini mempunyai keterbatasan daya dukung, sementara di sisi lain manusia bertambah secara eksponensial. Oleh karenanya eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *philanthropy* serta *community development*. Pada dasawarsa ini terjadi perpindahan penekanan dari fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan terjadi manakala variabel-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin (misalnya pendidikan dan kesehatan) dapat dibantu dari luar. Berbagai program populis kemudian banyak dilakukanseperti penyediaan air bersih, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lainnya.

Baru pada era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya ke arah *community development*. Intinya kegiatan kedermawanan ala Robbin Hood makin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat semisal pengembangan kerjasama, memberikan pelatihan, pembukaan akses pasar, hubungan inti-plasma, dan sebagainya.

Pada dasawarsa 1990-an, diwarnai dengan beragam pendekatan seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholders* maupun pendekatan *civil society*. Munculnya KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggila. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak uang semata.

Terobosan besar dalam konteks CSR dilakukan oleh John Elkington melalui konsep “3P” (*profit, people, planet*) yang dituangkan dalam bukunya *Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business* yang direlease pada tahun 1997. Dia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, perlu memperhatikan 3P yakni perusahaan harus menguntungkan dan kompetitif (*profit*), dalam kegiatan bisnis faktor manusia adalah faktor yang sangat penting / berkontribusi positif dalam menyejahterakan orang (*people*), dan bahwa kegiatan bisnis perusahaan harus berorientasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan menjaga kelestarian bumi kita (*planet*)

Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Sejak saat itulah definisi CSR mulai berkembang.

2.3.10 Definisi *Corporate Social Responsibility*

Dalam perkembangannya, konsep CSR memang tidak memiliki definisi tunggal. Ini terkait implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan yang juga berbeda-beda. Namun, beberapa definisi yang cukup berpengaruh diantaranya:

Versi Bank Dunia:

"CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development."

Versi Uni Eropa:

"CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basis."

Beberapa definisi lainnya tentang CSR diantaranya *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Menurut Warta Pertamina (2004), CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan, di samping ekonomi. Sedangkan Petkoski dan Twose (2003) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperan untuk mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 *multinational company* yang berasal lebih dari 30 negara, mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Corporate Social Responsibility menurut Philip Kotler adalah *a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contribution of corporate resources.*

Pemerintah Inggris mendefinisikan CSR secara prinsip sebagai *about companies moving beyond a base of legal compliance to integrating socially responsible behaviour into their core values, in recognition of the sound business benefits in doing so.*

Trinidad and Tobacco Bureau of Standard (TTBS) menyimpulkan bahwa CSR terkait dengan nilai dan standar yang dilakukan berkenaan dengan beroperasinya sebuah korporat, maka CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan

ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002).

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan (Tony Djogo, beritabumi 24 November 2005)

CSR Forum memberikan definisi, *CSR mean open and transparant business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*. Konsep CSR menurut World Bank (Fox, Ward, and Howard 2002:1) merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Schermerhorn (1993), CSR adalah sebuah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara mereka sendiri, dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Menurut Nuryana (2005), CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan berdasarkan kesukarelaan dan kemitraan.

Adapun prinsip CSR menurut Emil Salim (2007) dalam acara *launching* Perhimpunan Philantropis Indonesia menyebutkan bahwa perusahaan di masa sekarang dan ke depan harus memperhatikan tiga prinsip keseimbangan, yakni profit perusahaan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan alam atau lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran manajemen bisnis modern yang dikembangkan oleh Porter dan Kramer (2002) serta Milton Friedman (2004), bahwa aspek ekonomi dan sosial perusahaan merupakan prinsip yang satu kesatuan, dan bukannya sesuatu yang terpisah.

Mu'man Nuryana dalam makalahnya "*Corporate Social Responcibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*" menyampaikan bahwa CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Nama lain CSR antara lain *corporate giving/charity, corporate philanthropy, corporate community/public relations, community development*. (disarikan dari Edi Suharto, Ph.D dalam Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev yang disampaikan dalam workshop CSR, Bandung 29 November 2006)

Pandangan lain tentang CSR yang lebih komprehensif, dilontakan oleh *Prince of Wales International Business Forum-* yang di Indonesia dipromosikan oleh *Indonesia Business Links*. CSR menyangkut lima pilar, yaitu :

1. *building human*; menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal (masyarakat). Perusahan dituntut melakuka pemberdayaan, biasanya melalui *community development*.
2. *strengthening economies*; memberdayakan ekonomi komunitas.
3. *assessing social cohesion*; perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik.
4. *encouraging good governance*; perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik.

5. *protecting the environment*; perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan

2.3.11 Stakeholders Program CSR: Peranan dan Kepentingannya

Dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan *stakeholders* perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator.

Sebagaimana dinyatakan oleh Dinitto (1987: 135) dan Hill (1996: 129) bahwa stakeholder dalam pelayanan sosial adalah negara, sektor prihat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama. Sementara mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu sama lain bisa saling berseberangan dan sangat mungkin merugikan pihak yang lain. Kepentingan perusahaan dan *stakeholder* dalam pelaksanaan program CSR dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR

Perusahaan	Pemerintah Daerah	LSM	Masyarakat
<ul style="list-style-type: none">• Keamanan fasilitas produksi• Kewajiban kontrak	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Mengontrol• Menjadi mitra kerja perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Penerima program yang diberdayakan

Perusahaan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menyatakan pada publik dengan mempropagandakannya lewat media massa. Kecenderungan yang terjadi adalah adanya *mark-up* biaya yang digunakan untuk merealisasi program *community development*. Masyarakat merasa bahwa realisasi program tidak menggunakan biaya sebesar seperti yang tertulis pada propaganda tersebut.

Secara *philantropis* perusahaan seharusnya meredistribusi keuntungannya setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi di mana masyarakat berada. Apalagi mereka dalam keadaan miskin. Ini adalah kewajiban moral. Namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata.

Sementara itu pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan., dan juga membantu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya.

Pada sisi yang lain LSM, terutama LSM lokal melakukan dua peranan. Peranan yang pertama adalah mengontrol akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari proses produksi yang dilakukan perusahaan dan realisasi program CSR. Sedangkan peranan yang kedua adalah menjadi partner perusahaan untuk menjalankan program-program CSR.

Respon perusahaan terhadap keluhan-keluhan masyarakat lokal sering menimbulkan masalah baru karena kadang tidak proporsional. Dalam hal realisasi CSR, LSM mencermati masalah pendekatan yang digunakan. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dianggap isu penting oleh LSM.

Selain itu perhatian LSM juga dicurahkan pada akibat yang ditimbulkan program CSR dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. Ini terkait dengan kepentingan masyarakat terlibat dalam program CSR. Sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan adalah masyarakat miskin yang masih memerlukan pelayanan-pelayanan penguatan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Mereka merasa berhak mendapatkan pelayanan-pelayanan itu karena perusahaan sudah mendapatkan banyak keuntungan secara ekonomis sehingga sudah sewajarnya kalau perusahaan meredistribusikan sebagian kepada mereka. Selain itu, masyarakat merupakan bagian yang rentan terhadap akibat-akibat pencemaran yang mungkin muncul sehingga wajar kalau mereka mendapatkan kompensasi tersebut.

Bertemunya kepentingan-kepentingan itu menimbulkan masalah yang cukup serius. Motif perusahaan merealisasi program turut menentukan model realisasi program. Program yang tidak didasarkan pada semangat untuk melayani masyarakat lokal menjadi sebab perusahaan tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Realisasi program cenderung dilakukan secara tertutup dan didesain oleh perusahaan. Sementara itu pemerintah daerah mengharapkan program CSR bisa diintegrasikan dengan program-programnya dalam kerangka pembangunan regional. Di pihak lain masyarakat juga mengharapkan bahwa program tersebut mampu memberdayakan mereka. Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika LSM yang terlibat adalah bentukan dari beberapa birokrat pemerintah daerah.

Penyebab program CSR tidak memihak pada masyarakat diantaranya adalah perusahaan mengadakan kerjasama dengan LSM yang tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk merealisasi program yang partisipatif, dan motif ekonomi yang melatar belakangi pembentukan LSM tersebut. Akibatnya bisa ditebak, dari jumlah fasilitas yang didistribusikan pada masyarakat, terjadi kebocoran-kebocoran anggaran dana yang mestinya dialokasikan sepenuhnya pada kegiatan-kegiatan CSR.

2.3.12 **Gambaran Umum Program CSR**

Rumitnya hubungan kepentingan di antara *stakeholders* dan motif perusahaan merealisasi program CSR tidak terlepas dari substansi program serta pendekatan yang diadopsi perusahaan dalam merealisasi program. Beberapa program berusaha meningkatkan kapasitas masyarakat lokal namun secara umum realisasi program lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan derma berupa pendirian infrastruktur fisik dalam bentuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana air bersih, olah raga, dan tempat peribadatan. Pada konteks ini, kadang sulit dipisahkan adalah bahwa pembangunan fasilitas tersebut kadang bukan ditujukan untuk masyarakat lokal namun untuk perusahaan itu sendiri. Pendirian fasilitas transportasi berupa jalan misalnya, pada tingkat tertentu sebenarnya ditujukan untuk mempercepat jalannya proses produksi. Dengan demikian walaupun bermanfaat bagi masyarakat lokal, hal tersebut merupakan *externality* yang menguntungkan masyarakat lokal.

Tabel di bawah mengindikasikan bahwa penekanan substansi program lebih pada usaha

Sifat	Tipe	Bidang	Karakteristik
Pilantropis (derma)	Pembangunan infrastruktur fisik, pemberian bantuan alat, dan pemberian bantuan keuangan	Pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana air bersih, olah raga, peningkatan pendapatan, dan tempat peribadatan	1. Secara umum program tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca ekstraksi.
			2. Koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah kurang baik.
Peningkatan kapasitas	Pendampingan dan training	Pertanian dan industri rumah tangga	3. Implementasi program bersifat tertutup 4. Secara umum program dirancang oleh perusahaan. 5. Secara umum program kurang melibatkan masyarakat secara partisipatoris. 6. Desain kurang tersusun secara holistik dan sistematis

menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi. Pilihan-pilihan tersebut cukup kontekstual baik pada tingkatan teoritis maupun pada tingkatan fakta yang dihadapi masyarakat. Secara teoritis, salah satu *facet* paling mendasar dari *community development* adalah penyelesaian masalah tersebut dengan cara peningkatan pendapatan keluarga (Adelman dan Robinson, 1978: 146; Szirmai, 1997: 277).

Tabel 4. Gambaran Umum Program CSR

Secara faktual kondisi masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan menunjukkan bahwa mereka masih relatif miskin dan sarat dengan masalah-masalah tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan layanan kesehatan, dan menghadapi masalah pengangguran. Kalau diperhatikan secara lebih detail, program-program tersebut belum mencakup aspek lain yang juga penting, yaitu program penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan peran serta masyarakat. Padahal sektor prihatin merupakan entitas yang harus bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan (Miller, 1996: 243). Perusahaan perlu memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk melakukan reklamasi dan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Terdapat kesan bahwa

perusahaan sangat berhati-hati dalam merespon masalah lingkungan sehingga mereka cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam program-program penanganan masalah lingkungan. Padahal isu ini merupakan isu yang cukup serius.

Konflik mengenai masalah lingkungan sebenarnya merupakan produk yang terlihat nyata tentang masalah lingkungan yang terjadi. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya terdapat simpul-simpul lain yang merajut munculnya konflik tersebut yaitu tertutupnya perusahaan terhadap isu lingkungan dan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai masalah lingkungan. Dalam hal ini terlihat adanya *asymmetric information*, di mana perusahaan menguasai pengetahuan yang cukup mengenai masalah lingkungan yang ditimbulkan dan respon kebijakan yang dilakukan tetapi masyarakat tidak punya akses yang untuk mengetahuinya.

Beberapa kasus spesifik menunjukkan pernah terjadi masyarakat melakukan protes karena mengira telah terjadi pencemaran lingkungan namun sebenarnya yang terjadi bukan merupakan masalah pencemaran. Dengan demikian masalahnya adalah keengganan perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam program-program penanggulangan masalah lingkungan. Adalah suatu keharusan perusahaan untuk membuat infrastruktur guna mengurangi efek buruk polutan dan melakukan analisa dampak lingkungan. Namun kegiatan ini bersifat elitis: dilakukan oleh perusahaan dan melaporkannya pada lembaga pemerintah yang terkait dengan kebijakan lingkungan.

Sifat eksklusif penanganan masalah lingkungan ini mengakitakan resistensi-resistensi masyarakat dalam isu tersebut. Akibatnya adalah ketika terjadi masalah lingkungan maka respon masyarakat cukup keras terhadap masalah tersebut. Rendahnya keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi pada kegiatan-kegiatan penanganan masalah lingkungan hidup saja tetapi juga terjadi pada realisasi program CSR secara keseluruhan. Program didesain oleh perusahaan dan kurang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahap realisasinya, program melibatkan kedua entitas tersebut dengan intensitas yang berbeda. Sedangkan pada tahapan evaluasi dan pelaporan terlihat bahwa tahapan itu tidak melibatkan mereka. Akibat yang terjadi adalah bahwa koordinasi dalam merealisasi program antara perusahaan dan pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten berjalan tidak baik (PSKK dan UNDP, 2003: 41-43).

Idealnya program CSR dipraktekkan secara integral dengan program pembangunan regional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataan yang terjadi adalah program CSR *overlap* dengan program pembangunan regional atau berjalan secara terpisah tanpa ada kerangka kerja yang jelas. Secara ekonomis ini menimbulkan in-efisiensi. Pada sisi yang lain, secara sosial-politis hal ini akan menimbulkan kebingungan-kebingungan dalam masyarakat dan mengakibatkan hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan menjadi kurang baik.

Hal yang sama juga terjadi pada tingkatan masyarakat. Posisi tawar masyarakat relatif rendah. Sebagian besar program direalisasi tanpa dilakukan *need assessment* yang melibatkan masyarakat. Selain mengakibatkan ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat, hal ini juga menimbulkan partisipasi masyarakat pada program CSR rendah. Padahal, partisipasi merupakan esensi mendasar dalam realisasi program-program *community development* (Ife, 1996: 197).

Beberapa kasus menunjukkan pelibatan masyarakat pada realisasi program tidak terjadi secara sukarela. Masyarakat ber-"partisipasi" karena perusahaan memberikan imbalan berupa uang. Petani menanam sawahnya bukan karena petani ingin menanam sawahnya tetapi karena petani ingin mendapatkan uang ketika selesai menanam sawahnya. Akibatnya adalah bahwa masyarakat tidak termotivasi untuk mengelola sawahnya sampai menghasilkan panen yang baik.

Apabila dikaji pada tingkatan yang lebih makro, program yang dilakukan terlihat tidak dirancang secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang dengan kejelasan raihan yang jelas. Beberapa program terlihat diimplementasikan secara parsial, terpisah satu sama lain

2.3.13 Motif Perusahaan dalam Program CSR

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan. Ada tiga motif keterlibatan perusahaan didalam melaksanakan CSR yaitu motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Tabel 4 di bawah ini menggambarkan peta motif tersebut.

Tabel 5. Motif Perusahaan dalam Manjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif Memenuhi Kewajiban Kontraktual	Komitmen Moral
<ul style="list-style-type: none"> • Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban program CSR bukan pada pemerintah daerah dan masyarakat lokal tetapi pada pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana CSR
<ul style="list-style-type: none"> • Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Propaganda kegiatan CSR melalui media masa 	<ul style="list-style-type: none"> • Propaganda kegiatan CSR melalui media masa

Isu keamanan fasilitas produksi merupakan isu sensitif yang diperhatikan secara serius oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan ekstraksi berada di daerah pedalaman. Sementara fasilitas produksinya terbentang dalam area yang sangat luas. Secara fisik, kontrol terhadap infrastruktur tersebut tidak mudah. Perusahaan minyak atau gas terletak di daerah terpencil dengan jaringan pipa yang panjang dan kompleks misalnya, sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinan dirusak atau disabotase oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan tersebut ¹.

Konflik yang muncul ke permukaan sampai dalam wujud demonstrasi merupakan situasi yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Unocal misalnya, yang sudah beroperasi dari tahun 1970an di daerah Marangkayu, Kutai Kartanegara baru menjalankan kegiatan *community development* pada tahun 2002 setelah masyarakat Marangkayu melakukan protes dengan mengadakan demonstrasi masal. Demonstrasi itu berjalan di sekitar lokasi pengolahan minyak. Kegiatan ini pada akhirnya sulit dikendalikan dan terjadi

konflik fisik yang menyebabkan terjadinya penembakan dengan peluru karet pada salah seorang demonstran oleh aparat keamanan. Akibat dari demonstrasi tersebut dilakukan negosiasi yang memaksa Unocal untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropis dalam program *community development* (PSKK UGM dan UNDP, 2003: 44-45).

Fakta menunjukkan bahwa mereka merealisasi program-program tersebut secara lebih intensif pada tahun-tahun setelah dilakukannya otonomi daerah. Dalam era desentralisasi kekuatan masyarakat lokal menjadi lebih besar. Kebebasan mereka untuk menyalurkan aspirasinya menjadi lebih kuat. Ruang mereka untuk menyuarakan tuntutan mereka pada masalah pencemaran, masalah tenaga kerja, dan masalah tanah pada perusahaan menjadi lebih luas. Kecenderungan ini sangat mungkin menyulut konflik.

Wibisono (2007,78) mengatakan *benefit* dan *drivers* bagi perusahaan yang menerapkan *corporate social responsibility* dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan.

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal non finansial bagi *stakeholders*-nya dan bagi perusahaan menjadi nilai tambah untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

¹ Mulyadi, *Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada Universitys*. 325, November 20, 2003

2. Layak mendapatkan *social license to operate*
Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, pasti dengan sendirinya merasa ikut memiliki perusahaan dan imbalan yang diperoleh perusahaan adalah keleluasaan menjalankan bisnis di wilayah tersebut. Dengan demikian program *corporate social responsibility* diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan menjadi harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Menempuh langkah antisipasi dan preventif melalui penerapan *corporate social responsibility* merupakan upaya investasi yang dapat menurunkan resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya.
Pengelolaan *corporate social responsibility* yang baik merupakan keunggulan perusahaan untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju pasar.
Investasi yang ditanamkan untuk program *corporate social responsibility* menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Banyak bukti resistensi konsumen terhadap produk-produk yang tidak patuh pada regulasi dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.
6. Mereduksi biaya.
Melakukan proses 3-R (*reduce-recycle-recovery*) oleh perusahaan akan mereduksi biaya dan mereduksi buangan ke luar sehingga lebih aman.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
Penerapan program *corporate social responsibility* tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*, dan hal ini menambah kepercayaan terhadap perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
Kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Dengan demikian perusahaan yang menerapkan program *corporate social responsibility* akan membantu / meringankan beban pemerintah tersebut, dan ini tentunya menjadi nilai tambah dari perusahaan.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
Reputasi positif dari *stakeholders* terhadap perusahaan yang melaksanakan program *corporate social responsibility* bisa meningkatkan motivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Banyak penghargaan-penghargaan bagi para pegiat *corporate social responsibility*

2.3.14 Hubungan CSR dengan Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan mulai populer setelah munculnya buku *Silent Spring* karya Rachel Carson tahun 1960-an. Di dalam buku ini untuk pertama kalinya persoalan lingkungan diwacanakan dalam tataran global. Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang kian luas.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara sederhana biasa didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma baru yang masih perlu terus dicari bagaimana operasionalisasinya. Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan (WCED) yang pertama kali menggulirkan pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maka ada empat prinsip dalam mencapai pembangunan yang harus dipenuhi yang meliputi:

1. pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*)
2. memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*)
3. keadilan sosial (*social equity*)
4. kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*)

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya, mempunyai 3 pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu :

1. gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama.
2. gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan.

Jadi dalam paradigma ini tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya yang artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian.

Kebijakan pembangunan adalah diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling terkait dan tidak dapat dipecahkan secara terpisah. Masalah timbul karena sifat dan kemampuan manusia dalam kehidupan tidak sama, sehingga menimbulkan perbedaan diantara setiap anggota masyarakat dalam kegiatan

ekonomi, antara yang telah siap dengan yang belum siap, antara yang memiliki faktor produksi dengan tidak memiliki faktor produksi, antara yang berproduktivitas tinggi dengan berproduktivitas rendah, dan antara anggota masyarakat di satu daerah dengan daerah lain.

Agar tujuan pembangunan tercapai, harus terpenuhi kriteria:

- a. Mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Kriteria ini mengharapkan bahwa setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha sesuai bidang dan kemampuan masing-masing.
- b. Setiap anggota masyarakat harus mendapatkan imbalan sesuai dengan pengorbanannya, yang berarti yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan.
- c. Adanya tenggang rasa di antara anggota masyarakat yang berarti selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam rasa kebersamaan yang saling menguntungkan.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholders*. Menurut Idris (2005), ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;

- 1 ketersediaan dana,
- 2 misi lingkungan,
- 3 tanggung jawab sosial,
- 4 terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),
- 5 mempunyai nilai keuntungan.

Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholders*. Prinsip keberlanjutan ini mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholders* ini diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, yaitu :

1. ketersediaan dana,
2. misi lingkungan,

3. tanggung jawab sosial,
4. terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), dan
5. mempunyai nilai keuntungan.

Menurut Jacobs dan kawan-kawan (1987) dalam Hadi (2003), pembangunan berkelanjutan harus memenuhi minimal 4 (empat) komponen sebagai berikut:

1. pemenuhan kebutuhan dasar:

- a. kebutuhan materi
- b. kebutuhan non-materi

2. pemeliharaan lingkungan:

- a. konservasi
- b. mengurangi konsumsi

3. keadilan sosial:

- a. keadilan masa depan
- b. keadilan masa kini

4. kesempatan menentukan nasib sendiri:

- a. masyarakat mandiri
- b. partisipatori demokrasi

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut akan bisa terwujud jika didukung oleh Pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* dikategorikan baik jika sumber-sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* sebagaimana dirumuskan oleh ICESD (1999) mempersyaratkan lima hal:

1. lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat (*effective representative system*)
2. pengadilan yang mandiri, bersih dan profesional (*judicial independence*)
3. birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki integritas (*reliable and responsive bureaucracy*)
4. masyarakat sipil sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol (*strong and participatory civil society*). Masyarakat yang partisipatif yang dicerminkan dalam bentuk *public pressure* akan membantu penegakan hukum lingkungan.
5. desentralisasi dan lembaga perwakilan yang kuat (*democratic decentralization*)

Memperhatikan kesenjangan yang semakin besar antara korporat (perusahaan) dengan masyarakat sekitarnya muncul berbagai reaksi untuk memperbaiki persoalan kesenjangan. Antara lain program pengentasan kemiskinan, perbaikan kesejahteraan, bantuan subsidi langsung dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya-upaya ini sering tidak membawa hasil atau tidak berkelanjutan. Di satu sisi masyarakat mempertanyakan apakah sektor swasta yang berorientasi pada usaha memaksimalkan

keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan-kegiatan nir-laba sebagai manifestasi tanggung jawab moralnya pada masyarakat lokal yang hidup di sekitar perusahaan. Di pihak lain orang juga bisa berargumentasi bahwa semangat desentralisasi dan *welfare pluralism* (Midgley, 1997: 8; Spicker, 1995: 15-117) memberi legitimasi keterlibatan sektor privat dalam program-program pembangunan. Kedua spirit tersebut memberi ruang yang cukup luas bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menyumbangkan *resources*-nya dalam proses pembangunan. Keduanya merupakan fenomena kekuatan global yang sulit ditolak baik oleh negara-negara maju maupun negara berkembang.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Tentu saja perusahaan swasta harus bekerja sama dengan pihak lain dalam hal ini pemerintah dan masyarakat (termasuk ornop, parta politik dan masyarakat luas).

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. Kalau kita telisik lebih jauh, pelaksanaan CSR merupakan bentuk implementasi dari praktek bisnis yang *sustainable*.

Program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.

Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. Sebagai contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, pengembangan bioenergi. Melalui kegiatan penciptaan Desa Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan *eco-village* di masa mendatang bagi Indonesia.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Menurut Lesmana (2006), program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.

Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. Sebagai contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu: pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Desa Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan *eco-village* di masa mendatang bagi Indonesia.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Di dalam *The Handbook for Corporate Action* yang diterbitkan oleh *International Union for Conservation on Nature (IUCN)*, tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, ikut menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia, masyarakat serta melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit memenuhi tiga bentuk, yaitu :

a. Mewujudkan *good corporate governance*

Sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. S.106/M.PM.P.BUMN/2000 tertanggal 17 April 200 yang didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, entitas bisnis, dan pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

b. Pengembangan masyarakat.

Implementasi pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan kegiatan yang diarahkan secara terencana dan sistemik untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas yang lebih baik.

c. Berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Menurut *World Commission on Environment and Development (WCED)*, pembangunan berkelanjutan mengandung arti pembangunan berwawasan jangka panjang, meliputi antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan.

d. Menjaga hubungan dengan masyarakat.

Upaya membina hubungan dilakukan pada seluruh fase dari kegiatan proyek. Tujuannya selain untuk membina hubungan baik adalah untuk menampung keluhan dan *concern* penduduk lokal sehingga dampak negatif dapat dikurangi.

Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan, terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan.

Kelangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang enggan untuk melaksanakan CSR hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Hal ini disebabkan CSR merupakan salah satu bentuk kegiatan “balas budi” kepada masyarakat atas pengerukan sumber daya alam dan atau dampak gangguan di wilayah mereka. Jika CSR tidak dilakukan, maka ongkos sosial yang dibayar perusahaan sangat mahal yakni berupa penolakan dari masyarakat. Dengan penolakan tersebut, operasionalisasi perusahaan akan terganggu, lama kelamaan merugi dan akhirnya akan gulung tikar. Contohnya kasus Indorayon di Sumatera Utara, PT. Freeport di Timika Papua, PT. Newmont Minahasa Sulawesi Utara, dan kasus terakhir adalah PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur.

Sektor industri dengan bisnis berbasis sumber daya alam (bahan tambang / galian, iklim, kesuburan tanah dan tanaman) dan sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan lingkungan sekitarnya, dimana keberadaan komunitas merupakan *supporting* bagi kelangsungan industri tersebut. Pentingnya *stakeholder* tersebut, mengharuskan manajemen perusahaan memiliki program nyata tentang pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ahli: “tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat. Aktivitas tersebut berupa pengeksploitasian dan pemanfaatan aset sosial masyarakat demi kepentingan bersama” (Bowman dan Haire, 1976).

Dalam era sekarang ini, manajemen perusahaan industri mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk mendorong dan menstimulasi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal disekitarnya. Hal ini adalah bentuk investasi yang memiliki kepentingan krusial, meskipun kecil dibandingkan dengan investasi untuk eksplorasi dengan segala ikutannya. Idealnya, program perusahaan terkait dengan hubungan kemasyarakatan berjalan seiring dengan eksplorasi.

2.3.15 Dasar Hukum Pelaksanaan CSR

Masyarakat khususnya para pengusaha berbeda pendapat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Ada dua pendirian mengenai hal ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sifatnya mandatori (bersifat wajib) dan pendapat lainnya adalah voluntari (bersifat sukarela). Tanggung jawab sendiri adalah konsep yang mandatori, berarti harus dilaksanakan. Menyatakan tanggung jawab sebagai sukarela sebetulnya *contadictio in terminis* atau pertentangan istilah. Namun, kubu voluntari berkeyakinan perusahaan wajib menjalankan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku di mana operasinya dijalankan, dan CSR merupakan kerangka aktivitas yang “*beyond compliance*”. Kalau konsep dan prakteknya diartikan sebagai manajemen dampak, maka yang dilakukan oleh perusahaan di dalam atau yang melampaui ketentuan hukum dapat didefinisikan sebagai CSR.

Mochtar Kusumaatmadja (2002:88) mencatat bahwa hukum sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Dalam konteks perusahaan, hukum berperan penting tidak hanya terhadap pemegang saham (*shareholders*), tapi juga mengatur berbagai pihak (*stakeholders*) dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur.

Beberapa korporasi mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tapi lebih banyak lagi korporasi yang mangkir dari kewajibannya itu. Karena itu perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur konsep dan jenis tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka *law enforcement* dan peningkatan ekonomi lokal dan nasional.

Selama ini CSR memang bersifat sukarela (*voluntarily*), wajar jika penerapannya pun bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya paksa. Tanggungjawab perusahaan yang semula adalah *responsibility* (tanggungjawab non hukum) akan berubah menjadi *liability* (tanggungjawab hukum). Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dapat diberi sanksi. Kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus zaman neo liberalisme.

Dengan mematuhi berbagai peraturan hukum, maka perbedaan korporasi sebagai pencari untung yang sebesar-besarnya, dengan pihak masyarakat, dapat dijembatani secara elegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing.

Dalam sektor pertambangan misalnya, undang-undang tentang minyak dan gas bumi UU No. 22/2001 mengatur realisasi *community development* sebagaimana dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 3f

“menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”

Pasal 11 ayat 3i

“kewajiban pasca operasi pertambangan”

Pasal 11 ayat 3p

“pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”

Pasal 40 ayat 5

“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat “.

Kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan juga diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 15 huruf b :

“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban untuk melaksanakan CSR di perusahaan yang diatur UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini dipertegas oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007. Undang-undang ini menggantikan UU No.1 tahun 1995.

Pasal 74 ayat 1 :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal 74 ayat 2 :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Pasal 74 ayat 3 :

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 74 ayat 4 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penjelasan dari pasal tersebut diantaranya adalah untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kemudian yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk perusahaan / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti halnya PT. Pupuk Kaltim, kewajiban menerapkan CSR diatur tersendiri oleh UU 19/2003 tentang BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN ini disebutkan setiap BUMN wajib menyisihkan 1-3 persen dari laba bersih perusahaan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Undang-undang BUMN ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Hal-hal penting di dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dari Kep. Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 diantaranya berbunyi sebagai berikut :

Bab I Pasal 1:

- 1. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.**
- 2. Unit Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.**
- 3. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program BL.**

Bab III Pasal 1 :

Dana program BL bersumber dari:

- 1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen)**
- 2. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program BL.**

Bab III Pasal 2 :

“Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS”.

Bab III Pasal 10 :

Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk:

- a. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, terdiri dari:
 - 1 Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.
 - 2 Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis.
 - 3 Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara.
- 4 Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari:
 - Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.
 - Bantuan biaya pendidikan/beasiswa.
 - Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah.
 - Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- c. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terdiri dari:
 - Renovasi balai pengobatan masyarakat.
 - Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat, terdiri dari::
 - Rehabilitasi prasarana pendidikan.
 - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.
 - Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.
- e. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, terdiri dari:
 - Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah.
 - Pengadaan perlengkapan ibadah.
 - Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Bab IV Pasal 12 :

Tata cara penyaluran dana Program BL:

- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat.
- b. Pelaksanaan program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Bab IV Pasal 14 :

1. Beban operasional Program Bina Lingkungan dibiayai dari dana Program Bina Lingkungan.
2. Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3% (tiga persen) dari dana Program Bina Lingkungan yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan.

Bab IV Pasal 16 :

”BUMN Pembina dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam keputusan ini”.

Petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Badan Usaha Milik Negara yang paling akhir dan sedang disosialisasikan oleh Kementerian Negara BUMN sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Kewajiban, Tugas Sosial , *Accountable* dan *Corporate Action*. Sedang sumber pendanaan dari kegiatan PKBL adalah untuk Program Kemitraan diambilkan dari max 2% laba bersih dan untuk Program Bina Lingkungan diambilkan dari max 2% laba bersih.

Walaupun sudah banyak undang-undang yang mewajibkan badan usaha / korporat untuk melaksanakan CSR ataupun Pemberdayaan Masyarakat (*comdev*), namun demikian masalahnya adalah selain implementasinya belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program *community development* belum menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum program tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka siap menghadapi masa pasca operasi perusahaan / korporat. Ini artinya bahwa perusahaan belum mampu merealisasi program *community development* dengan baik karena muara dari program *community development* merupakan pemberdayaan masyarakat.

2.3.16 Community Development Sebagai bagian CSR

Saat ini banyak perusahaan swasta mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Corporate Citizenship (CC)*. Berdasarkan sifatnya, pelaksanaan program CSR dapat dibagi dua, yaitu :

- 1 Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CD*);
- 2 Program Pengembangan Hubungan / Relasi dengan publik (*Relations Development/RD*).

Sedangkan *Corporate Citizenship (CC)* adalah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. *Corporate Citizenship* juga menyangkut pada masalah pembangunan sosial (*social development*) dan

dilakukan pada konteks *partnership* dan tata kelola (*governance*). Prinsip ini memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. *Corporate citizenship* ini dilakukan melalui manajemen *internal* yang lebih baik, membantu memberikan bantuan sumberdaya untuk pembangunan sosial dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas ².

² M Badri, Peran Public Relations (PR) dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam www.percikanpikiran-badri.blogspot.com

2.3.7.1 Pengertian *Community Development*

Praktik paling terkenal dari CSR adalah *Community Development* (Comdev), walau keduanya tidaklah dapat disamakan. Comdev didefinisikan sebagai upaya sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung, dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumberdaya yang dapat diaksesnya. Comdev memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997).

Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, Comdev memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Comdev meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah ³.

Alyson Warhurst (2001) berpendapat, hubungan CSR dan masyarakat terwujud dalam empat hal utama, yaitu :

1. kontribusi pada pengembangan masyarakat (Comdev),
2. pengikutsertaan (pemrioritasan) kesempatan kerja dan usaha,
3. pembiayaan sesuai kerangka legal, dan
4. tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.

Pengkategorian Warhurst memperjelas bahwa Comdev merupakan salah satu komponen sangat penting CSR

Hadi (2001:1), di dalam paper *Comparative Analysis of Community Development: Developed and Developing Countries*, *community development* atau pemberdayaan masyarakat, adalah strategi untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mereka dan menemukan sendiri solusinya.

Sebelum mendefinisikan pengertian *community development*, adalah penting untuk mengetahui masing-masing pengertian *community* dan *development*. “*Community*” secara konvensional adalah sekelompok orang yang hidup berdekatan secara geografis. “*Development*” adalah proses untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat dengan peran serta aktif dan mendasarkan inisiatif masyarakat seoptimal mungkin.

³ Makalah Metodologi Pengembangan Masyarakat oleh Dr Edi Suharto, M.Sc. disajikan pada Pelatihan TKSM di Pusdiklat TKSM, Jl. Dewi Sartika No.200 Jakarta, Sabtu 10 Agustus 2002.

Menurut Christenson (1989) *community development* adalah sekelompok orang yang melakukan perubahan sosial untuk merubah ekonomi mereka. Sedangkan menurut Head (1979) *community development* adalah partisipasi langsung oleh masing-masing individu dan kelompok di dalam membuat keputusan.

Hadi (2001:6) menyarankan empat pendekatan untuk memahami pengertian *community development*, yaitu:

1. *Community development* sebagai suatu proses
 2. *Community development* sebagai suatu metode
 3. *Community development* sebagai suatu program
 4. *Community development* sebagai suatu penggerak
1. *Community development* sebagai suatu proses – Tahapan interaksi sosial dan psikologikal yang terjadi pada masyarakat.
Community Development adalah proses perubahan masyarakat dari suatu kondisi atau keadaan tertentu menuju kondisi yang lebih baik. Beberapa orang atau sekelompok masyarakat membuat suatu keputusan perubahan yang berkenaan dengan mereka sendiri untuk menuju kondisi yang lebih makmur. Perubahan dari suatu kondisi kerja sama minimum menuju kondisi kerja sama maksimum. Perubahan dari kondisi dimana semula hanya beberapa orang berpartisipasi menjadi banyak orang berpartisipasi. Perubahan kondisi dimana seluruh sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut datang dari luar lingkungan mereka menuju kondisi dimana masyarakat tersebut mengusahakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka sendiri.
 2. *Community development* sebagai suatu Metode - Upaya untuk mencapai tujuan.
Yaitu upaya/cara kerja yang dilakukan sehingga berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dari Pemerintah seperti perubahan hukum atau peraturan atau upaya masyarakat lokal terhadap perubahan pendidikan merupakan metode *Community Development* yang membawa perubahan yang diinginkan pada suatu proses. Keberhasilan tergantung pada prinsip keadilan yang membawa masyarakat lokal menuju kepada keadaan yang menguntungkan.
 3. *Community development* sebagai suatu Program – Prosedur aktivitas
Community Development adalah sekumpulan prosedur yang mengandung daftar aktivitas *Community Development* yang berkaitan dengan kesehatan, kemakmuran, industri, rekreasi, dan lain-lain.
 4. *Community development* sebagai suatu Penggerak – Komitmen dan dinamika emosi.

Community Development adalah suatu pelopor, yang menggerakkan masyarakat setempat untuk berbuat, turut berpartisipasi. *Community Development* tidak netral seperti halnya *proses*, tapi menggerakkan emosi sehingga masyarakat setempat bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang mereka sendiri.

Pengertian lainnya dari *Community Development* adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan. Dengan demikian *community development* adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk dapat:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada pada masyarakat.
2. Menganalisis keadaan masyarakat, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat tersebut.
3. Memilih alternatif kebijakan.
4. Mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri.

Sumber daya dari luar hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Secara umum *community development* didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *community development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu kapasitas masyarakat dan kesejahteraan. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Menjalankan pendekatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program

pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

2.3.7.2 Tujuan *Community Development*

Bertolak dari mandat konferensi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang telah dilakukan di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002, telah dicanangkan sektor energi dan sumber daya mineral perlu memperhatikan dampak-dampak yang berkenaan dengan pengolahan energi dan sumber daya mineral yang tidak terbarukan. Harus dicari alternatif berkelanjutannya agar masyarakat yang terkena dampak tersebut dapat terus menerus mandiri tanpa bertopang pada sumber daya yang bersangkutan. Di dalam konteks tersebut, maka *community development* adalah salah satu instrumen pendukung yang berfungsi sebagai faktor transformasi menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Wimpy S. Tjetjep (2005), *Community Development* yang dilakukan oleh industri di sektor energi dan sumber daya mineral / pertambangan untuk membangun masyarakat di sekitarnya cukup besar manfaatnya terutama bagi masyarakat di daerah atau wilayah kerja suatu perusahaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui kegiatan industri energi dan sumber daya mineral di Indonesia dan juga di seluruh dunia, hampir dipastikan selalu berada di tengah-tengah masyarakat tradisional yang berbeda ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya dengan masyarakat industri.

Hadi dan Adji (2007:153) mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya mineral harus mampu menciptakan kondisi awal serta kemampuan agar masyarakat dapat melanjutkan pembangunan setelah sumber daya mineral habis dieksploitasi. Proses ini disebut sebagai transformasi sosial melalui pengembangan masyarakat (*community development*) dengan mempersiapkan kemampuan masyarakat lokal pasca operasi perusahaan.

Tujuan utama program *Community Development* menurut Hadi (2001) adalah untuk mengembangkan kemampuan dari suatu masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Program *Community Development* sebenarnya bertujuan untuk:

- a. Mengangkat masyarakat yang miskin akibat tergusur oleh kegiatan proyek, dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.
- b. Merealisasi keadilan distributif
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara nyata

Menurut Cox (1993), tujuan *community development* adalah memberantas kemiskinan, merealisasi keadilan distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Sasaran program *Community Development* adalah meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat khususnya masyarakat miskin / tertinggal. *Community Development* sifatnya fungsional, yaitu mendorong masyarakat menjadi swakarsa.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan maka program *community development* yang dilakukan oleh sektor energi dan sumber daya mineral ditujukan untuk:

1. mempersiapkan *life after mining/operation* (pasca operasi) bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya.
2. bagi industri di sektor energi dan sumber daya mineral *community development* adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporat (*corporate social responsibility*).

Program *Community Development* diharapkan dan selayaknya dapat memberikan hasil akhir berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta peningkatan kelestarian lingkungan. Program *Community Development* harus sesuai dengan latar belakang mereka sendiri. Program *Community Development* yang tidak integrated dan tidak mengakomodasi potensi masyarakat adalah seperti yang terjadi di industri refinery minyak di Pangkalan Brandan, Sanga-sanga, dan juga Sangatta dimana setelah sumber minyak berkurang atau habis menjadi kota mati. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat tergantung pada bantuan kemasyarakatan dari industri. Masyarakat tidak berusaha meningkatkan kemampuan mereka sendiri dan bersikap menunggu program dari industri tersebut.

Manfaat yang didapatkan dari program-program *community development* pada tingkat mikro (korporat dan komuniti) secara tidak langsung juga menunjang program-program pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro. Manfaat tersebut antara lain adalah mengurangi tingkat resiko, membentuk reputasi korporat, membangun modal sosial (kualitas sumber daya manusia), mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya setempat), menambah pendapatan/keuntungan, dan meningkatkan akses ke pasar. Ada tiga alasan penting industri melakukan *community development*, yaitu :

- 1 Untuk mendapatkan izin lokal (izin lokal adalah usaha perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan komuniti lokal dalam kerangka menciptakan harmonisasi kegiatan usaha dengan komuniti lokal).
- 2 Mengatur dan menciptakan strategi ke depan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat,
- 3 Program *community development* mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan (hubungannya dengan *good corporate government*)

Tujuan dari pelaksanaan *Community Development* harus difokuskan, menurut Hadi (2001), dilihat dari aspek geografi, terdiri dari:

1. *Community*

Fokus pelaksanaan adalah untuk membantu masyarakat yang tertinggal. *Community Development* pada awal mulanya dilakukan pada sekelompok masyarakat yang tertinggal. Pelaksanaan program *Community Development* pada sekelompok masyarakat tersebut ada yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau menerapkan program-program yang telah dilakukan pada sekelompok masyarakat di tempat lain, dan pada masyarakat lokal tersebut dapat diterima sesuai kondisi mereka. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat difokuskan pada sumber daya sekelompok masyarakat. Tokoh / pemimpin masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, walaupun masyarakat dapat memanfaatkan keahlian dari orang luar sebagai konsultan yang dapat mempercepat proses *Community Development* .

2. Regional

Fokusnya yang berkaitan dengan masalah yang pada umumnya mempengaruhi masyarakat banyak dan di luar sumber daya masyarakat. Penekanannya adalah pada tersedianya bantuan beberapa orang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, yang dapat membantu pelaksanaan program *Community Development* untuk sementara waktu pada masyarakat lokal.

3. Nasional

Fokus ini adalah pada keinginan bangsa untuk membawa negara lebih maju dalam bidang teknologi.

2.3.7.3 Mitra Kerja Pelaksanaan *Community Development*

Pengertian kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra⁴.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁵

Kemitraan (*partnership*) antara korporasi dengan *stakeholder* menjadi suatu keharusan dalam lingkungan bisnis yang berubah. Pola konvensional "*business as usual*" telah menghasilkan keadaan negatif seperti terdesaknya kepentingan publik (*enlightened common interests*), kelangkaan barang jasa publik, dan pencemaran lingkungan. Demikian pula berbagai dinamika sosial yang muncul seperti reformasi, demokratisasi dan desentralisasi menghasilkan *stakeholders* dan masyarakat yang semakin kiritis.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁵ Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 43.

Mereka berupaya meningkatkan taraf hidupnya serta memposisikan diri sebagai subyek dan mitra yang setara. Dalam hal ini, korporasi perlu menginternalisasi masalah eksternal perusahaan secara terencana sehingga dapat mencegah kekagetan dan krisis yang dapat mengancam keberlangsungan kegiatan dan keberadaan korporasi.

Kemitraan dapat menghasilkan solusi antara argumen yang menekankan *market* atau *profit* (“*the business of business is business*” yang memprioritaskan *shareholders*) dengan argumen moral (atau *Corporate Social Responsibility* atau *CSR* yang memperhatikan *stakeholders*). Dalam hal ini *stakeholders* termasuk lingkungan yang “diam” (“*silent*” *stakeholders*) yaitu flora dan fauna. Dengan kata lain, kemitraan merupakan suatu investasi, bukan *cost* dan dapat menghasilkan *win-win solution* atau sinergi yang menghasilkan keadilan bagi masyarakat dan keamanan berusaha serta keserasian dengan lingkungan⁶.

Kemitraan antara perusahaan dengan *stakeholders* menurut Lead Indonesia (2005) dapat mengarah ke tiga skenario, yaitu :

1. *un-productive*,
2. *semi-productive*, atau
3. *productive*.

1. Kemitraan *un-productive*

Terjadi jika perusahaan masih berpikir dengan pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* atau paradigma “*the business of business is business.*” Dalam skenario ini situasi *low trust* terjadi dan tiada *stakeholders engagement* dimana mereka masih dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan (eksternalitas) tidak diinternalisasikan. Dalam skenario ini kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat negatif dengan *stakeholders negatif* pula seperti oknum aparat atau preman. Berbagai keadaan negatif dapat terjadi misalnya pemogokan atau *slow-down* oleh buruh, boikot oleh konsumen, blokade oleh komunitas, dan pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam dengan sewenang-wenang serta pelanggaran HAM komunitas lokal. Keadaan terburuk yang dapat terjadi adalah terhentinya kegiatan maupun keberadaan perusahaan.

⁶ M Badri, Peran Public Relations (PR) dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam www.percikanpikiran-badri.blogspot.com

2. Kemitraan *semi-produktif*

Bercirikan kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak *stakeholders*. Kerjasama lebih mengandung aspek *charity* atau *Public Relation (PR)* dimana *stakeholders* masih lebih dianggap sebagai obyek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum otentik (*genuine*) dan masih mengedepankan kepentingan diri (*self-interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*common interests*) antara perusahaan dengan *stakeholders*. Dengan kata lain, *shareholders engagement* masih disekitar tahap *low trust*

3. Kemitraan yang *productive*

Menekankan *stakeholders* sebagai subyek dan dalam paradigma *common interest*. Pola ini dapat saja didukung oleh *resource-based partnership* dimana *stakeholders* diberi kesempatan menjadi *shareholders*. Sebagai contoh, karyawan memperoleh saham melalui *Employee Stock Ownership Program (ESOP)*, dan hal ini akan membantu kelancaran produksi. Demikian pula saham untuk komunitas atau pemerintah daerah dapat meningkatkan *community security*. Kasus Exxon di Blok Cepu menjadi menarik di mana Pemda Bojonegoro direncanakan akan memperoleh 10% saham. Keadaan ini menimbulkan *sense of belonging* dan *hightrust* serta hubungan sinergis antara subyek-subyek dalam paradigma *common interests*.

Ketiga skenario di atas dapat digunakan untuk menganalisis keberadaan kemitraan setiap perusahaan dan jelaslah terlihat bahwa *stakeholders* dapat saja lebih berperan mempengaruhi kehidupan perusahaan dibandingkan dengan *shareholders*. Dengan kata lain, dinamika saham (*share*) di bursa saham dapat sangat dipengaruhi oleh dinamika *stakeholders* di lapangan.

Menurut Lead Indonesia (2005), program kemitraan yang sukses atau *productive* dimulai dengan adanya kehendak yang kuat dan tulus dari pimpinan di perusahaan dan kelompok *stakeholders*. Di pihak perusahaan, diperlukan adanya komitmen dari pimpinan perusahaan (CEO) yang berupaya tanpa henti untuk mengubah paradigma konvensional (*self-interest*) ke paradigma baru (*enlightened common interests*). Kemitraan yang sukses dapat pula didorong oleh komisi atau panel independen (Kasus BP di Tangguh, Papua) yang berfungsi sebagai *ombudsman* dan melaporkannya pada pimpinan pusat perusahaan. Selain itu perlu meletakkan posisi unit yang mengatur kemitraan dalam struktur yang cukup penting dalam perusahaan. Demikian pula staf unit CSR harus mempunyai kompetensi, pengalaman dan kecakapan sosial (*social skills*) dan bukanlah “orang buangan” di perusahaan. Mereka harus sensitif pada kebutuhan dan kondisi lokal termasuk menghormati simbol, nilai, situs sakral maupun keberadaan pemuka masyarakat. Mencapai kemitraan yang sukses berarti selalu mempelajari dan mengambil manfaat dari berbagai kasus yang gagal atau sukses (*best practices*) di masa lalu. Selain itu perlu pula sosialisasi pada perusahaan yang masih belum sadar atas pentingnya kemitraan dan CSR.

Keberadaan dan peran perusahaan tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif akan sangat menentukan dalam keberlanjutan hidup perusahaan. Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi pasar melalui pajak, subsidi untuk mendorong penggunaan *renewable resources*, pengembangan *eco-efficiency* serta kebijakan distribusi *resources* yang mengindahkan *equity*. Pemerintah

juga diharapkan untuk berinisiatif membentuk forum *stakeholders* sebagai wadah kemitraan yang disertai kegiatan dan indikator kinerja yang nyata. Seperti juga perusahaan yang dituntut untuk melakukan CSR, pemerintah harus pula memenuhi *political accountability* terhadap warga negara pemberi mandat. Saat ini terdapat pro kontra jika pemerintah daerah kurang berfungsi dan mendorong perusahaan (terutama dalam industri ekstraktif) menjadi *quasi government*. Di satu pihak, hal ini akan menurunkan kewibawaan dan peran pemerintah namun di lain pihak hal ini merupakan upaya pembelajaran dalam pencapaian *good governance*.

Pemerintah (daerah) seharusnya merangkul perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya untuk mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Membangun sekolah, jalan, pasar, atau tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan.. Perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada Negara dan pemerintah bertanggung jawab mengelola dana pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Tumpang-tindih tanggung jawab yang kita buat sendiri malah mengacaukan sistem dan mengaburkan akuntabilitas yang sebenarnya. Jangan sampai kita terus menerus terjebak dan terbolak balik di negara ini dimana kerusakan yang diakibatkan operasi sebuah perusahaan pertambangan malah ditanggung Negara, sementara tanggung jawab negara menyejahterakan rakyat malah dilimpahkan kepada perusahaan.

Masyarakat juga mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Masyarakat diharapkan menjadi aktif dan mengoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik serta dinamisator keberdayaan publik. Dalam hal ini masyarakat harus dapat pula mengatasi anggotanya yang berperilaku negatif (*bad elements of civil society*) dengan pembuatan aturan perilaku (*code of conducts*).

Jika kemitraan ini terjalin baik antara korporasi, pemerintah (daerah) dan masyarakat dapat berhubungan secara simbiosis mutualistik dengan berdasarkan kekeluargaan. Konsep kemitraan dan kekeluargaan tampaknya merugikan korporasi, karena dia harus 'berbaik-baik' dengan masyarakat sekitar, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah sekitar. Tapi jika berpikir secara strategis, konsep ini justru dapat sangat menguntungkan pihak pengembang. Dengan kemitraan dan kekeluargaan, akan tumbuh *trust* (rasa percaya) dari masyarakat sekitar. *Sense of belonging* (rasa memiliki) perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat berpandangan bahwa kehadiran korporasi di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Menjadi logis, ketika kesadaran ini muncul, masyarakat siap untuk memberi kontribusi kegiatan korporasi. Kalau ini menjadi kenyataan, interaksi harmonis korporasi, masyarakat dan pemerintah akan terdengar bagai irama lagu yang menyejukkan jiwa.

2.3.7.4 Fasilitator *Community Development*

Suksesnya pelaksanaan *Community Development* tidak terlepas dari peranan fasilitator. Fasilitator menurut Hadi (2001) di dalam program *community development* terdiri dari:

1. Pemimpin masyarakat lokal

Pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin sehubungan dengan pelaksanaan program *community development*, dan masyarakat percaya atas kemampuannya dan dianggap mampu untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Sifatnya sukarela dan tidak dibayar. Tingkatnya bervariasi dari pemimpin masyarakat lokal hingga orang yang telah mendapatkan pelatihan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Banyak program CD yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang hanya mendapat sedikit bantuan dari pihak luar. Dukungan dari masyarakat lokal adalah respon pada kebutuhan yang jelas bahwa anggota masyarakat mengakui dan bersedia untuk melakukan sesuatu.

2. Penduduk lokal yang memiliki keahlian

Penduduk lokal yang memiliki keahlian memperkenalkan program *CD* seperti peningkatan pendidikan, kesejahteraan sosial, pertanian, kesehatan. Pada umumnya tipe ini harus bekerja dengan membentuk panitia, dimana anggotanya berasal dari masyarakat lokal itu sendiri. Panitia tersebut bertanggung jawab untuk mengatur keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tergantung pada tingkat keahlian dan kemampuan dari pemimpin dan seluruh anggota panitia tersebut untuk bekerja sama.

3. Profesional dari Luar

Seseorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal, pada umumnya seorang profesional yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memperkenalkan program pemberdayaan masyarakat. Tipe fasilitator ini pada umumnya hanya menjadikan kesejahteraan masyarakat bersifat sementara, karena tipe fasilitator ini lebih

memperhatikan kepada yang menugaskannya atau sponsor, tapi kurang atau bahkan tidak untuk kepentingan masyarakat lokal itu sendiri.

4. Pekerja CD Serba Bisa

Seorang ahli *community development* yang diundang atau dikirim ke masyarakat lokal untuk membantu menyelesaikan proyek *community development*, dan pada umumnya tipe fasilitator ini tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibantunya. Kegiatannya untuk memberi pelatihan kepada pemimpin lokal untuk dapat mampu mengerjakan sendiri pekerjaannya didalam masyarakat tersebut.

2.3.7.5 Manfaat *Community Development* Bagi Perusahaan

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep *community development* lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh *trust* (rasa percaya) dari masyarakat. *Sense of belonging* (rasa memiliki) perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Banyak hal positif bagi perusahaan yang bersinergi dengan lembaga sosial/kemanusiaan dalam menjalankan aktivitas *community development*. Manfaat yang bisa diperolehnya diantaranya adalah :

1. perusahaan berkesempatan terlibat dalam konsep, strategi, bahkan bisa mengkolaborasikan aktivitas kepedulian bersama *core business*-nya.
2. strategi keberlanjutan bisnis dikorelasikan dengan keselarasan masyarakat (khususnya *environment*) efektif dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat setempat (*local source*). Mediasi pada *local source*, lebih mudah dilakukan dengan pendekatan sosial kemanusiaan.
3. konsekuensi logis dari sebuah program yang memberi manfaat bagi banyak pihak, adalah hadirnya simpati dari publik. Media memberi perhatian positif.
4. terjadi proses *transfer knowledge* dari perusahaan untuk *management improvement* dalam penyelenggaraan aktivitas sosial kemanusiaan. Profesionalisme sosial membutuhkan kecanggihan manajemen, SDM berkualitas, pengelolaan dana yang baik, kesemuanya terjadi dari interaksi dan saling bagi ilmu. Dalam sinergi ini juga terjadi *transfer value*. Dalam menjalankan *core business*-nya, perusahaan dapat lebih memberi perhatian untuk kemanusiaan, memperkuat orientasi spiritual dan konsisten untuk *concern* dalam aktivitas sosial.

Manfaat yang didapatkan dari program-program *community development* pada tingkat mikro (korporat dan komuniti) secara tidak langsung juga menunjang program-program pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro. Manfaat tersebut antara lain adalah mengurangi tingkat resiko, membentuk reputasi korporat, membangun modal sosial (kualitas sumber daya manusia), mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya setempat), menambah pendapatan/keuntungan, dan meningkatkan akses ke pasar.

Ada tiga alasan penting perusahaan melakukan *community development*, yaitu :

1. Untuk mendapatkan izin lokal (izin lokal adalah usaha perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan komuniti lokal dalam kerangka menciptakan harmonisasi kegiatan usaha dengan komuniti lokal).
2. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat,
3. Program *community development* mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan (hubungannya dengan *good corporate government*).

Untuk melihat sejauh mana efektifitas program *community development*, diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Setidaknya ada dua indikator yang dapat dipergunakan yaitu :

1. Indikator Internal

- a. Ukuran primer (kualitatif)
 - Meminimalkan perselisihan / konflik / potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif.
 - Aset perusahaan yang terdiri dari pemilik / pimpinan perusahaan, karyawan, pabrik dan fasilitas pendukungnya terjaga dengan aman.
 - Seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar.
- b. Ukuran sekunder
 - Tingkat penyaluran dan kolektibilitas dana (pada umumnya pada BUMN melalui PKBL)
 - Tingkat *compliance* pada aturan yang berlaku

2. Indikator Eksternal

- a. Indikator ekonomi
 - penambahan kualitas sarana dan prasarana umum
 - peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis
 - peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan
- b. Indikator Sosial
 - Frekuensi terjadinya gejala / konflik sosial
 - Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat.
 - Tingkat kepuasan masyarakat

Hadi dan Adji (2006) sebagaimana dalam Laporan Kunjungan Kerja ke PT. Freeport Indonesia mengatakan, kegagalan atau kurang-berhasilan program *community development* yang dilaksanakan oleh perusahaan pada umumnya disebabkan oleh :

- a. Proses pelaksanaan program *community development* tidak partisipatif, *stakeholders* tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan

- b. Rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program *community development* yang dilaksanakan. Akibatnya adalah mengakibatkan keberlanjutan (*sustainability*) dari program *community development* yang dilaksanakan tidak terwujud.
- c. Program *community development* yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.
- d. Munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program *community development* sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.
- e. Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
- f. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan (masih adanya *gap feeling*) dalam menyelenggarakan program yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
- g. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program *community development* yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa program *community development* yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.
- h. Program *community development* dalam bentuk uang yang justru menciptakan ketergantungan masyarakat, bahkan menimbulkan perubahan pola hidup dan budaya masyarakat.
- i. Program *community development* dilaksanakan melalui *outsourcing* / lembaga yang dibentuk, tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena hanya sekedar memfasilitasi program *community development*.
- j. Budaya atau kultur dari penerima manfaat program *community development*.

Menurut Wibisono (2007 : 128), kegagalan atau kurang-berhasilan program *community development* yang dilaksanakan oleh perusahaan juga disebabkan oleh :

- 1. Sumber daya manusia di perusahaan yang melaksanakan program *community development* kurang baik kualitasnya, atau bisa orang yang ditempatkan tersebut karena tidak dibutuhkan lagi di tempat lain. Ketrampilan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain, ketrampilan bekerja dalam tim, ketrampilan menulis dan membuat laporan, memotivasi dan membangun antusiasme dan menggerakkan orang, ketrampilan advokasi, riset dan manajemen sangatlah dibutuhkan oleh pegiat *community development*.
- 2. Wilayah cakupan pelaksanaan program *community development* terlalu luas. Pembagian dan prioritas wilayah diperlukan agar pelaksanaan program *community development* lebih fokus pada sasaran. Pembagian wilayah bisa berdasarkan lokasi, dampak, jenis, ukuran, dan dana yang disediakan oleh perusahaan.
- 3. Alokasi dana kurang. Implementasi program *community development* sangat tergantung dari dana yang disediakan oleh perusahaan. Program yang bagus tidak ada artinya bilamana tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.
- 4. Pengelolaan kurang profesional. Dana yang besar sekalipun tidak menjamin program *community development* berhasil apabila pengelolanya tidak baik.

5. Perusahaan tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan program *community development*, tidak ada perencanaan di awal tahun, rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
6. *Community development* sebagai program tidak ditempatkan pada struktur yang strategis, perusahaan hanya menitipkan program ini pada unit kerja yang tidak ada hubungannya secara langsung. Perusahaan yang masuk *fortune 500* menempatkan seorang manajer khusus untuk didedikasikan mengelola *community development* dengan tujuan agar lebih fokus, terarah, dan termonitor dengan efektif.

2.4 Hubungan *Community Development* dengan PROPER

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan salah satu kriteria penilaian PROPER yang terus berevolusi, mulai dari tidak ada (1995), *community relation* (2002) sampai pengembangan masyarakat (2003). Penilaian CD saat ini relatif sederhana dibandingkan dengan penilaian ketentuan wajib. Mengingat KLH tidak memiliki mandat yang khusus mengenai aspek sosial, maka aspek CD ini dinilai untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang telah berupaya lebih dari yang ditetapkan. Kriteria penilaian penerapan CD antara lain adalah adanya komitmen, program penerapan, keterlibatan masyarakat, keberhasilan dan penerimaan masyarakat.

Jika mendefinisikan CSR secara sederhana sebagai CD, maka penerapan CSR oleh perusahaan peserta PROPER tidak akan menjamin tercapainya peringkat EMAS jika tidak didahului oleh pemenuhan persyaratan untuk peringkat BIRU. Penerapan CSR pada perusahaan yang telah memenuhi kriteria BIRU pun harus melakukan penerapan SML (Sistem Manajemen Lingkungan) dan pemanfaatan sumberdaya alam dan limbah untuk memperoleh peringkat EMAS. Dengan catatan, hal ini dapat terjadi jika nilai yang diperoleh memenuhi *passing grade* untuk EMAS.

Secara umum tingkat ketaatan perusahaan dapat dijadikan tolok ukur bagi pencapaian penerapan CSR oleh perusahaan. Pada perusahaan sampai dengan peringkat BIRU maka maksimum akan memperoleh nilai TAAT. Data ketaatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak utama dari kegiatan usaha serta untuk menghitung besarnya dampak. Data serial dapat disusun untuk memperlihatkan trend terhadap upaya CSR yang telah dilakukan.

Pada perusahaan yang berpeluang menuju HIJAU dan EMAS, dapat dilakukan pengukuran kinerja CSR berdasarkan data ketaatan seperti dijelaskan pada alinea di atas dan *environmental financial statement* dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk *end-of-pipe treatment* dan biaya yang dihemat karena penerapan *eco-efficiency* maupun 3R (*Reuse, Recycling, Recovery*).

Saat ini kriteria penilaian kinerja penerapan pengelolaan lingkungan dilakukan secara umum untuk masing-masing warna peringkat dan berlaku umum untuk seluruh sektor kegiatan. Misalnya, perusahaan A mempunyai ketidak-taatan 700% terhadap baku mutu air limbah akan berperingkat sama dengan perusahaan dengan ketidak-taatan 1000%. Ke depan harus dilakukan perbedaan nilai walaupun warna peringkat tetap sama, sehingga pengukuran CSR pada perusahaan tersebut akan lebih adil.

Selanjutnya, kriteria penilaian akan disusun berdasarkan sektornya, sehingga peringkat akan berlaku spesifik karena permasalahan lingkungan pada setiap sektor bersifat spesifik dan tidak dapat dibandingkan antar sektor. Misalnya tingkat kesulitan untuk mencapai peringkat HIJAU akan lebih tinggi pada industri pulp dan kertas daripada industri perakitan elektronik. Penyusunan kriteria spesifik ini juga diperlukan untuk mengatasi kendala sulitnya penerapan pemanfaatan limbah, khususnya limbah B3 pada sektor-sektor industri tertentu.

Untuk penilaian pada tingkat taat (*in compliance*), saat ini tidak ada insentif penilaian terhadap upaya-upaya yang bersifat eco-efficiency, padahal banyak industri kimia yang pada tingkat taat (BIRU) yang melakukan *re-use* maupun daur-ulang terhadap air dari proses produksi. Jika kriteria penilaian telah dilakukan secara spesifik maka akan mudah untuk mengetahui tingkat peneraan secara spesifik. Selanjutnya, kinerja biaya pengeluaran dan penghematan biaya yang diperoleh dari upaya pengelolaan lingkungan dapat dihitung. Data ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja CSR dalam bentuk *Triple Bottom Line Report*.

Pencapaian peringkat PROPER akan mencerminkan tingkat pencapaian target penerapan CSR yang diklaim oleh perusahaan. Jika perusahaan mencapai peringkat HIJAU atau EMAS, maka perusahaan tersebut relatif *socially responsible*.

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.

Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat *beyond compliance*, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju *sustainability* (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya.

Penerapan kegiatan dengan definisi CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti integrasi ke dalam tata cara perusahaan mengoperasikan usahanya.

Mengingat CSR bersifat *intangible*, maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai serta sulit untuk dilakukan *benchmarking*. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* atau *Sustainability Reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, kinerja pengelolaan lingkungan wajib diungkapkan dan disampaikan oleh setiap orang/penanggung-jawab kegiatan. Kecuali AMDAL dan pengendalian pencemaran udara, seluruh informasi kinerja pengelolaan lingkungan tersebut hanya disampaikan kepada instansi lingkungan hidup. Masyarakat yang ingin mengetahuinya harus mencari akses sendiri.

Pada era keterbukaan dengan makin didorongnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan serta peran serta yang lebih besar pada masyarakat untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan, keterbatasan akses untuk menyampaikan dan mencari informasi tersebut menjadi kendala.

Beberapa perusahaan skala besar, terutama yang sudah tercatat di pasar modal serta mempunyai dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan, secara sukarela mengungkapkan kinerja pengelolaan lingkungannya dalam berbagai spektrum, baik melalui pelaporan yang terpisah maupun menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Akan tetapi, jumlah perusahaan yang sudah melakukan pengungkapan informasi pengelolaan lingkungan ini sangat terbatas.

Laporan kinerja pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan kepada instansi lingkungan saat ini hanya berupa laporan penataan (*ComplianceReport*) dengan format dan istilah yang sulit dimengerti oleh orang awam maupun oleh pihak yang berprofesi non lingkungan.

Oleh karena itu, adanya penyampaian informasi kinerja ketaatan pengelolaan lingkungan secara informatif kepada publik sangat diperlukan, sekaligus untuk mengukur efektifitas penerapan CSR pada perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan tentang tipe penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif . Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang mengevaluasi implementasi program *community development* di PT. Pupuk Kaltim dalam rangka memperoleh Proper Hijau setelah pada tahun 2004 dan tahun 2005 memperoleh Proper Biru.

Menurut Suharsimi Arikunto (2003:292), penelitian evaluasi adalah merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan, mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Sedangkan menurut Riduwan (2004), Penelitian Evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.3 Lokasi Penelitian

Setiap tahunnya PT. Pupuk Kaltim mengikuti penilaian Program Peringkat Lingkungan (Proper) dari Kementerian Lingkungan Hidup, salah satu aspeknya adalah pelaksanaan program *community development* terhadap masyarakat di sekitar perusahaan.

Lokasi Penelitian dilakukan di PT. Pupuk Kaltim, Bontang – Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kelurahan Loktuan Kota Bontang.

3.2.4 Aspek yang Diteliti

Mengingat target manajemen PT. Pupuk Kaltim untuk penilaian Program Peringkat Lingkungan (Proper) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2006 adalah Proper Hijau, maka penelitian ini hanya mengkaji tentang pelaksanaan program *community development*.

Aspek yang diteliti meliputi :

1. proses pelaksanaan program *community development*
2. efektifitas *community development* dari perspektif masyarakat
3. kesesuaian pelaksanaan *community development* dengan format Proper

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan data-data primer maupun sekunder. Perolehan data primer dilakukan dengan kuesioner terhadap masyarakat penerima manfaat *community development* sebanyak 30 orang, wawancara terstruktur dan semi terbuka kepada *stakeholders* (tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan Staf KelurahanLoktuan). Wawancara yang dilakukan dengan substansi pertanyaan yang telah disesuaikan dengan teori dan variabel yang akan diukur dan yang akan diambil. Wawancara dijaga dan diusahakan berjalan secara alami sehingga diperoleh jawaban yang obyektif dan tidak dipaksakan. Wawancara merupakan salah satu upaya pencarian data dari responden secara langsung.

Tabel 6. Jumlah dan Jenis Responden

Tipe Data	Responden				
	Masyarakat	Tokoh Masyarakat	LSM	Staf Kelurahan	Staf PKT
Kuesioner	30 orang	5 orang	0	0	0
Wawancara	0	0	3 orang	2 orang	5 orang

Cara ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi, perasaan, motivasi dan persepsi dengan tujuan mengeksplorasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam usaha mencari data, peneliti menjaga hubungan baik dengan masyarakat penerima manfaat program *community development* sebagai responden, sekaligus harus menjaga obyektivitas data. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu bersifat mengarahkan pada aspek tertentu namun dengan sistem terbuka, dimana dengan pertanyaan tersebut responden dapat menjawab secara bebas dan leluasa. Wawancara juga dilakukan dengan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam program *community development* untuk memperoleh hasil sebagai alat *cross check*.

Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan observasi. Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi partisipatif dengan menghilangkan jarak pembatas antara obyek yang diamati dengan subyek (pengamat). Pengamatan mempertimbangkan adanya hubungan antara aspek-aspek yang terkait, baik secara fisik lingkungannya maupun masyarakatnya yang nantinya akan menjadi responden. Dalam observasi ini dicatat hasil pengamatan secara deskriptif dan mendetail mengenai kejadian di lapangan disertai dengan foto.

Data sekunder diperoleh dari Kelurahan Loktuan berupa data kependudukan dan fasilitas umum yang dimiliki, sedangkan data dari Biro Humas PT. Pupuk Kaltim berupa program-program *community development* yang dilaksanakan di Kelurahan Loktuan.

3.4 Teknik Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat, *stakeholders* dan staff PT. Pupuk Kaltim, diolah dan disusun sedemikian rupa dengan mempergunakan teknik analisis kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi sederhana yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan narasi untuk memberikan interpretasi.

Data sekunder yang diperoleh dari Kelurahan Loktuan dan Biro Humas PT. Pupuk Kaltim disusun dengan mempergunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya data dievaluasi secara analitis deskriptif berdasarkan kajian landasan teori melalui pendekatan 7 langkah perencanaan (*the seven magic steps of planning*) dan analisis SWOT.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN WILAYAH *COMMUNITY DEVELOPMENT*

Bab IV ini menguraikan kondisi umum perusahaan, *community development* dalam kebijakan perusahaan, gambaran umum daerah pelaksanaan *community development*

4.4 **Kondisi Umum Perusahaan**

Pabrik PT. Pupuk Kaltim. berlokasi di wilayah kota Bontang ± 122 Km sebelah utara Samarinda ibukota Propinsi Kalimantan Timur, terletak pada 0-10'-46.9 Lintang Utara dan 117-29'-30.6 Bujur Timur, menempati areal seluas 493 ha.

PT. Pupuk Kaltim merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didirikan pada tanggal 7 Desember 1977 dengan tujuan utama melaksanakan serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengembangan industri dan ekonomi nasional khususnya sektor industri pupuk dan kimia. Pada awalnya PT. Pupuk Kaltim diberi tugas untuk meneruskan pembangunan pabrik amoniak dan urea yang semula akan dibangun oleh Pertamina dengan konsep semula berada diatas dua kapal terapung yang digandengkan jadi satu dengan *offsite facilities*. Setelah meninjau dan menilai kembali studi pembangunan pabrik terapung ini yang akan mengalami kendala operasional maka diputuskan proyek ini dilanjutkan sebagai pabrik di darat yang kemudian disebut sebagai pabrik Kaltim-1.

Pabrik Kaltim-1 adalah pabrik amoniak dengan kapasitas produksi 1.500 ton sehari dan sebanyak 1.000 ton dipergunakan untuk bahan baku pabrik urea yang mempunyai kapasitas produksi 1.700 ton per hari. Pabrik urea dibangun dengan proses "Stamicarbon" dan amoniak dengan proses "Lurgi". Mulai tahun 1995 pabrik Kaltim-1 ditingkatkan kapasitasnya menjadi 1.800 ton per hari untuk amoniak dan 2.250 ton urea per hari termasuk 500 ton urea *melt* per hari yang disiapkan untuk pabrik melamin.

Bahan baku yang dipakai adalah gas bumi dan udara serta uap air yang bahan bakunya mempergunakan air laut setelah dilakukan demineralisasi. Gas bumi diperoleh dari ladang-ladang pengeboran di Attaka dan Handil yang dialirkan dengan menggunakan kompresor di Tanjung Santan dan melalui pipa di bawah tanah sepanjang 56 km ke PT. Pupuk Kaltim di Bontang.

Guna memenuhi kebutuhan penyediaan pupuk nasional, pada tahun 1982 dibangun pabrik Kaltim-2 dengan kapasitas produksi 1.500 ton amoniak per hari dan 1.725 ton urea perhari. Proses yang digunakan adalah “Kellog *semi low enegy process*” untuk pabrik amoniaknya, dan “Stamicarbon *stripping process*” untuk pabrik ureanya. Dalam rangka pengembangan perusahaan karena didukung oleh tersedianya bahan baku gas bumi yang cukup melimpah di Kalimantan Timur, pada tahun 1985 dibangun lagi pabrik Kaltim-3 dengan kapasitas 1.000 ton amoniak perhari dan 1.725 ton urea per hari dengan proses “Topsoe” untuk pabrik amoniak dan proses “Stamicarbon” juga untuk pabrik ureanya. Menyusul dibangun pula pabrik Kaltim-3, Kaltim-4, dan beberapa pabrik usaha patungan produksi amoniak, melamin, methanol dan lainnya.

PT. Pupuk Kaltim dalam upaya mengendalikan mutu produksi dan pengelolaan Keselamatan & Kesehatan Kerja serta Lingkungan telah berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9002 (mutu), bendera emas SMK3 (K3), dan sertifikat ISO 14001 (lingkungan) selama 6 tahun.

Di dalam kawasan kompleks industri PT. Pupuk Kaltim terdapat juga usaha patungan PT. Pupuk Kaltim dengan pihak ketiga (JVC) PT. Kaltim Daya Mandiri, pembangkit tenaga listrik dan PT. Kaltim Pasific Ammonia, sebuah pabrik ammonia. Pengelolaan limbahnya dikelola sendiri oleh perusahaan tersebut.

Sebagaimana perusahaan yang siap untuk berkembang, PT. Pupuk Kaltim mempunyai *visi, menjadikan perusahaan kelas dunia di bidang industri pupuk dan kimia*. Sedang *misinya* PT. Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan pupuk, khususnya untuk dalam negeri dalam rangka menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional.
2. Memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemegang saham maupun stake holder lainnya
3. Peduli pada masyarakat lingkungan (*community development*).

Tabel 7. Data Teknis PT. Pupuk Kaltim

PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR BONTANG - INDONESIA								
No.	Data Teknis		Kaltim-1	Kaltim-2	Kaltim-3	POPKA	Kaltim-4	Total
1.	Produksi:	- Ammonia (MTPD) (MTPY) - Urea (MTPD) (MTPY)	1,800 595,000 2,125 700,000	1,800 595,000 1,725 570,000	1,000 330,000 1,725 570,000	1,725 570,000	1,000 330,000 1,725 570,000	5,600 1,850,000 9,025 2,980,000
2.	Teknologi:	- Ammonia - Urea	Lurgi Stamcarbon	M.W. Kellog Stamcarbon	Haldor Topsøe Stamcarbon	Snamprogetti	Haldor Topsøe Snamprogetti	
3.	Power Generation	- Gas Turbine (MW) - 11 KV - Steam Turbine (MW) - 6.6 KV	- 27.2	30 -	30 -			60 27.2
4.	Steam Generation	- Steam 80 kg/cm ² (TPH) - Steam 40 kg/cm ² (TPH)	130 160	240	140			510 160
5.	Desalination	- Water (TPH)	270	210	140	70	140	830
6.	Storage	- Ammonia (TON) - Urea Bulk (TON)	26,000 40,000	26,000 30,000		45,000	40,000	52,000 155,000
7.	Natural Gas	MVSCFD (rate 100%)	80	75	43		37	
8.	Air Separation Unit	Nitrogen NM ³ /Hr Oxygen NM ³ /Hr	200 500		300 500			500 1,000

Sumber: Biro Humas PT. Pupuk Kalimantan Timur

Visi dan misi PT. Pupuk Kaltim tersebut harus sepenuhnya didukung oleh kebijakan lingkungan yang berorientasi pada kepatuhan dan pentaatan terhadap regulasi internasional dan juga standar-standar serta peraturan nasional yang berlaku, karena bila tidak memenuhinya maka visi dan misi tersebut tidak akan terwujud secara nyata karena akan mengalami hambatan yang serius.

4.5 *Community Development* dalam Kebijakan Perusahaan

PT. Pupuk Kaltim merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di samping mendapat tugas pemerintah selaku pemegang sahamnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, PT. Pupuk Kaltim juga mendapat tugas dari pemerintah sebagai agen pembangunan. Untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut, PT. Pupuk Kaltim mempunyai **Visi** "menjadikan perusahaan kelas dunia di bidang industri pupuk dan kimia."

Misi PT. Pupuk Kaltim didalamnya terdapat komitmen perusahaan untuk melaksanakan program *community developmen* sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan pupuk, khususnya untuk dalam negeri dalam rangka menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional.
2. Memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemegang saham mapun stake holder lainnya

3. Peduli pada masyarakat lingkungan (*community development*).

4.3 Gambaran Umum Daerah Pelaksanaan *Community Development*

Lokasi penelitian pelaksanaan *community development* dititik beratkan pada Kelurahan Loktuan, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan PT. Pupuk Kaltim, termasuk zona-1 yang langsung terkena dampak dari beroperasinya perusahaan PT. Pupuk Kaltim.

Kelurahan Loktuan termasuk dalam wilayah Kecamatan Bontang Utara, mempunyai luas 358 Ha (2,42% dari luas Kota Bontang). Jumlah penduduk 16.116 jiwa terdiri dari 3.872 Kepala Keluarga (KK), 8.919 penduduk laki-laki dan 7.197 penduduk perempuan, serta jumlah Rukun Tetangga (RT) 46 buah.

Kelurahan Loktuan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur, Kelurahan Guntung di sebelah utara, Kelurahan Gunung Elai di sebelah selatan, dan dengan Kelurahan Belimbing di sebelah barat. Kelurahan Loktuan awal perkembangannya dimulai pada saat beroperasinya sebuah perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) PT. Kayumas di sekitar Bontang pada tahun 1970 – 1987. (Bontang saat itu masih berstatus Kecamatan Bontang – Kabupaten Kutai). Untuk memudahkan mobilisasi kayu hasil tebangannya, PT. Kayumas membuat jalan dari lokasi penebangan kayu di hutan sampai pelabuhan alam di Loktuan . Jalan yang dibuat oleh PT. Kayumas tersebut sampai saat ini masyarakat lebih senang menyebutnya sebagai jalan Kayumas daripada nama jalan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bontang, jalan RE. Martadinata.



Gambar 4. Lokasi Kelurahan Loktuan

Dengan adanya kegiatan perusahaan tersebut, berkembang pula pemukiman penduduk, pasar tradisional sebagai sarana tempat jual-beli kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, dan tempat-tempat hiburan termasuk di dalamnya lokalisasi (tempat prostitusi) di sekitar pasar. Pemukiman penduduk yang berada di pinggiran pantai dan di atas laut, ditempati oleh suku Bugis, Mandar, Mamuju, dan Makassar sebagai suku bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan laut. Pemukiman penduduk yang berada di atas laut saat ini dikenal dengan sebutan Kampung Selambai. Sedangkan pemukiman yang di darat, lebih banyak ditinggali suku Jawa, Toraja, Flores, dan Batak.

Penduduk asli Loktuan boleh dikatakan tidak ada. Yang disebut asli Loktuan saat ini adalah mereka yang telah ada sekitar tahun 1960an, mereka berasal dari Sulawesi Selatan yang mengungsi pada saat ada kerusuhan Kahar Muzakar. Mereka rata-rata berprofesi sebagai nelayan, dan petani. Dengan adanya kegiatan proyek pembangunan PT. Pupuk Kaltim tahun 1976, banyak dari mereka yang bergabung dalam kegiatan proyek baik secara langsung sebagai tukang las, tukang kayu, mekanik maupun secara tidak langsung sebagai tenaga ojek, tukang pijat, penjual makanan, dan lain-lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka, mulai tahun 1977 PT. Pupuk Kaltim mengadakan pelatihan sesuai dengan ketrampilan dan minat mereka. Pada saat proyek berlangsung, mereka ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap di PT. Pupuk Kaltim, namun banyak yang menolaknya dan lebih senang bekerja di kontraktor dikarenakan gaji kontraktor jauh lebih besar daripada gaji yang dibayarkan oleh PT. Pupuk Kaltim.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemukiman penduduk yang berada di sekitar pantai atau di atas laut bangunannya semi permanen terbuat dari kayu. Sedangkan rumah penduduk yang berada di darat sebagian besar permanen, terbuat dari batu. Masyarakat Loktuan membuang sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Akan tetapi yang berada di Kampung Selambai membuang sampah rumah tangga termasuk mandi-cuci-kakus ke laut dikarenakan tidak tersedianya fasilitas pembuangan sampah atau sanitasi. Dengan demikian kondisi perairan Loktuan pada saat air surut sangat kotor, penuh dengan plastik, kertas-kertas, dan berbagai macam sampah lainnya.

Dari uraian di atas dan dengan adanya kegiatan pembangunan PT. Pupuk Kaltim, anak perusahaannya dan *Joint Venture Company* di sekitar Loktuan, maka di tahun-tahun mendatang mungkin saja kawasan Loktuan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Masalah tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung karena akan menambah parahnya kondisi lingkungan di Loktuan seperti :

- a. masalah estetika dan visual lainnya
- b. masalah kurangnya ruang terbuka hijau / taman
- c. masalah ketidak terpaduan penyediaan utilitas dan fasilitas umum
- d. masalah daya dukung lingkungan

Dengan adanya program *community development* dari PT. Pupuk Kaltim, masyarakat Loktuan sebagian besar mengatakan bahwa Loktuan sekarang semakin aman dan nyaman untuk tempat tinggal. Fasilitas umum relatif lengkap, ada pasar tradisional yang cukup besar, rapi, dan bersih yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak sekolah	2204
2	Taman Kanak Kanak	896
3	Sekolah Dasar	3826
4	SMP / SLTP	3387
5	SMU / SMTA	5062
6	Program Diploma 1 / 2 / 3	471
7	Sarjana S-1	268
8	Sarjana S-2	2
	Total	16.116

4.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dan sebagai sarana mutlak untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan serta merupakan prasyarat didalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan amanat yang diemban negara seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan mutlak sebagai prioritas pembangunan.

Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga Perguruan Tinggi. Melalui proses pendidikan diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menunjukkan ketersediaan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk yang menamatkan sekolah tinggi, maka semakin baik pula ketersediaan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2006 jumlah penduduk yang berhasil menamatkan tingkat pendidikan SD sampai SLTA mengalami peningkatan dari tahun 2005, sedangkan penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya migrasi yang kebanyakan datang dengan bekal ijazah tamatan SLTA atau tingkat pendidikan dibawahnya.

Penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formalnya atau putus sekolah, merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Salahsatu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah besarnya persentase penduduk yang mampu membaca/menulis huruf latin.

Untuk pendidikan dasar 6 tahun, di Loktuan terdapat 5 SD Negeri. Karena dirasa masih kurang mencukupi untuk bisa menampung anak-anak usia sekolah, peran aktif pihak swasta di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Loktuan dapat dilihat dengan adanya SD Swasta sebanyak 3 buah dan SMP / MTS Swasta sebanyak 3 buah.

Sumber daya manusia masyarakat Loktuan bisa diketahui berdasarkan pendidikan yang dicapai penduduk perempuan dan laki-laki ditunjukkan dalam tabel 8

Tabel 8. Penduduk Menurut Pendidikan

Dari tabel tersebut bisa diketahui bahwa penduduk yang tidak sekolah 2.204 orang, dan hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Loktuan akan pentingnya pendidikan. Kebanyakan dari mereka yang tidak sekolah berada di Kampung Selambai.

Mereka terpaksa putus sekolah untuk bisa membantu pekerjaan orangtuanya sebagai nelayan. Untuk tamatan perguruan tinggi (program diploma dan strata-1 maupun strata-2) terlihat cukup banyak, yaitu 741 orang. Bilamana hal ini tidak ditangani dengan baik, dikawatirkan di kemudian hari menjadi pemicu konflik sosial akibat kalah bersaing dengan orang luar yang bisa bekerja di sekitar Loktuan.

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat terdapat 3.826 orang masyarakat Loktuan yang berpendidikan SD. Rendahnya kesadaran mendapatkan pendidikan ini disebabkan dengan pendidikan SD saja mereka bisa bekerja sebagai buruh bongkar muat kapal yang berlabuh di pelabuhan khusus PT. Pupuk Kaltim maupun pelabuhan Loktuan.

4.3.2 Mata Pencaharian

Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi dalam hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan penghargaan akan kemampuan seseorang. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah pantas jika setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Gambaran ketenagakerjaan dapat menjadi petunjuk kinerja ekonomi suatu wilayah. Tingkat pengangguran atau pencari kerja yang relatif tinggi menggambarkan terjadinya ketidak seimbangan dalam pasar kerja. Dari sisi sosial dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yang memperbesar jumlah angkatan kerja dan migrasi penduduk khususnya dari P. Sulawesi. Semakin bertambahnya penduduk usia kerja, akan berpengaruh pada penambahan jumlah angkatan kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja.

Penduduk Kelurahan Loktuan laki-laki sebagian besar bekerja di sektor Industri dan perikanan (nelayan), sedangkan yang perempuan sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Dari tabel tersebut, tampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh

swasta sangat dominan, yaitu sebanyak 3.700 orang. Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengatakan pekerjaannya adalah swasta. Mereka yang termasuk di dalam kelompok ini adalah tenaga bongkar muat kapal, sopir, tukang ojek. Untuk penduduk yang bekerja sebagai petani melakukan kegiatannya di luar Loktuan.

Tabel 9. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri	134
2	TNI / POLRI	72
3	Karyawan Swasta / BUMN	1498
4	Wiraswasta	1230
5	Tani	315
6	Buruh Swasta	3700
7	Nelayan	894
8	Jasa Pertukangan	30
	Total	7830

4.3.3 P

erekonomian

Perekonomian Kelurahan Loktuan sangat dipengaruhi oleh keberadaan PT. Pupuk Kaltim dan *joint venture company* yang berada di Kawasan Industri PT. KIE dengan adanya kebutuhan makan siang karyawan non staf, dan makan karyawan shift pada sore dan malam hari yang mencapai 1.000 orang lebih. Hal ini bisa dimaklumi karena yang berbatasan langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut adalah Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Guntung, dan karyawan perusahaan beserta keluarganya lebih senang berbelanja ke Loktuan karena lebih banyak pilihan dan ragamnya.

Keberadaan pelabuhan alam yang disinggahi kapal – kapal barang antar pulau serta kegiatan nelayan ikan di perkampungan nelayan Selambai juga mempengaruhi perekonomian Loktuan.. Kegiatan perekonomian masyarakat

Loktuan utamanya dari perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sayur-mayur, ikan dan daging dengan pusatnya di pasar Citramas.

Kegiatan sektor informal yang cukup banyak perannya di dalam menggerakkan perekonomian Loktuan adalah keberadaan lebih dari 50 warung makan, lebih dari 100 toko / warung sembako yang berada di sepanjang jalan raya, kios *voucher* isi ulang pulsa telepon genggam, depo air minum isi ulang, apotik / toko obat, poliklinik, rumah sewa, jasa angkutan, jasa persewaan peralatan musik, dan lain-lainnya.

4.3.4 Potensi Alam, Sosial dan Budaya

Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Loktuan meliputi potensi alam dan budaya, serta potensi sosial kemasyarakatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Potensi-potensi tersebut diantaranya adalah :

1. potensi alam

- pelabuhan alam (sedang dikembangkan menjadi pelabuhan yang bisa disinggahi kapal-kapal umum Peln)
- pandangan indah khususnya di malam hari ke arah pabrik PT. Pupuk Kaltim dan *joint venture company*.
- perkampungan di atas laut (Kampung Selambai)
- pulau-pulau kecil dengan hutan bakau yang terjaga

2. potensi sosial kemasyarakatan

- pesta laut setahun sekali
- organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang berjalan dengan baik (Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

4.3.5 Fasilitas Umum Tersedia

Fasilitas umum yang tersedia di Kelurahan Loktuan pada umumnya dibuat atas swadaya masyarakat dengan bantuan dana pembangunan / perbaikan dari PT. Pupuk Kaltim dan APBD Kota Bontang. Namun ada pula yang berasal dari bantuan PT. Pupuk Kaltim dan proyek pemerintah. Fasilitas umum yang dibuat oleh PT. Pupuk Kaltim di antaranya adalah gereja Immanuel (2 buah untuk Kristen dan

Katholik), Pasar, Sekolah Dasar (1 buah), lapangan golf, dan lapangan basket. Sedangkan yang dibuat melalui proyek pemerintah adalah pelabuhan laut dan sekolah dasar (4 buah).

Data-data fasilitas umum yang tersedia di Loktuan sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10. Fasilitas Umum Yang Tersedia

No.	Nama Fasilitas Umum	Jumlah (unit)
1	Masjid	11
2	Musholla	6
3	Gereja	5
4	Balai Pelayanan Masyarakat	1
5	Apotik / Depot Obat	10
6	SD & SMP / MTs	11
7	Pasar	1
8	Pelabuhan Laut	1
9	Lapangan Sepakbola	1
10	Lapangangan Bola Voli	6
11	Lapangangan Bola Basket	1
12	Lapangan Golf	1

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab V ini, terlebih dahulu diuraikan jenis-jenis kegiatan *community development* yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim. Kemudian disajikan analisa hasil penelitian dan pembahasan kuesioner pelaksanaan pembinaan wilayah dan *community development* yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim sebagaimana standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Disini bisa dilihat persepsi *stakeholders* yaitu masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang terhadap pelaksanaan program *community development* oleh PT. Pupuk Kaltim.

Analisa SWOT disajikan untuk identifikasi dan analisis terhadap Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh PT. Pupuk Kaltim untuk menetapkan kebijakan apa yang akan diambil agar tujuan dari pelaksanaan *community development* tersebut tercapai dan sesuai harapan masyarakat.

Strategi digunakan dalam menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan program *community development* untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta dalam rangka menanggulangi kendala/kelemahan dan mengatasi tantangan/ancaman.

Untuk memperoleh penghargaan Program Peringkat Lingkungan (PROPER) Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, aspek-aspek Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang dinilai meliputi :

- a Perusahaan mempunyai organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan dan partisipasi masyarakat,
- b Perusahaan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan disekitar lokasi kegiatan perusahaan,
- c Perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan,
- d Perusahaan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung.

5.1 Bentuk – Bentuk *Community Development* Versi PT. Pupuk Kaltim

Program *Community Development* versi PT. Pupuk Kaltim yang dilaksanakan terdiri dari beberapa program, antara lain :

- A. Program Kemitraan
- B. Bina Lingkungan
- C. Pembinaan Wilayah
- D. Program *Community Development* Tak Langsung

A. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program penyaluran bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah dengan kredit lunak, pelatihan manajerial, pemasaran serta pelatihan teknis produksi dan lain sebagainya. Sumber dana Program Kemitraan berasal dari 1-3% keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak sebagaimana diatur oleh SK Meneg BUMN No. KEP-236/MBU/2003

B. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah salah satu jenis kegiatan *Community Development* yang meliputi bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana umum, sarana peribadatan, serta olahraga dan seni. Seperti juga Program Kemitraan, dana Bina Lingkungan diperoleh dari 1% laba perusahaan setelah dipotong pajak dan pelaksanaannya diatur oleh SK Meneg BUMN. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dari Kep. Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003, disebutkan bahwa dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk;

1. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, terdiri dari:

- a Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.**
- b Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis.**
- c Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara.**
- d Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.**

2. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari:

- a **Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.**
 - b **Bantuan biaya pendidikan/beasiswa.**
 - c **Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah.**
 - d **Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.**
3. **Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terdiri dari:**
- a **Renovasi balai pengobatan masyarakat.**
 - b **Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.**
4. **Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat, terdiri dari::**
- a **Rehabilitasi prasarana pendidikan.**
 - b **Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum.**
 - c **Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.**
5. **Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat, terdiri dari:**
- a **Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah.**
 - b **Pengadaan perlengkapan ibadah.**
 - c **Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan**

C. Program Pembinaan Wilayah

Program Pembinaan Wilayah (Binwil) adalah salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan. Tidak seperti dana PKBL, dana Binwil berasal dari dana operasional perusahaan sendiri dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Misi utama Program Binwil adalah untuk mendorong pengembangan wilayah, dengan fokus pembinaan meliputi bidang sosial, keagamaan, pendidikan serta bidang kesehatan masyarakat.

D. Program *Community Development* Tak Langsung

Selain melalui program PKBL dan Binwil, perusahaan juga memiliki beberapa kegiatan, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang merupakan swadaya karyawan sendiri. Kegiatan tersebut secara tak langsung juga turut membantu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan. Beberapa diantaranya adalah *Marching Band* Bontang-PKT, Diklat Mandau dan

kegiatan olahraga profesional dan amatir, seni dan tari serta yayasan-yayasan di lingkungan PT. Pupuk Kaltim.

1. Kegiatan Pengembangan Olahraga

Pengembangan olahraga profesional maupun amatir yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim antara lain pembinaan bola voli, tenis meja, tenis lapangan, renang, soft ball, catur, bridge, golf, dan lain-lainnya.



Gambar 5. PS Bontang PKT

Sedangkan untuk sepakbola, PS Bontang PKT didirikan tanggal 18 Juni 1988. Saat itu kompetisi yang berjalan masih menggunakan Kompetisi Galatama. Nama PS Pupuk Kaltim sering disebut dengan nama PS PKT Galatama. Bahkan bagi warga Bontang, karyawan Pupuk Kaltim terutama, menyebut tim PS PKT sering dengan hanya "Galatama" saja. Memasuki Kompetisi Liga Bank

Mandiri ke 8 tahun 2002 sampai dengan sekarang PS PKT berubah nama menjadi "PS Bontang PKT".

2. Kegiatan Seni dan Budaya

Sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan seni dan budaya, khususnya budaya tradisional, PKT secara rutin menyelenggarakan kegiatan seni di Kota Bontang dan Kalimantan Timur. Antara lain adalah pagelaran Wayang Kulit, pentas seni tari, ketoprak, fashion show dan juga peminjaman fasilitas Gedung Koperasi untuk berbagai kegiatan seni.

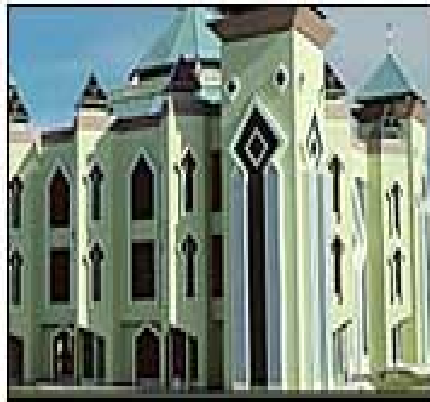


Gambar 6. Marching Band

Marching Band Bontang-PKT (MB-Bontang PKT) merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan seni. MB Bontang PKT melibatkan generasi muda Bontang untuk mengembangkan potensi mereka khususnya dibidang seni. Anggota MB ini, bukan hanya terdiri dari karyawan dan keluarganya, tapi mayoritas bahkan adalah masyarakat dan generasi muda Kota Bontang di luar keluarga besar PKT. MB-PKT juga turut membawa nama harum Kota Bontang lewat

prestasinya menjuarai Grand Prix Marching Band Nasional hingga 9 (sembilan) kali berturut-turut.

3. Yayasan Baiturrahman



Gambar 7. Masjid Karyawan

Yayasan ini mengumpulkan dana dari karyawan PKT melalui zakat yang dikelola oleh Baitul Maal dan kemudian menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk penyaluran pun tidak hanya terbatas pada zakat fitrah atau sedekah tapi juga bantuan beasiswa, bantuan bencana alam, hingga bantuan permodalan untuk usaha kecil. Tahun 1995 Yayasan Baiturrahman mendirikan BMT (Baitul Mal wat Tanwil), sebuah lembaga keuangan non perbankan yang menyalurkan pengembangan dana untuk kegiatan perekonomian sektor informal

4. Yayasan Pupuk Kaltim (YPK)

Yayasan ini bergerak dibidang pendidikan, antara lain mengembangkan program Maju Bersama YPK. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar dan kualitas pendidikan di Bontang khususnya. Hasil kongkrit dari program ini adalah peningkatan rata-rata nilai NEM dari siswa-siswa lulusan SD di Bontang yang mengikuti program ini. Kegiatan YPK lainnya yang melibatkan masyarakat luas, antara lain seperti penyelenggaraan Try Out untuk siswa SMP dan SMU se-Bontang, Penyelenggaraan ESQ gratis untuk siswa sekolah, kegiatan olahraga seperti Kejuaraan Atletik se-Kaltim dan Kejuaraan Bola Basket antar pelajar se-Bontang, Takmir Mesjid dan lain sebagainya. Disamping itu juga dilakukan pelatihan kurikulum untuk guru-guru se-Bontang dan pengenalan universitas negeri (Unair, ITB, ITS, Unpad, Undip, UGM) untuk siswa SMU dan guru-guru se-Bontang untuk menumbuhkan minat siswa.

5. Yayasan Rumah Sakit

Yayasan Rumah Sakit Pupuk Kaltim juga mempunyai program untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Bontang, antara lain melalui bantuan keringanan biaya berobat. Nilai bantuan tersebut rata-rata adalah Rp. 150 juta per tahun.

6. Publik Katulistiwa TV



Gambar 8. Studio PKTV

PKTV (Publik Katulistiwa TV), stasiun TV Publik lokal milik bersama Yayasan Baiturrahman, Yayasan Pupuk Kaltim dan Yayasan Bina Insan Mandiri didirikan tahun 1998, siaran setiap hari mulai jam 18.00 – 22.00 untuk menyiarkan berita sehari-hari Kota Bontang dan program-program acara pengembangan masyarakat. Studionya terletak di kompleks Gedung Sarana Pertemuan (GOR) PT. Pupuk Kaltim

7. Program Pemberdayaan Pengusaha Lokal

Di luar program tersebut, perusahaan juga senantiasa berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat Bontang. Salah satunya adalah dengan selalu mendahulukan vendor atau pengusaha lokal Bontang dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan konstruksi di PKT.

5.2 Program Bina Lingkungan di Loktuan

Mengingat cakupan dari program *Community Development* versi PT. Pupuk Kaltim yang dilaksanakan sedemikian luas, maka di dalam tesis ini dibatasi hanya membahas pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dilaksanakan di Kelurahan Loktuan. Alasannya adalah Kelurahan Loktuan merupakan wilayah paling dekat dengan PT. Pupuk Kaltim (termasuk zona-1 *buffer zone*) yang terkena dampak langsung dengan beroperasinya PT. Pupuk Kaltim. Kelurahan Loktuan merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak dan tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi di Kota Bontang.

PT. Pupuk Kaltim sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapat tugas melaksanakan peran sosial sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tertanggal 17 Juni 2003. Pada prinsipnya mengikat BUMN untuk menyelenggarakan program kemitraan dan pembinaan lingkungan. Dalam Bab-I tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa :

1. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
2. Unit Program Bina Lingkungan adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina, serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.

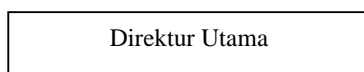
Program Bina Lingkungan yang merupakan bagian program *community development* yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan diantaranya adalah pembuatan pasar tradisional, pembuatan gereja Kristen dan gereja Katholik (gereja Immanuel), pembuatan sumur dalam, pembuatan rumah baca, pembangunan kembali gedung sekolah SD Negeri 009 yang terbakar, perbaikan jalan raya RE. Martadinata, dan lain-lainnya. Kemudian bantuan yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Baiturrahman melalui Baitul Maal kepada masyarakat Loktuan, dan pembinaan anak asuh.

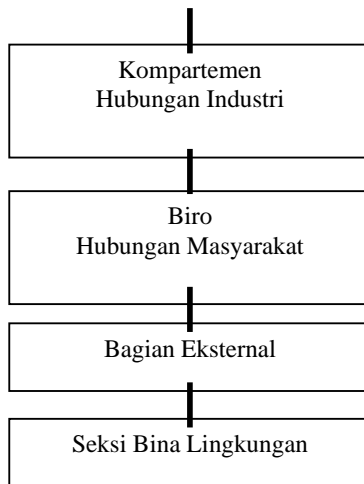
5.2.1 Unit Kerja Penyelenggara

Program Bina Lingkungan di PT. Pupuk Kaltim dilakukan di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat (Humas). Pelaksanaan program Bina Lingkungan untuk membantu pengembangan masyarakat Kota Bontang dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan program Bina Lingkungan adalah untuk meningkatkan kepedulian PT. Pupuk Kaltim terhadap pembinaan lingkungan terutama di sekitar lokasi pabrik. Program Bina Lingkungan seluruhnya berbentuk hibah, di mana wujud nyatanya adalah bantuan biaya. Dana untuk keperluan program Bina Lingkungan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003, nilainya maksimal sebesar 1% (satu persen) dari laba setelah pajak.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kaltim No. 021/DIR/IX.1996 tanggal 24 September 1996, dibentuk suatu unit kerja khusus dan kemudian disempurnakan dengan SK Direksi No. 87/DIR/XII.2005 tanggal 16 Desember 2005 dengan struktur organisasi sebagaimana di bawah.

Tabel 11. Struktur Organisasi Pelaksana Program Bina Lingkungan





5.2.2 Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan Staf Kelurahan Loktuan dapat disimpulkan bahwa peranan dan partisipasi masyarakat tidak kalah pentingnya untuk suksesnya suatu program. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka suatu rencana yang baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya peranan masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dengan pembentukan arah secara jelas sehingga bentuk partisipasinya dapat ditingkatkan. Kelembagaan masyarakat di Kelurahan Loktuan ini mempunyai berbagai bentuk, diantaranya adalah :

a LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 9 tahun 2003. Organisasi ini pada saat era Orde Baru bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Seiring dengan perubahan kepemimpinan pusat, orientasi pembangunan yang berpola "top-down" berubah menjadi "bottom to up". LPM ini bersama-sama tokoh masyarakat dan staf Kelurahan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) yang diadakan setahun sekali, berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dalam peningkatan mutu lingkungan tempat tinggalnya khususnya dalam pembangunan fisik, untuk diajukan ke Pemerintah Kota Bontang agar ditindak lanjuti. Bersama-sama Lurah, LPM mengelola dana *block grant* sekitar Rp. 1 milyar setiap tahunnya untuk peningkatan sarana dan prasarana di Kelurahan Loktuan.

b Karang Taruna.

Organisasi yang mewadahi anak-anak muda dalam kegiatan-kegiatan olahraga, pelatihan peningkatan kemampuan, dan seni budaya. Organisasi Karang Taruna ini berjalan dengan baik.

c PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga)

Organisasi yang menjadi wadah ibu-ibu dalam mengisi waktu luangnya di bidang pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuannya mengelola ekonomi rumah tangga. Organisasi PKK ini berjalan dengan baik, ketuanya langsung dijabat oleh istri Lurah.

d. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Salah satu organisasi yang anggotanya 100% ibu-ibu. Bertugas membantu pemerintah dalam memonitor dan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil, penimbangan balita dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Organisasi ini ada di setiap RT dan pendanaannya dari iuran warga setempat. Organisasi ini relatif berjalan dengan baik di setiap RT.

5.2.3 Macam – Macam Program Bina Lingkungan di Loktuan

Program Bina Lingkungan sebagai bagian dari *community development* yang dilaksanakan PT.

Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan adalah sebagai berikut :

- A. Pembangunan Pasar Citramas
- B. Pembuatan Sumur Dalam
- C. Pembangunan Gereja Immanuel
- D. Pembangunan Rumah Baca

A. Pembangunan Pasar Citramas



Gambar 9. Pasar Citramas

Sebelum berdirinya PT. Pupuk Kaltim, di Loktuan telah ada pasar tradisional yang berlokasi di dekat pelabuhan. Pasar tersebut ada semenjak beroperasinya perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) PT. Kayumas yang beroperasi sekitar tahun 1970an hingga tahun 1988.

Dengan adanya proyek pembangunan PT. Pupuk Kaltim yang dimulai tahun 1978, semakin banyak pula para pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Di samping itu, pemukiman penduduk di sekitar pasar juga semakin banyak dan tidak beraturan, serta adanya usaha prostitusi yang membuat kondisi pasar semakin padat dan kumuh, apalagi saat musim hujan tiba semakin bertambah kumuh akibat jalanan di dalam dan sekitar pasar sangat becek.

Para pedagang sebenarnya juga mengeluhkan kondisi yang seperti ini karena para pembeli khususnya dari kalangan menengah ke atas lebih menyukai berbelanja ke pasar Rawa Indah yang lebih bersih dan relatif lebih lengkap barang-barangnya. Keterbatasan tempat jualan menyebabkan pula tertutupnya kesempatan kerja bagi masyarakat Loktuan lainnya padahal masih banyak jenis / macam barang kebutuhan sehari-hari yang bisa dijual di pasar tersebut.

Mengingat hal tersebut, pada tahun 1990 atas persetujuan Pemerintah Kota Bontang (saat itu status Bontang masih Kota Administratif di bawah Kabupaten Kutai), membangun sebuah pasar baru yang jauh lebih besar daripada pasar lama di sebuah kawasan yang masih kosong dari pemukiman penduduk, diberi nama pasar Citramas. Pembangunan pasar tersebut sebagai perwujudan misi PT. Pupuk Kaltim, peduli kepada masyarakat lingkungan di bidang pengembangan prasarana dan sarana umum.

B. Pembuatan Sumur Dalam

Untuk keperluan sehari-hari, mandi-cuci-kakus, mayoritas masyarakat Loktuan mempergunakan air sumur galian dangkal dan air hujan yang ditampung ke dalam drum-drum plastik bekas kemasan bahan kimia atau drum logam bekas kemasan pelumas pabrik. Kondisi air sumur galian dangkal tersebut sebenarnya tidak layak untuk diminum atau untuk keperluan memasak karena kadar logamnya tinggi dan masam (pH kurang dari 7), keruh dan berbau tanah.

Sebagian masyarakat Loktuan terutama di sekitar “pasar senggol” (sebuah tempat yang mana bila malam hari menjadi ramai dengan adanya pedagang kakilima menjadikan jalan yang dilalui pejalan kaki semakin sempit menyebabkan orang-orang yang berjalan di sekitar tempat tersebut bersenggolan), dan di daerah pelabuhan serta Kampung Selambai berlangganan air bersih ke perusahaan air minum swasta Hotel Abadi kepunyaan H. Amos Matiro.



Gambar 10. Sumur Dalam

Air yang disalurkan oleh H. Amos Matiro inipun sebenarnya belum layak dijadikan air minum karena belum melalui proses pengolahan air minum. Dengan kondisi air minum seperti ini jelas tidak menunjang mutu kesehatan masyarakat.

Keberadaan Kelurahan Loktuan (dan juga Kelurahan Guntung) yang melewati kompleks PT. Pupuk Kaltim dan jauh dari jaringan utama PDAM Kota Bontang menjadikan hambatan tersendiri atau dijadikan alasan oleh PDAM Kota Bontang belum membangun jaringan pipa air bersih ke Loktuan. Masyarakat Loktuan yang berdekatan dengan PT. Pupuk Kaltim tentunya juga mempunyai hak untuk bisa menikmati air bersih sebagaimana yang dinikmati oleh keluarga PT. Pupuk Kaltim.

Memperhatikan hal tersebut PT. Pupuk Kaltim pada tahun 2005 membuat sumur bor dengan kedalaman 310 meter dengan kapasitas 32,2 liter / detik di Kampung Mandar Loktuan. Biaya pembuatan sumur bor ini sekitar 1 milyar rupiah. Pengoperasian sumur dalam ini untuk selanjutnya diserahkan kepada PDAM Kota Bontang. Pembuatan sumur bor ini merupakan program PT. Pupuk Kaltim di bidang pengembangan prasarana dan sarana umum.

C Pembangunan Gereja Immanuel

Pembangunan gereja Immanuel ini merupakan bentuk pencerminan kerukunan ummat beragama di Kelurahan Loktuan. Hal ini didasarkan atas penduduk Loktuan yang mayoritas beragama Islam. Di Kelurahan Loktuan, PT. Pupuk Kaltim tidak membangun masjid atau musholla baru karena bangunan masjid dan musholla sudah mencukupi untuk menampung jamaah sholat. Yang dilakukan PT. Pupuk Kaltim adalah membantu perbaikan bangunan masjid dan musholla tersebut.



Gambar 12. Gereja Immanuel

Untuk menunjukkan bahwa PT. Pupuk Kaltim tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap kehidupan beragama masyarakat, setelah selesainya PT. Pupuk Kaltim membangun masjid Baiturrachman di kompleks perumahan PT. Pupuk Kaltim, dibangun pula gereja untuk umat Kristen dan Katholik. Bangunan dua buah gereja tersebut sama besar dan sama pula bentuknya dengan lokasi yang bersebelahan. Oleh masyarakat, bangunan gereja tersebut dikenal dengan sebutan gereja kembar.

Keputusan PT. Pupuk Kaltim pada tahun 2000 untuk membangun gereja kembar di Kelurahan Loktuan tidak terlepas dari keinginan umat Kristiani mempunyai tempat ibadah yang representatif karena gereja yang telah ada di Loktuan dan sekitarnya sangat sederhana dan sudah tidak mampu menampung jumlah jemaat. Atas dasar tersebut dan disertai persetujuan masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat Loktuan, dibangunlah gereja kembar di daerah yang masih sepi dari pemukiman.

Pembangunan gereja ini merupakan program PT. Pupuk Kaltim di bidang pengembangan sarana ibadah. Untuk memudahkan umat Kristiani melaksanakan ibadahnya ke Gereja Immanuel, dibuat pula akses jalan cor beton untuk menuju gereja. Biaya pembuatan gereja dan jalan tersebut menelan biaya lebih dari 10 milyar rupiah. Dengan adanya jalan dan gereja tersebut, berkembang pula pemukiman penduduk di kanan-kiri gereja dan jalan yang menuju ke gereja.

D Pembangunan Rumah Baca



Ga
mb
ar

12. Rumah Baca

Rumah baca yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim ini merupakan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Loktuan dengan harapan bisa meningkatkan minat baca dan belajar bagi anak-anak usia sekolah dan masyarakat Loktuan pada umumnya.

Rumah baca ini dibangun pada tahun 2004 dengan dana kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. PT. Pupuk Kaltim membantu biaya pengoperasian rumah baca untuk 2 tahun pertama dan untuk selanjutnya dioperasikan oleh Yayasan Taman Baca Indonesia (YTBI), sebuah yayasan yang berpusat di Jakarta yang diketuai oleh Ibu Rethy Alexandra.

Jumlah buku koleksi rumah baca sekitar 3000 judul, kebanyakan buku ceritera untuk anak-anak. Tingkat kunjungan rumah baca setiap harinya rata-rata 20 orang, kebanyakan anak-anak SD dan TK.

5.3 Deskripsi Responden

Untuk meningkatkan obyektivitas hasil wawancara dan kuesioner penelitian, responden dititik beratkan kepada mereka yang berusia di atas 40 tahun dan telah berada di Loktuan lebih dari 25 tahun, dengan pertimbangan mereka sudah lama mengenal PT. Pupuk Kaltim dan mengetahui perjalanan sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Data responden berdasarkan usia sebagaimana dalam Tabel 12. di bawah ini.

Tabel 12. Responden Berdasarkan Usia

Usia	Masyarakat		Staf Kelurahan, LSM, PKT		Total
	Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan	
20 s/d 30	3	1	0	0	4
31 s/d 40	7	2	2	1	12
41 ke atas	15	7	5	2	29
	25	10	7	3	45

Untuk mata pencaharian responden, diambil mereka yang bekerja di sektor informal terkecuali responden dari PT. Pupuk Kaltim dan staf Kelurahan Loktuan. Alasan utama pengambilan responden yang bekerja di sektor informal adalah mereka sebagai penerima langsung manfaat program *community development* dari PT. Pupuk Kaltim. Data responden berdasarkan mata pencaharian sebagaimana disajikan dalam Tabel 13

Tabel 13. Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

Responden	Mata Pencaharian						Total
	Pedagang	Nelayan	Jasa	Swasta	PKT	PNS	
Laki - laki	8	6	3	7	5	1	30
Perempuan	12	0	2	0	0	1	15
	20	6	5	7	5	2	45

5.4 Analisis Proses *Community Development*

Untuk mengetahui efektifitas program Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Community Development*, perlu dilakukan analisa terhadap proses pelaksanaannya.

Program Bina Lingkungan ini tidak terlepas dari adanya kesepakatan bersama antara PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL Co. dan Pemerintah Kota Bontang (pada saat itu masih berstatus Kota Administratif dengan 2 kecamatan di bawah Kabupaten Kutai). PT. Pupuk Kaltim "membina" pengembangan wilayah Kecamatan Bontang Utara, dan PT. Badak NGL Co. "membina" pengembangan wilayah Kecamatan Bontang Selatan.

A Pembangunan Pasar Citramas

Bagi mereka yang mengetahui riwayat dibangunnya Pasar Citramas tentulah tidak menyangka pasar tersebut akhirnya menjadi ramai seperti sekarang. Hal ini dikarenakan pada awal dibangunnya pasar oleh PT. Pupuk Kaltim, lokasinya jauh dari pemukiman, tidak ada air bersih dan listrik, serta jalanan yang menuju ke pasar juga masih jalan tanah pada saat kemarau berdebu dan pada saat hujan jalanan menjadi licin.

Berdasarkan informasi dari PT. Pupuk Kaltim, pembangunan Pasar Citramas ini didasarkan atas pertimbangan banyaknya keluhan dari keluarga karyawan PT. Pupuk Kaltim yang berbelanja di pasar lama yang kondisinya kumuh dan sempit. Saat itu, pasar lama Loktuan adalah satu-satunya pasar terdekat dengan perumahan karyawan PT. Pupuk Kaltim, dan juga satu-satunya pasar di Kecamatan Bontang Utara. Sedangkan untuk berbelanja ke Pasar Rawa Indah yang berada di Kecamatan Bontang Selatan relatif cukup jauh, sekitar 10 Km jaraknya dari kompleks perumahan karyawan PT. Pupuk Kaltim.

Mempertimbangkan hal tersebut, berdasarkan musyawarah PT. Pupuk Kaltim dengan Pemerintah Kota Administratif Bontang diputuskan membangun pasar baru di daerah yang masih kosong dan jauh dari pemukiman penduduknya. Selain pemerintah, peranan *stakeholder* lainnya di dalam menentukan lokasi pasar baru boleh dikatakan tidak kelihatan. Hal ini bisa dilihat dari awal beroperasinya Pasar Citramas, para pedagang enggan untuk pindah dengan berbagai alasan dan para pembeli pun enggan berbelanja ke pasar baru karena akses jalan yang menuju ke pasar belum bagus. Mereka khawatir langganannya tidak tahu kepindahannya, dan konsumen enggan berbelanja ke sana dikarenakan akses jalan yang menuju pasar masih jelek. Menyikapi hal tersebut, PT. Pupuk Kaltim melakukan perbaikan jalan yang menuju pasar dan menyediakan bus belanja setiap hari Sabtu, Senin, dan Rabu bagi keluarga PT. Pupuk Kaltim.

Sebenarnya kondisi pasar lama yang kumuh bisa diatasi apabila budaya kebersihan dan kerapihan para pedagang ditingkatkan. Untuk meningkatkan rasa memiliki perlu ditingkatkan pula kemandirian para pedagang dalam PT. Pupuk Kaltim seharusnya bisa bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi proses penataan dan pengaturan letak tempat jualan di dalam memberdayakan masyarakat.

Pembangunan Pasar Citramas didesain dan didanai oleh PT. Pupuk Kaltim dan dikerjakan kontraktor swasta tanpa melibatkan para pedagang maupun *stakeholder* lainnya. Keterlibatan para pedagang secara langsung maupun tidak langsung dalam proyek ini boleh dikatakan tidak ada. Demikian pula masyarakat Loktuan yang terlibat dalam proyek pembangunan pasar ini hanya sebatas sebagai pekerja kasar.

Proses pelaksanaan pembangunan Pasar Citramas ini terlihat tidak partisipatif karena *stakeholders* tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan PT. Pupuk Kaltim pertama kali seharusnya mengadakan musyawarah, sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, para pedagang, tokoh masyarakat, dan LSM. Musyawarah merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam program *community development* yang dijalankan, sebagai bagian dari *transfer ownership program*. Inti dari *community development* harus mengandung unsur pemberdayaan, dan tidak mendidik mereka sebagai pengemis.

Dari hasil musyawarah tersebut dilakukan analisa kebutuhan komunitas yang sesungguhnya (*community need analysis*). Dalam melakukan analisa kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekedar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Analisa kebutuhan masyarakat tersebut pada intinya untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat yang berguna untuk memilih alternatif kebijakan, kemudian mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

PT. Pupuk Kaltim juga belum bisa memanfaatkan adanya fasilitator yang berasal dari tokoh / pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mengangkat dirinya sendiri sebagai tokoh / pemimpin atau penduduk lokal yang memiliki keahlian di dalam pemberdayaan masyarakat. Bilamana perlu PT. Pupuk Kaltim mendatangkan seseorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal untuk menjadi fasilitatornya.

Fasilitator inilah yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, menggali potensi yang ada dengan basis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan Pasar Citramas, bukan hanya pemerintah. Tidak adanya peranan dari *stakeholder* berakibat pada minimnya rasa memiliki bangunan yang dibuat dan hal ini menjadikan proses pembangunan pasar tanpa adanya pengawasan dari masyarakat khususnya para pedagang yang akan dipindahkan.

Dari analisa proses pembangunan Pasar Citramas tersebut, belum kelihatan pemberdayaan masyarakatnya karena hakekat *community development* adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada, mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada dirinya, memilih alternatif kebijakan

yang terbaik bagi dirinya, dan mengimplementasikan alternatif kebijakan tersebut pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Pembangunan Pasar Citramas dalam hal ini bersifat *pilantropis* (derma) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya PT. Pupuk Kaltim. Pada hakekatnya, membangun sekolah, jalan, pasar, atau tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan.. Perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada Negara dan pemerintah bertanggung jawab mengelola dana pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum.

Dengan demikian model pembangunan Pasar Citramas ini bukanlah model *community development* yang sesungguhnya, namun sebuah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang biasa disebut *corporate citizenship*. Prinsip ini memperhatikan pembangunan sosial kemasyarakatan dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Walaupun belum bisa dikatakan bentuk *community development* yang sesungguhnya, namun salah satu tujuan *community development* untuk merealisasi keadilan distributif kepada masyarakat bisa terpenuhi.

B Pembuatan Sumur Dalam

Pada hakekatnya makhluk hidup berusaha untuk menyesuaikan diri / beradaptasi dengan lingkungannya demikian pula dengan masyarakat Loktuan pada akhirnya menjadi terbiasa dengan kekurangan air bersih terutama pada musim kemarau. Untuk mensiasati problem air bersih tersebut, rumah penduduk Loktuan biasanya mempergunakan atap seng dan diberi talang air yang diarahkan ke drum-drum kaleng bekas minyak atau drum plastik bekas kemasan bahan kimia untuk menampung air hujan yang setiap saat turun.

Seiring dengan perkembangan daerah yang berujung pada peningkatan status Bontang dari Kota Administratif di bawah Kabupaten Kutai menjadi Kota, meningkat pula pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah daerah. Pembangunan fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak diantaranya adalah penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bontang.

Keberadaan Kelurahan Loktuan (dan juga Kelurahan Guntung) yang seakan-akan terpisah dari Kota Bontang karena melewati kompleks PT. Pupuk Kaltim, menjadi hambatan tersendiri atau dijadikan alasan oleh PDAM Kota Bontang untuk belum membangun jaringan pipa air bersih ke Loktuan dan Guntung. Masyarakat Loktuan yang berdekatan dengan PT. Pupuk Kaltim tentunya juga mempunyai hak untuk bisa menikmati air bersih sebagaimana yang dinikmati oleh keluarga PT. Pupuk Kaltim. Memperhatikan hal tersebut berdasarkan musyawarah PT. Pupuk Kaltim dengan Pemerintah Kota Bontang diputuskan PT. Pupuk Kaltim membuat sumur bor dengan kedalaman 310 meter dengan kapasitas 32,2 liter / detik di Kampung Mandar Loktuan.

Sebenarnya kesulitan air bersih masyarakat Loktuan bisa diatasi apabila mereka mengetahui tata-cara pengelolaan air bersih dengan teknologi tepat guna. PT. Pupuk Kaltim seharusnya bisa bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Pembuatan sumur bor dibiayai PT. Pupuk Kaltim dan dikerjakan kontraktor swasta tanpa melibatkan *stakeholder*. Sebagian masyarakat Loktuan yang terlibat dalam proyek ini hanya sebatas sebagai pekerja kasar. Dengan demikian pembuatan sumur bor ini belum mencerminkan prinsip *community development* yang sesungguhnya karena *community development* adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Proses pelaksanaan pembangunan Pasar Citramas ini terlihat tidak partisipatif karena *stakeholders* tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan PT. Pupuk Kaltim pertama kali seharusnya mengadakan musyawarah, sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, para pedagang, tokoh masyarakat, dan LSM. Musyawarah merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam program *community development* yang dijalankan, sebagai bagian dari *transfer ownership program*. Inti dari *community development* harus mengandung unsur pemberdayaan, dan tidak mendidik mereka sebagai pengemis.

Dari hasil musyawarah tersebut dilakukan analisa kebutuhan komunitas yang sesungguhnya (*community need analysis*). Dalam melakukan analisa kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekedar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Analisa kebutuhan masyarakat tersebut pada intinya untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat yang berguna untuk memilih alternatif kebijakan, kemudian mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Dalam pembuatan sumur bor, PT. Pupuk Kaltim juga belum bisa memanfaatkan adanya fasilitator yang berasal dari tokoh / pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mengangkat dirinya sendiri sebagai tokoh / pemimpin atau penduduk lokal yang memiliki keahlian di dalam pemberdayaan masyarakat. Bilamana perlu PT. Pupuk Kaltim mendatangkan seseorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal untuk menjadi fasilitatornya.

Fasilitator inilah yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, menggali potensi yang ada dengan basis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembuatan sumur bor, bukan hanya pemerintah ataupun PT. Pupuk Kaltim. Tidak adanya peranan dari *stakeholder* berakibat pada minimnya rasa memiliki bangunan yang dibuat dan hal ini menjadikan proses pembuatan sumur bor tanpa adanya pengawasan dari masyarakat.

Dari analisa proses pembangunan sumur bor tersebut, belum kelihatan pemberdayaan masyarakatnya karena hakekat *community development* adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada, mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada dirinya, memilih alternatif kebijakan yang terbaik bagi dirinya, dan mengimplementasikan alternatif kebijakan tersebut pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Pembangunan sumur bor dalam hal ini bersifat pilantropis (derma) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya PT. Pupuk Kaltim. Pada hakekatnya, membangun sekolah, jalan, pasar, atau tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan.. Perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada Negara dan pemerintah bertanggung jawab mengelola dana pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum.

Dengan demikian model pembuatan sumur bor ini bukanlah model *community development* yang sesungguhnya, namun sebuah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang biasa disebut *corporate citizenship*. Prinsip ini memperhatikan pembangunan sosial kemasyarakatan dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Walaupun belum bisa dikatakan bentuk *community development* yang sesungguhnya, namun salah satu tujuan *community development* untuk merealisasi keadilan distributif kepada masyarakat bisa terpenuhi.

C Pembangunan Gereja Immanuel

Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia. Mengingat di Kota Bontang belum tersedia rumah ibadah yang representatif yang dibangun oleh pemerintah bagi umat Kristiani, maka atas dasar tersebut disertai persetujuan dari pemerintah Kota Bontang, masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat Loktuan, dibangunlah gereja Kristen dan gereja Katholik oleh PT. Pupuk Kaltim di daerah yang masih sepi dari pemukiman. Pembangunan gereja ini merupakan program PT. Pupuk Kaltim di bidang pengembangan sarana ibadah

Sebenarnya PT. Pupuk Kaltim tidak harus membangun tempat ibadah baru apabila umat Kristiani mampu memberdayakan diri dengan menggali seluruh potensi yang dimilikinya. PT. Pupuk Kaltim seharusnya bisa bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan mereka.

Pembangunan Gereja Immanuel yang didesain dan dibiayai PT. Pupuk Kaltim, dikerjakan kontraktor swasta tanpa melibatkan *stakeholder*. Sebagian masyarakat Loktuan yang terlibat dalam proyek ini hanya sebatas sebagai pekerja kasar. Dengan demikian pembangunan Gereja Immanuel ini belum mencerminkan prinsip *community development* yang sesungguhnya karena *community development* adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Proses pelaksanaan pembangunan Pasar Citramas ini terlihat tidak partisipatif karena *stakeholders* tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan PT. Pupuk Kaltim pertama kali seharusnya mengadakan musyawarah dengan para tokoh dan jemaat gereja, sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan juga Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan LSM. Musyawarah merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam program *community development* yang dijalankan, sebagai bagian dari *transfer ownership program*. Inti dari *community development* harus mengandung unsur pemberdayaan, dan tidak mendidik mereka sebagai pengemis.

Dari hasil musyawarah tersebut dilakukan analisa kebutuhan komunitas yang sesungguhnya (*community need analysis*). Dalam melakukan analisa kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekedar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Analisa kebutuhan masyarakat tersebut pada intinya untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat yang berguna untuk memilih alternatif kebijakan, kemudian mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Dalam pembangunan Gereja Immanuel, PT. Pupuk Kaltim juga belum bisa memanfaatkan adanya fasilitator yang berasal dari tokoh / pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mengangkat dirinya sendiri sebagai tokoh / pemimpin atau penduduk lokal yang memiliki keahlian di dalam pemberdayaan masyarakat. Bilamana perlu PT. Pupuk Kaltim mendatangkan seseorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal untuk menjadi fasilitatornya.

Fasilitator inilah yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, menggali potensi yang ada dengan basis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembuatan Gereja Immanuel, bukan hanya pemerintah ataupun PT. Pupuk Kaltim. Tidak adanya peranan dari *stakeholder* berakibat pada minimnya rasa memiliki bangunan yang dibuat dan hal ini menjadikan proses pembuatan Gereja Immanuel tanpa adanya pengawasan dari masyarakat.

Dari analisa proses pembangunan Gereja Immanuel tersebut, belum kelihatan pemberdayaan masyarakatnya karena hakekat *community development* adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada, mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada dirinya, memilih alternatif kebijakan yang terbaik bagi dirinya, dan mengimplementasikan alternatif kebijakan tersebut pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Pembangunan Gereja Immanuel dalam hal ini bersifat pilantropis (*derma*) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya PT. Pupuk Kaltim. Pada hakekatnya, membangun sekolah, jalan, pasar, atau tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan.. Perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada

Negara dan pemerintah bertanggung jawab mengelola dana pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum.

Dengan demikian model pembangunan Gereja Immanuel ini bukanlah model *community development* yang sesungguhnya, namun sebuah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang biasa disebut *corporate citizenship*. Prinsip ini memperhatikan pembangunan sosial kemasyarakatan dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Walaupun belum bisa dikatakan bentuk *community development* yang sesungguhnya, namun salah satu tujuan *community development* untuk merealisasi keadilan distributif kepada masyarakat bisa terpenuhi.

D Pembangunan Rumah Baca

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, sudah tentu sarana dan prasarana di bidang pendidikan harus mencukupi. Rumah Baca, adalah salah satu sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan.

Pembangunan Rumah Baca ini tidak terlepas dari keprihatinan berbagai pihak atas rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat Bontang, khususnya di Kelurahan Loktuan. Memperhatikan hal tersebut, maka atas dasar persetujuan dari pemerintah Kota Bontang, masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat Loktuan, dibangunlah Rumah Baca oleh PT. Pupuk Kaltim di tengah pemukiman masyarakat.

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan dan pengetahuan masyarakat Loktuan, PT. Pupuk Kaltim tidak harus membangun Rumah Baca apabila masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mampu memberdayakan diri dengan menggali seluruh potensi yang dimilikinya.

Pembangunan Rumah Baca yang didesain dan dibiayai PT. Pupuk Kaltim, dikerjakan kontraktor swasta tanpa melibatkan *stakeholder*. Sebagian masyarakat Loktuan yang terlibat dalam proyek ini hanya sebatas sebagai pekerja kasar. Dengan demikian pembangunan Rumah Baca ini belum mencerminkan prinsip *community development* yang sesungguhnya karena *community development* adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Proses pelaksanaan pembangunan Pasar Citramas ini terlihat tidak partisipatif karena *stakeholders* tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan PT. Pupuk Kaltim pertama kali seharusnya mengadakan musyawarah dengan para tokoh dan jemaat gereja, sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses

eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan juga Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan LSM. Musyawarah merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam program *community development* yang dijalankan, sebagai bagian dari *transfer ownership program*. Inti dari *community development* harus mengandung unsur pemberdayaan, dan tidak mendidik mereka sebagai pengemis.

Dari hasil musyawarah tersebut dilakukan analisa kebutuhan komunitas yang sesungguhnya (*community need analysis*). Dalam melakukan analisa kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekedar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Analisa kebutuhan masyarakat tersebut pada intinya untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masyarakat yang berguna untuk memilih alternatif kebijakan, kemudian mengimplementasikan alternatif yang menggantungkan pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Dalam pembangunan Rumah Baca, PT. Pupuk Kaltim juga belum bisa memanfaatkan adanya fasilitator yang berasal dari tokoh / pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis atau mengangkat dirinya sendiri sebagai tokoh / pemimpin atau penduduk lokal yang memiliki keahlian di dalam pemberdayaan masyarakat. Bilamana perlu PT. Pupuk Kaltim mendatangkan seseorang yang ahli di bidang *community development* yang berasal dari luar masyarakat lokal untuk menjadi fasilitatornya.

Fasilitator inilah yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, menggali potensi yang ada dengan basis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembuatan Rumah Baca, bukan hanya pemerintah ataupun PT. Pupuk Kaltim. Tidak adanya peranan dari *stakeholder* berakibat pada minimnya rasa memiliki bangunan yang dibuat dan hal ini menjadikan proses pembuatan Rumah Baca tanpa adanya pengawasan dari masyarakat.

Hal ini terbukti sampai dengan saat ini tingkat kunjungan Rumah Baca dari masyarakat setiap harinya rata-rata hanya 10 orang, dan kegiatan operasional Rumah Baca masih dibantu oleh Yayasan Taman Baca Indonesia (YTBI), sebuah yayasan yang berpusat di Jakarta yang diketuai oleh Ibu Rethy Alexandra. Seharusnya masyarakat sekitar Rumah Baca benar-benar bisa memanfaatkan keberadaan Rumah Baca yang cukup representatif tersebut untuk kegiatan belajar-mengajar, dan dana operasional Rumah Baca bisa mereka cukupi sendiri dengan sistim iuran tanpa mengharapkan bantuan dari pihak luar.

Sepinya kunjungan masyarakat ke Rumah Baca juga tidak terlepas dari Rumah Baca yang kurang tepat lokasinya karena tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah dan rumah di sekitarnya juga cukup bagus bangunannya. Sebaiknya bangunan Rumah Baca ini ditempatkan di perkampungan Selambai yang padat penduduknya, banyak anak-anak sekolah dan banyak pula anak-anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah karena kesulitan ekonomi keluarga ataupun kesadaran orangtuanya akan pendidikan yang kurang.

Dari keempat model pembangunan PT. Pupuk Kaltim yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat tersebut, pembuatan Rumah Baca merupakan program yang kurang berhasil pada tahap implementasinya. Hal ini bisa dimaklumi karena kebijakan pembuatan Rumah Baca sedikit banyak mengandung muatan politis menjelang pemilihan Presiden tahun 2004.

Dari analisa proses pembangunan Rumah Baca tersebut, belum kelihatan pemberdayaan masyarakatnya karena hakekat *community development* adalah proses aktivitas sosial dimana masyarakat mengorganisasi dirinya untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada, mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada dirinya, memilih alternatif kebijakan yang terbaik bagi dirinya, dan mengimplementasikan alternatif kebijakan tersebut pada sumber daya masyarakat itu sendiri. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

Pembangunan Rumah Baca dalam hal ini bersifat pilantropis (derma) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya PT. Pupuk Kaltim. Pada hakekatnya, membangun sekolah, jalan, pasar, atau tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan.. Perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada Negara dan pemerintah bertanggung jawab mengelola dana pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum.

Dengan demikian model pembangunan Rumah Baca ini bukanlah model *community development* yang sesungguhnya, namun sebuah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang biasa disebut *corporate citizenship*. Prinsip ini memperhatikan pembangunan sosial kemasyarakatan dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Walaupun belum bisa dikatakan bentuk *community development* yang sesungguhnya, namun salah satu tujuan *community development* untuk merealisasi keadilan distributif kepada masyarakat bisa terpenuhi.

5.5 Community Development dalam Format Proper

Di dalam penilaian Proper, Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai format kuesioner khusus untuk menilai pelaksanaan *community development* oleh perusahaan. Penelitian program *community development* dalam format Proper yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan, dipergunakan 13 pertanyaan dalam format kuesioner Proper terhadap 30 orang anggota masyarakat sebagai penerima manfaat, dan 5 orang tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Loktuan dengan pertanyaan mulai dari nomor 6 s/d 19. Wawancara dengan mempergunakan seluruh pertanyaan (19 nomor) terhadap 2 staf Kelurahan Loktuan, 5 staf Biro Humas PT. Pupuk Kaltim, dan 3 orang LSM.

Berdasarkan analisa jawaban responden terhadap kuesioner dan wawancara tersebut, berikut adalah hasil analisis jawaban responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut. diperoleh hasil sebagaimana di bawah ini.

1. Kebijakan *community development* di PT. Pupuk Kaltim.

Menurut 8 orang (80%) responden dari unsur Staf Kelurahan, LSM, dan PKT, PT. Pupuk Kaltim sudah memiliki program strategis *community development* dengan Visi dan Misi yang jelas dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Komitmen PT. Pupuk Kaltim dalam program *community development* diatur dalam SK Meneg BUMN No. KEP-236/MBU/2003, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan menyisihkan dana sebesar 1-3% dari keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak, dana kegiatan program Pembinaan Wilayah berasal dari dana operasional perusahaan sendiri dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Untuk kegiatan *community development*, PT. Pupuk Kaltim melaksanakannya melalui yayasan – yayasan yang dibentuknya yaitu Yayasan Rumah Sakit untuk bidang kesehatan, Yayasan Pupuk Kaltim untuk bidang pendidikan, dan Yayasan Baiturrahman untuk bidang penyaluran zakat, infaq, sodaqoh.

2. Keberadaan unit kerja khusus yang menangani *community development*.

Menurut 8 orang (80%) responden dari unsur Staf Kelurahan, LSM, dan PKT. telah terdapat struktur manajemen untuk bagian *community development* di PT. Pupuk Kaltim, deskripsi tugasnya jelas dan keputusan penting tanpa birokrasi hierarki. Unit kerja tersebut adalah Biro Humas untuk program Bina Lingkungan, Biro PKBL untuk program Kemitraan dan Bina Wilayah, serta Yayasan Baiturrahman, Yayasan Rumah Sakit, dan Yayasan Pupuk Kaltim untuk program *community development* tidak langsung.

3. Sumber Daya Manusia khusus yang menangani *community development*.

Sebanyak 6 orang (60%) responden dari unsur Staf Kelurahan, LSM, dan PKT mengatakan bahwa terdapat sumber daya manusia khusus yang menangani *community development* sebanyak 45 orang dengan pendidikan S-2 Komunikasi (1 orang), S-1 Teknik dan Pertanian (4 orang), S-1 Ilmu Sosial (Ekonomi/Hukum, 12 orang), dan SMTA (28 orang). Walaupun staf *community development* berpendidikan rata-rata SMTA untuk petugas lapangan, dan berpendidikan Sarjana Non Sosial untuk tingkatan pengambil keputusan., namun mereka rata-rata mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dan mendapatkan pelatihan tentang *community development* serta study banding ke perusahaan yang melaksanakan program *community development*.

4. Rencana kerja strategis program 1 tahunan dan 5 tahunan untuk kegiatan *community development*.

Sebanyak 5 orang (50%) responden dari unsur Staf Kelurahan, LSM, dan PKT menjawab bahwa rencana program berisi penjelasan umum 1 tahun dan program 5 tahunan dengan program yang agak longgar sesuai yang ada dalam dokumen perencanaan. Program yang disusun, pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas dan bisa ditunda pelaksanaannya bilamana ada program tambahan yang jauh lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

5. Ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan *community development*

Sebanyak 7 orang (70%) responden dari unsur Staf Kelurahan, LSM, dan PKT menjawab bahwa program *community development* mendapatkan alokasi pendanaan jelas, proporsional dengan keuntungan, dan mampu mencari sumber pendanaan lain. Hal ini sesuai dengan dokumen laporan kegiatan program *community development* PT. Pupuk Kaltim. Dana untuk Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan diatur oleh SK Meneg BUMN No. KEP-236/MBU/2003 dengan menyisihkan dana sebesar 1-3% dari keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak. Dana kegiatan program Pembinaan Wilayah berasal dari dana operasional perusahaan sendiri dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Sumber pendanaan lain diperoleh PT. Pupuk Kaltim sebagai koordinator program *community development* dari BUMN di Kalimantan. Total Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2006 sebesar **Rp 22,646 milyar**, terdiri dari pinjaman permodalan untuk Program Kemitraan Wilayah Bontang sebesar **Rp 9.375.500.000,-**, dana Kemitraan Wilayah Kalimantan Timur untuk pinjaman permodalan dianggarkan sebesar **Rp 2,500,000,000,-**

6. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim bila ada kerusakan akibat pencemaran lingkungan.

Sebanyak 23 orang (51,11%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim memfasilitasi penilaian kerusakan dengan disaksikan pihak ketiga yang netral dan masyarakat menyatakan puas atas proses tersebut. Penilaian oleh pihak ketiga yang netral tersebut berasal dari Disperindagkop Provinsi Kaltim dan Bapedalda Provinsi Kaltim untuk uji laboratorium. Sebanyak 15 orang (33,33%) menjawab PT. Pupuk Kaltim bersama masyarakat menilai dampak kerugian, disaksikan oleh pihak ketiga yang netral dan keputusan dianggap adil oleh masyarakat.

7. Besaran pemberian kompensasi kerusakan akibat pencemaran lingkungan oleh PT. Pupuk Kaltim.

Sebanyak 30 orang (60,67%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim memberikan nilai kompensasi yang disepakati, telah sesuai standar harga minimum dan diperhitungkan sejak awal terjadinya kerusakan. Standar harga berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak) untuk penggantian lahan, harga penggantian ikan, rumput laut disesuaikan dengan harga pasar, dan untuk tanaman disesuaikan dengan harga yang biasanya diberlakukan oleh pemerintah. Sebanyak 8 orang (17,78%) menjawab nilai kompensasi yang diberikan PT. Pupuk Kaltim tidak mencapai tuntutan masyarakat dan standar harga umum yang berlaku, namun relatif diterima oleh masyarakat. Mereka mengatakan menerima kompensasi lebih disebabkan manfaat-manfaat yang telah diterimanya dari PT. Pupuk Kaltim dan selama ini pihak perusahaan berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

8. Kesesuaian pembayaran kompensasi kerusakan.

Sebanyak 33 orang (73,33%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim memberikan jumlah, waktu dan sasaran kompensasi kerusakan, disaksikan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak ada klaim terhadap kompensasi. Namun sebanyak 7 orang (15,56%) menyatakan PT. Pupuk Kaltim tidak memberikan kompensasi sesuai tuntutan, dan terdapat klaim dari masyarakat.

9. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program *community development*.

Sebanyak 37 orang (82,22%) menjawab bahwa perencanaan program *community development* oleh perusahaan dengan keterlibatan minimum *stakeholder* dan penerima manfaat program, namun hasilnya tetap memperoleh dukungan. Responden mengatakan mereka tidak kecewa walaupun tidak dilibatkan dalam proses perencanaan karena percaya terhadap kemampuan karyawan PT. Pupuk Kaltim dalam program *community development*. Namun berdasarkan jawaban 5 orang (11,11%) menyatakan bahwa

sebagian besar komponen *stakeholder* dan seluruh penerima manfaat program berpartisipasi penuh dan difasilitasi dalam perencanaan program *community development* diantaranya melalui musyawarah pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota.

10. Program *community development* merupakan komplemen dan suplemen dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan pihak lain.

Sebanyak 27 orang (60%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim turut aktif dalam perencanaan pembangunan wilayah dan berkontribusi penuh melalui program *community development*. Setiap awal tahun anggaran, Pemerintah Kota Bontang mengadakan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota Bontang yang dihadiri oleh Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, LPM, staf Kelurahan, Camat, dan staf Dinas / Instansi terkait Kota Bontang. Dalam setiap pertemuan tersebut PT. Pupuk Kaltim mengirimkan staf Biro Humas dan staf unit kerja terkait di PT. Pupuk Kaltim yang disesuaikan dengan materi musyawarah.

11. Pelaksanaan program *community development* dilakukan bersama-sama masyarakat dan pihak lain yang berkompetensi tepat.

Sebanyak 32 orang (71,11%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim melaksanakan sendiri kegiatan *community development*, dan berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten, serta sebagian dilakukan oleh kelompok masyarakat. PT. Pupuk Kaltim belum banyak melibatkan *stakeholder* dalam pelaksanaan program *community development* dengan alasan kemampuan mereka masih belum memungkinkan untuk diajak kerjasama, dan menimbulkan biaya tambahan atas keterlibatan mereka akibat pemberian honor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat biasanya dalam bidang olahraga dan seni budaya. Sebanyak 10 orang (22,22%) menyatakan bahwa PT. Pupuk Kaltim bekerja sama erat dengan pihak lain, pemerintah, kelompok masyarakat, LSM (Non Government Organisation), dan akademisi.

12. Pemantauan program *community development* dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan pihak lain yang berkompetensi tepat.

Sebanyak 37 orang (82,22%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim melakukan dan memantau sendiri program *community development*. Dari pihak PT. Pupuk Kaltim mengatakan bahwa pemantauan tersebut dilakukan oleh staf unit kerja terkait dengan program yang dilaksanakan. PT. Pupuk Kaltim belum banyak melibatkan *stakeholder* dalam pemantauan program *community development* dengan alasan kemampuan mereka masih belum memungkinkan untuk diajak kerjasama, dan menimbulkan biaya tambahan atas keterlibatan mereka akibat pemberian honor. Sebanyak 5 orang (11,11%) menyatakan bahwa adanya upaya antisipasi terhadap kelancaran program, setiap tahap tertuang dalam dokumen tertulis, melibatkan semua pihak dan pihak ketiga dianggap obyektif

13. Evaluasi keberhasilan program *community development* secara tahunan untuk diambil pelajaran dalam kegiatan *community development* mendatang.

Sebanyak 29 orang (64,44%) menjawab bahwa PT. Pupuk Kaltim melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan sebagian kecil *stakeholder* dan penerima manfaat. Sebanyak 5 orang (11,11%) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara periodik (akhir kegiatan / tahunan) dengan melibatkan

stakeholder dan penerima manfaat, mengikutkan evaluator eksternal dan hasil evaluasi untuk perbaikan tahun depan

14. Terlaksananya seluruh program *community development* yang direncanakan

Sebanyak 35 orang (77,78%) menjawab bahwa sebagian program *community development* dapat dilaksanakan dengan baik, dengan identifikasi kesalahan dan hambatan. Perbaikan dilaksanakan tahun depan. . Sebanyak 7 orang (15,55%) menyatakan bahwa seluruh program berhasil dilaksanakan melampaui / mencapai seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

15. Kebutuhan masyarakat terpenuhi di dalam perencanaan program *community development*

Sebanyak 19 orang (42,22%) menjawab bahwa program *community development* mampu melampaui pemenuhan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Lebih 90% menyatakan kepuasannya. Responden yang bekerja di sektor informal tidak mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dana program kemitraan untuk meningkatkan usahanya. Sebagian dari mereka juga telah mendapatkan hibah rombongan jualan dari PT. Pupuk Kaltim.

16. Keberadaan perusahaan tidak menimbulkan konflik di masyarakat

Sebanyak 29 orang (64,44%) menjawab bahwa selama ini PT. Pupuk Kaltim tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat. Masyarakat difasilitasi untuk bersinergi dengan *community development*. Sebanyak 9 orang (20%) menyatakan bahwa konflik yang terjadi biasanya adalah bau ammonia yang kadang-kadang menyengat hingga ke pemukiman warga. adalah masalah pertanahan / lahan yang diakui sebagai milik masyarakat. Sebanyak 7 orang (15,56%) menyatakan konflik laten atau kecil yang terjadi adalah adanya kasus-kasus pertanahan dengan adanya klaim masyarakat atas sebagian lahan yang dikuasai oleh PT. Pupuk Kaltim.

17. Keberhasilan *community development* mendorong ke arah kemandirian masyarakat

Sebanyak 23 orang (51,11%) menjawab bahwa program *community development* PT. Pupuk Kaltim menjadikan masyarakat mulai mampu mengembangkan diri. Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk peningkatan kemampuan melalui pelatihan bagi para pedagang dan perajin dan bahkan diikuti dalam kegiatan pameran di tingkat lokal maupun nasional. Sebanyak 12 orang (26,67%) menjawab bahwa proses kemandirian masyarakat secara sistematik dengan menampakkan kemandirian dalam masyarakat. Program *community development* ke masyarakat atau wilayah lain. Sebanyak 8 orang (17,78%) menjawab program *community development* PT. Pupuk Kaltim berhasil memandirikan masyarakat dengan indikasi peningkatan taraf hidup dan masyarakat berupaya sendiri melanjutkan program *community development*. Namun sebanyak 2 orang (4,44%) menyatakan bahwa PT. Pupuk Kaltim tidak ada berupaya untuk memandirikan masyarakat. Masyarakat bergantung pada *community development*.

18. Keberadaan perusahaan secara umum bisa diterima oleh masyarakat.

Sebanyak 31 orang (68,89%) menjawab bahwa keberadaan PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan teladan bagi pembangunan dan merupakan bagian internal masyarakat. Masyarakat mayoritas mendukung keberadaannya karena perkembangan Kota Bontang tidak terlepas dari bantuan PT. Pupuk Kaltim dalam membangun sarana dan prasarana umum. Sebanyak 11 orang (24,44%) juga

menyatakan bahwa PT. Pupuk Kaltim sebagai kontributor utama pembangunan di Kota Bontang khususnya di Loktuan. Hanya 3 orang (6,67%) yang menyatakan bahwa kontribusi PT. Pupuk Kaltim dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

19. Partisipasi dalam pembangunan daerah diakui oleh pemerintah dan pihak lain.

Mayoritas masyarakat mengakui partisipasi pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim. Sebanyak 27 orang (60%) menjawab PT. Pupuk Kaltim mempunyai citra yang sangat positif pada pihak lain dan dinyatakan sebagai perusahaan teladan bagi pembangunan masyarakat. PT. Pupuk Kaltim berhasil mendapat penghargaan sebagai perusahaan BUMN terbaik dalam melaksanakan program *community development* dengan diterimanya Comdev Award dan CEO Award dalam BUMN Expo 2002. Sebanyak 14 orang (31,11%) menyatakan bahwa PT. Pupuk Kaltim diakui mempunyai andil dalam pembangunan oleh pemerintah dan pihak lain.

5.6 Usulan Perencanaan

Usulan di bawah ini dimulai dengan analisis SWOT dan ditindak lanjuti dengan usulan perencanaan yang meliputi usulan proses perencanaan dan usulan strategis.

5.6.1 Analisis S.W.O.T

Memperhatikan hasil analisis kuesioner dan wawancara pelaksanaan program *community development* dalam format Proper yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan sebagaimana tersebut di atas, kelihatan masih belum bisa mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan. Diperlukan sebuah analisa lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi dari faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan kinerja PT. Pupuk Kaltim di dalam melaksanakan program *community development* belum bisa maksimal.

Analisa SWOT adalah suatu alat yang dipakai untuk melakukan identifikasi dan analisis yang dipergunakan untuk menuntun penentu kebijakan dalam suatu organisasi menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada melalui teknik audit kemampuan dan tindakan perbaikan terhadap kelemahan yang disertai pengetahuan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan di dalam menetapkan kebijakan apa yang akan diambil agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Analisis SWOT terdiri dari :

- A. *Strength* (Kekuatan),
- B. *Weakness* (Kelemahan),
- C. *Opportunity* (Peluang), dan
- D. *Threats* (Tantangan / Ancaman)

A. *Strength*

Kekuatan atau *Strength* (S) merupakan kondisi pengaruh internal positif yang dapat dikendalikan dan sangat tergantung kepada seberapa besar pencapaian target dari perencanaan awal. Kekuatan yang dimiliki oleh PT. Pupuk Kaltim dalam melaksanakan program *community development* adalah sebagai berikut :

1. Sumber dana yang jelas dari prosentase keuntungan bersih setiap tahunnya sebagaimana diatur di dalam
 - a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari pembagian laba BUMN.
 - b. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-06/MBU.S/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Besarnya penyaluran dana Program Kemitraan masing-masing BUMN Pembina untuk setiap provinsi mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2006 yang telah disetujui RPB/RUPS/Komisaris.
2. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
3. Sumber Daya Manusia di PT. Pupuk Kaltim dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dan pengalaman cukup matang.
4. PT. Pupuk Kaltim merupakan sebuah perusahaan skala internasional yang berkembang terus dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar setiap tahunnya.
5. Komitmen manajemen PT. Pupuk Kaltim untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kota Bontang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perusahaan.

B. Weakness

Kelemahan atau *Weakness* (W) merupakan kondisi pengaruh negatif internal yang dapat dikendalikan dan dipakai untuk tujuan perbaikan kearah yang lebih baik , diantaranya :

1. Belum konsistennya kebijakan unit kerja yang mendukung program *community development* akibat pemahaman yang belum sama di dalam menjabarkan kebijakan perusahaan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
2. Belum diterapkannya sistem *the right man on the right place* di Biro Humas. Beberapa Staff terkesan dipaksakan bekerja di Biro Humas akibat promosi ataupun rotasi karyawan padahal yang bersangkutan tidak mempunyai jiwa melayani dan kewira-usahaan.
3. Jumlah staff yang menangani *community development* tidak sebanding dengan jumlah sektor (jenis) usaha, mitra binaan, dan wilayah binaan yang mencakup seluruh Kalimantan.
4. Pergantian unsur manajemen yang kadangkala tidak disertai dengan kesinambungan kebijakan yang berjalan dengan baik.

C. Opportunity

Peluang atau *Opportunity* adalah kondisi pengaruh eksternal yang tidak dapat dikendalikan, namun dapat diambil keuntungan, diantaranya adalah :

1. PT. Pupuk Kaltim mendapat kepercayaan sebagai Koordinator BUMN pelaksana *community development* di Kalimantan.

2. Program kerja Pemerintah Kota Bontang mewujudkan masyarakat Bontang Sehat tahun 2008, Bontang Lestari tahun 2010, Bontang Cerdas tahun 2010 dan Bontang Bebas Kemiskinan tahun 2020
3. Di Kota Bontang ada 3 (tiga) Perguruan Tinggi Swasta yang memungkinkan diadakannya kerjasama dalam pelaksanaan dan pengawasan program *community development*
4. Lembaga Swadaya Masyarakat, Paguyuban maupun Organisasi Non Pemerintah yang ada di Kota Bontang belum mampu diajak kerjasama dikarenakan lemahnya sistim manajemen, akuntabilitas dan sumber daya manusia mereka.
5. Adanya ketentuan pemerintah bahwa perusahaan harus mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program *community development*.

D. Threats

Tantangan / ancaman atau *Threats* adalah kondisi pengaruh negatif eksternal yang tidak dapat dikendalikan namun dapat diambil hikmahnya (pembelajaran), diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat.
2. Suara sumbang / negatif dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Paguyuban maupun Organisasi Non Pemerintah yang ada di Kota Bontang terhadap pelaksanaan program *community developmen* oleh PT. Pupuk Kaltim.
3. Terjadinya berbagai masalah di bidang sosial seperti bencana banjir, tanah longsor, serangan hama pertanian, konflik, krisis ekonomi yang memerlukan penanganan yang cepat dan intensif.
4. Tumpang tindihnya kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan oleh berbagai instansi teknis dan ada kesan sekedar menghabiskan anggaran.
5. Tingginya tuntutan dan besarnya kompleksitas masyarakat akan kesejahteraan.
6. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
7. Etos kerja suku – suku tertentu yang terbiasa kurang gigih dan ulet dalam berusaha, lebih baik menganggur daripada bekerja dengan upah yang tidak besar.

Setelah diketahui kekuatan, kelemahan/kendala, peluang, dan tantangan/ancaman sebagaimana tersebut di atas, maka berikut ini diuraikan berbagai upaya dalam mengatasinya, yaitu :

1 Upaya memakai *strength* untuk memanfaatkan *opportunity*

- a. Dengan legalitas yang ada, perencanaan program *community development* dikoordinasikan, kebijakan disusun, dan pelaksanaan kebijakan disinkronkan bersama BUMN dan Instansi lain yang terkait.

- b. Menempatkan pegawai yang profesional dan memahami serta menyukai pekerjaan pemberdayaan masyarakat untuk bisa terwujudnya komitmen antar sektor dan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Civitas Akademika yang ada di Kota Bontang dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program *community development*.
- d. Memberikan pelatihan tentang manajerial organisasi, dan peningkatan ketrampilan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Paguyuban maupun Organisasi Non Pemerintah yang ada di Kota Bontang. Setelah mereka mampu dan siap, PT. Pupuk Kaltim mengadakan kerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan program *community development*.

2. Upaya menanggulangi *weakness* dengan memanfaatkan *opportunity*

- a. Unit kerja yang terkait dengan program *community development* secara langsung maupun tidak langsung diberikan pengetahuan tambahan melalui pelatihan tentang *community development*, dan bilamana diperlukan study banding ke perusahaan / daerah yang telah melaksanakan program *community development* dengan baik dan benar.
- b. Peningkatan kemampuan manajerial dan sumber daya manusia Lembaga Swadaya Masyarakat, Paguyuban maupun Organisasi Non Pemerintah yang ada di Kota Bontang agar mampu diajak kerjasama dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program *community development*.
- c. Mengajak kerjasama LSM / Ornop yang mempunyai kemampuan manajerial, akuntabilitas, dan sumber daya manusia baik untuk melaksanakan program *community development*. Hal ini bisa memperingan tugas PT. Pupuk Kaltim dalam melaksanakan program *community development* akibat keterbatasan staf pelaksana program, dan juga untuk meningkatkan citra positif serta kepercayaan masyarakat kepada PT. Pupuk Kaltim.
- d. Meningkatkan kerjasama melalui pelaksanaan Rencana Strategis.

3. Upaya memakai *strength* untuk mengatasi *threats*

- a. Melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan partisipasi instansi terkait dan masyarakat.
- b. Sistem informasi yang ada dapat diakses oleh lembaga sosial lain dalam upaya mendukung peningkatan kualitas program *community development*.
- c. Hasil pengendalian dan pengawasan dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan program *community development* di tahun berikutnya agar lebih baik dan berkesinambungan.

4. Upaya memperkecil *weakness* dengan mengatasi *threats*

- a. Mengintensifkan koordinasi internal guna konsistensi dan mantapnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara intensif.
- c. Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan berbagai instansi teknis.

5.6.2 Usulan Proses Perencanaan

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Loktuan merasakan manfaat dengan adanya PT. Pupuk Kaltim baik secara langsung berupa bantuan dan fasilitas yang diperolehnya maupun secara tidak langsung, diantaranya adalah terciptanya peluang kerja di sektor informal. Bantuan dari PT. Pupuk Kaltim mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kelurahan Loktuan. Masyarakat mendapatkan manfaat yang nyata dengan adanya pasar baru yang jauh lebih besar, lebih bersih, nyaman, rapi, dan aman dari adanya bahaya kebakaran. Dengan los / tempat jualan yang dibuat 3 kali lebih banyak dibandingkan pasar lama dan dibagi berdasarkan jenis dagangannya, masyarakat yang dulunya menganggur bisa bekerja dengan berdagang. Konsumen / pembeli juga merasa senang dengan keberadaan pasar baru karena mereka bisa berbelanja dengan lebih nyaman, pasar tidak berbau menyengat karena bersih, dan barang pilihannya juga banyak. Masyarakat Loktuan yang dulunya menganggur bisa menjadi tukang ojek untuk melayani pedagang di pasar dan konsumennya.

Dengan adanya sumur dalam yang dibuat oleh PT. Pupuk Kaltim, masyarakat sangat tertolong dalam hal kebutuhan akan air bersih yang mereka dambakan selama ini. Lebih dari 3.000 warga yang saat ini telah menikmati air bersih dengan harga murah tersebut dengan cara tinggal memutar kran air di rumahnya masing-masing. Daerah yang dulunya sepi peminatnya karena susah air dan sulit dijangkau oleh perusahaan air minum swasta, kini berkembang dengan cepat karena telah ada jaringan pipa air minum dari PDAM yang mendapatkan pasokan air dari sumur dalam tersebut.

Masyarakat non Muslim di Loktuan juga merasakan perlakuan yang adil atas bantuan bangunan gereja Immanuel yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim. Mereka merasa lebih nyaman dan tenang serta lebih bisa berkonsentrasi beribadah dalam gereja yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim tersebut. Dengan adanya gereja Immanuel juga memacu perkembangan pemukiman di sekitarnya yang dulunya sepi berupa kebun dan ladang yang kurang produktif, sekarang menjadi pemukiman yang ramai dan asri. Hal ini diakibatkan oleh tersedianya jalan beton selebar 4 meter menuju gereja Immanuel yang dibangun oleh PT. Pupuk Kaltim. Pembangunan gereja ini juga mencerminkan PT. Pupuk Kaltim turut menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bontang, khususnya di Kelurahan Loktuan.

Walaupun belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh PT. Pupuk Kaltim dan juga pemerintah, pembangunan rumah baca di Kelurahan Loktuan juga memberikan dampak positif yaitu dengan adanya kunjungan anak-anak sekolah ke rumah baca. Anak-anak sekolah yang dulunya sepulangnya dari sekolah mengisi waktu dengan bermain, sekarang banyak yang beralih mengunjungi rumah baca. Sebagian dari mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, lebih senang membaca dan bermain di rumah baca karena tempatnya nyaman, terang, dan rapi bilamana dibandingkan dengan kondisi rumah mereka.

Persepsi masyarakat dan juga para pejabat Kota Bontang tentang program-program *community development* PT. Pupuk Kaltim bisa disimak sebagaimana di bawah.

”perkembangan daerah Loktuan sedemikian pesat semenjak jalan utama satu-satunya di Loktuan diperbaiki oleh PT. Pupuk Kaltim, apalagi di Loktuan juga ada pasar satu-satunya di Kecamatan Bontang Utara” (Alex, 53 tahun)

”Pemerintah Kota Bontang mengucapkan selamat atas penganugerahan Comdev Award dan CEO Award dalam BUMN Expo 2002. Hal tersebut juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang” (Sofyan Hasdam, Walikota Bontang).

Kondisi nyata dari hasil pelaksanaan program *community development* oleh PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan beserta persepsi masyarakat dan pejabat Kota Bontang sebagaimana tersebut di atas setidaknya bisa menyangkal tanggapan negatif dari segelintir oknum yang kurang puas terhadap pelaksanaan *community development* PT. Pupuk Kaltim di Loktuan khususnya dan di Kota Bontang pada umumnya yang menyatakan bahwa PT. Pupuk Kaltim tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sekelompok orang atau organisasi yang masih berpikiran negatif terhadap kebijakan PT. Pupuk Kaltim tersebut sebaiknya diajak bekerja sama dalam melaksanakan program-program *community development*. Dengan demikian mereka yang awalnya berseberangan dengan PT. Pupuk Kaltim benar-benar mengetahui proses pelaksanaan program *community development* PT. Pupuk Kaltim untuk masyarakat. Dari mereka inilah nantinya yang menjadi “Humas” tidak resmi PT. Pupuk Kaltim bilamana ada yang masih mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Usulan proses perencanaan berikut adalah model kualitatif yang sesuai untuk masyarakat Kelurahan Loktuan.

1. Model Pasar Citramas

Pendamping yang diharapkan hendaklah orang dari Kelurahan Loktuan sendiri yang memahami karakteristik dan persoalan masyarakat Loktuan. Pendamping tersebut juga hendaknya orang yang mempunyai kapabilitas dan disegani karena bisa dijadikan panutan sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus mampu mengidentifikasi permasalahan mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Loktuan bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan yang terdapat di pasar termasuk kebutuhan masyarakat harus dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping melalui diskusi dan sumbang saran. Hasil identifikasi permasalahan adalah :

- Kondisi pasar kumuh dan sudah tidak layak lagi
- Rawan kebakaran
- Tempat jualan terbatas dan berjejal.
- Barang dagangan jenis dan ragamnya terbatas
- Pembeli mulai enggan berbelanja, mengalihkan tujuan belanja ke pasar Rawa Indah yang lebih bersih dan lengkap barang dagangannya
- Penduduk Loktuan yang ingin menjadi pedagang di pasar cukup banyak.
- Semakin banyak pengangguran akibat berkurangnya proyek pembangunan.

b. Tujuan

Secara teknis, perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Loktuan dengan pendamping. Beberapa pertanyaan diajukan oleh pendamping untuk membantu merumuskan tujuan tersebut berdasarkan masalah yang berhasil diidentifikasi, antara lain mengapa pasar yang ada harus diperbaiki atau bilamana memungkinkan dipindah ke tempat yang lebih baik. Kemudian diajukan lagi pertanyaan darimana dana untuk keperluan tersebut, apakah dari pemerintah atau dari PT. Pupuk Kaltim, dan siapa yang menjadi utusan untuk menemui pejabat terkait?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Loktuan. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dasar berupa sarana / tempat jualan yang bersih, rapi, nyaman, dan cukup ruang untuk menambah macam / jenis dagangan. Apakah dengan merapikan tempat jualan, semenisasi lantai pasar dan menjaga kebersihan sudah mampu menjawab permasalahan yang ada?. Dengan meminta bantuan kepada PT. Pupuk Kaltim akan menjadikan ketergantungan masyarakat dan tidak menjadikan mereka mandiri.

d. Alternatif Kebijakan

Pendamping membantu masyarakat untuk tidak tergantung dengan bantuan PT. Pupuk Kaltim, dan membantu masyarakat menemukan sendiri potensi / kekuatan yang dimilikinya. Beberapa alternatif untuk tetap dapat berjualan dengan nyaman diantaranya adalah :

- Mencari penyandang dana (PT. Pupuk Kaltim) untuk membangun pasar baru. Para pedagang membayar uang cicilan los / kios yang ditempatinya. Dengan cara ini juga dimungkinkan adanya penambahan pedagang baru karena jumlah los / kios jauh lebih banyak (pasar baru jauh lebih besar).
- Memperbaiki kondisi fisik pasar dengan swadana agar lebih bersih, nyaman untuk berjualan dan berbelanja, serta aman. Pendamping perlu meminta bantuan orang yang mengerti tentang tata-ruang (arsitek) untuk mengatur letak los / kios dan bentuk bangunan. Cara ini tentunya untuk sementara waktu para pedagang tidak bisa berjualan di pasar tersebut, dan tidak memungkinkan adanya penambahan pedagang baru karena lokasinya yang tidak memungkinkan untuk berkembang.

e. Pilihan Kebijakan

Alternatif kebijakan yang ada tersebut dipilih sendiri oleh masyarakat atau pelaku kegiatan di pasar. Di sini tampak proses penyatuan konsep yang datang dari masyarakat melalui pendekatan pendamping tersebut (*bottom up planning*) dengan konsep dari PT. Pupuk Kaltim (*top down planning*).

f. Implementasi

Penyatuan konsep tersebut menjadi acuan tindak kegiatan yang akan dilakukan untuk masyarakat Loktuan. Masyarakat Loktuan didudukkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menangani sendiri permasalahannya dengan mempergunakan sumber daya masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan tanpa harus menggantungkan diri dari pihak lain. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

g. Pemantauan

Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, perlu diadakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi selama tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyimpangan yang diketahui segera diadakan koreksi / perbaikan agar tetap sebagaimana yang dikehendaki. Pemantauan tetap dilaksanakan saat proyek sudah selesai dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek tersebut. Apabila ada kelemahan akan segera ditindak lanjuti dengan tindak perbaikan atau modifikasi agar proyek bisa sempurna. Pemantauan harus melibatkan pemangku kebijakan dan masyarakat Loktuan sebagai penerima manfaat.

2. Model Pembuatan Sumur Dalam

Pendamping yang diharapkan hendaklah orang dari Kelurahan Loktuan sendiri yang memahami karakteristik dan persoalan masyarakat Loktuan. Pendamping tersebut juga hendaknya orang yang mempunyai kapabilitas dan disegani karena bisa dijadikan panutan sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus mampu mengidentifikasi permasalahan mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Loktuan bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping dalam prinsip *community development* adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik, dan pelembagaan.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping melalui diskusi dan sumbang saran. Hasil identifikasi permasalahan yaitu ;

- Belum ada jaringan air bersih dari PDAM Kota Bontang
- Sebagian besar masyarakat Kelurahan Loktuan kesulitan mendapatkan air bersih.
- Air bersih dari perusahaan air minum swasta mahal harganya

- Air sumur dangkal berbau tanah, masam, dan kadar besinya tinggi

b. Tujuan

Secara teknis, perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Loktuan dengan pendamping. Beberapa pertanyaan diajukan oleh pendamping untuk membantu merumuskan tujuan tersebut, antara lain mengapa air sumur dangkal yang ada tidak bisa dipergunakan untuk air minum? Kemudian diajukan lagi pertanyaan bagaimana supaya air sumur dangkal tersebut bisa dipergunakan untuk air minum? Bagaimana caranya supaya tidak kesulitan air bersih apabila kemarau datang?.

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Loktuan. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih untuk keperluan sehari-hari dengan memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan dan berkelanjutan. Dengan meminta bantuan kepada PT. Pupuk Kaltim akan menjadikan ketergantungan masyarakat.

d. Alternatif Kebijakan

Pendamping membantu masyarakat untuk tidak tergantung dengan bantuan PT. Pupuk Kaltim, dan membantu masyarakat menemukan sendiri proses yang dimilikinya. Beberapa alternatif untuk mendapatkan air bersih diantaranya adalah :

- Membuat penyaringan sederhana dengan mempergunakan drum yang berisi ijuk dan pasir untuk menyaring kotoran, arang untuk menghilangkan bau dan rasa, serta diberikan bahan kimia kaporit untuk membunuh kuman dan penambahan kapur untuk meningkatkan pH air.
- Membuat teknologi tepat guna untuk destilasi (penguapan) air laut dengan panas sinar matahari.
- Membuat sumur resapan sebagai persediaan air di musim kemarau

PT. Pupuk Kaltim dapat diminta membantu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Loktuan tentang bagaimana penerapan teknologi tersebut di atas dengan membuat proyek percontohan. Material dan sumber daya manusia yang dipergunakan adalah yang ada di Loktuan. Dengan demikian usulan pengadaan air bersih berasal dari masyarakat, sedangkan pihak PT. Pupuk Kaltim memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Loktuan. Dengan adanya proyek percontohan, masyarakat tinggal meniru keberhasilan yang dicontohkan tersebut.

e. Pilihan Kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan tersebut, tampak proses penyatuan konsep yang datang dari masyarakat melalui pendekatan pendamping (*bottom up planning*) dengan konsep dari PT. Pupuk Kaltim (*top down planning*) untuk diambil salah satu alternatif atau bahkan beberapa alternatif tersebut diterapkan semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

h. Implementasi

Penyatuan konsep tersebut menjadi acuan tindak kegiatan yang akan dilakukan untuk masyarakat Loktuan. Masyarakat Loktuan didudukkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menangani sendiri permasalahannya dengan mempergunakan sumber daya masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan tanpa harus menggantungkan diri dari pihak lain. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

i. Pemantauan

Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, perlu diadakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi selama tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyimpangan yang diketahui segera diadakan koreksi / perbaikan agar tetap sebagaimana yang dikehendaki. Pemantauan tetap dilaksanakan saat proyek sudah selesai dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek tersebut. Apabila ada kelemahan akan segera ditindak lanjuti dengan tindak perbaikan atau modifikasi agar proyek bisa sempurna. Pemantauan harus melibatkan pemangku kebijakan dan masyarakat Loktuan sebagai penerima manfaat.

3. Model Pembuatan Gereja

Pendamping yang diharapkan hendaklah orang dari Kelurahan Loktuan sendiri yang memahami karakteristik dan persoalan masyarakat Loktuan. Pendamping tersebut juga hendaknya orang yang mempunyai kapabilitas dan disegani karena bisa dijadikan panutan sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus mampu mengidentifikasi permasalahan mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Loktuan bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping dalam prinsip *community development* adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik, dan pelembagaan.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping melalui diskusi dan sumbang saran. Hasil identifikasi permasalahan yaitu ;

- Gereja yang ada sudah tidak layak lagi, baik dari bangunan fisiknya maupun kapasitas menampung jemaat.
- Pembangunan gereja baru bisa menimbulkan pergesekan antar ummat beragama.
- Bagaimana cara memperoleh dana perbaikan atau pembangunan gereja

b. Tujuan

Secara teknis, perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh jemaat gereja Loktuan dengan pendamping. Beberapa pertanyaan diajukan oleh pendamping untuk membantu merumuskan tujuan tersebut, antara lain mengapa perlu membangun gereja baru? Kenapa gereja yang telah ada tidak diperbaiki atau diperbesar saja? Kalau diperbaiki, apa saja yang perlu diperbaiki, dan kalau diperbesar berapa luasannya? Kemudian diajukan lagi pertanyaan, kalau membangun gereja baru apakah tidak menimbulkan pergesekan antar ummat beragama? Berapa besar dana yang diperlukan untuk perbaikan atau perluasan bangunan gereja? Berapa besar dana yang diperlukan untuk membuat gereja baru? Bagaimana mendapatkan dana tersebut? Kenapa harus meminta bantuan kepada PT. Pupuk Kaltim?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Loktuan. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan perbaikan gereja, tidak menciptakan ketergantungan dan berkelanjutan. Dengan meminta bantuan kepada PT. Pupuk Kaltim akan menjadikan ketergantungan masyarakat.

d. Alternatif Kebijakan

Pendamping membantu jemaat gereja untuk menemukan sendiri potensi yang dimilikinya tanpa ketergantungan kepada PT. Pupuk Kaltim. Beberapa alternatif kebijakan untuk pembangunan gereja antara lain :

- Memperbaiki / merenovasi salah satu gereja yang ada secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan finansial jemaat gereja.
- Membangun gereja baru dengan memperhatikan kerukunan antar ummat beragama. Jemaat mengumpulkan dana dari lingkungan sendiri, ditambah dengan kas gereja (bila ada), dan sumbangan dana dari jemaat gereja daerah lain. Kekurangan dana perbaikan atau pembangunan gereja diambilkan dari kredit melalui perbankan.

PT. Pupuk Kaltim dapat diminta bantuannya di dalam konsep tata-ruang atau advokasi teknis lainnya.

e. Pilihan Kebijakan

Dalam pilihan kebijakan, tampak proses penyatuan konsep yang datang dari masyarakat melalui pendekatan pendamping tersebut (*bottom up planning*) dengan konsep dari PT. Pupuk Kaltim (*top down planning*) sehingga dihasilkan adanya kegiatan yang berbasis masyarakat dengan mempergunakan sumber daya yang ada. PT. Pupuk Kaltim berperan sebagai institusi yang melengkapi kekurangan yang ada.

j. Implementasi

Penyatuan konsep tersebut menjadi acuan tindak kegiatan yang akan dilakukan untuk masyarakat Loktuan. Masyarakat Loktuan didudukkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menangani sendiri permasalahannya dengan mempergunakan sumber daya masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan tanpa harus menggantungkan diri dari pihak lain. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

k. Pemantauan

Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, perlu diadakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi selama tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyimpangan yang diketahui segera diadakan koreksi / perbaikan agar tetap sebagaimana yang dikehendaki. Pemantauan tetap dilaksanakan saat proyek sudah selesai dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek tersebut. Apabila ada kelemahan akan segera ditindak lanjuti dengan tindak perbaikan atau modifikasi agar proyek bisa sempurna.

Pemantauan harus melibatkan pemangku kebijakan dan masyarakat Loktuan sebagai penerima manfaat.

4. Model Pembuatan Rumah Baca

Pendamping yang diharapkan hendaklah orang dari Kelurahan Loktuan sendiri yang memahami karakteristik dan persoalan masyarakat Loktuan. Pendamping tersebut juga hendaknya orang yang mempunyai kapabilitas dan disegani karena bisa dijadikan panutan sehingga proses keberhasilan dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pendamping harus mampu mengidentifikasi permasalahan mereka dan menemukan sendiri solusinya. Pendamping juga harus mampu menggerakkan emosi sehingga masyarakat Loktuan bersedia melakukan sesuatu untuk memberdayakan potensi yang ada. Pendamping dalam prinsip *community development* adalah mendampingi, pembelajaran, melindungi hak-hak sipil, mediasi bila terjadi konflik, dan pelembaaan.

a. Masalah

Secara teknis identifikasi permasalahan termasuk kebutuhan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping melalui diskusi dan sumbang saran. Hasil identifikasi permasalahan yaitu ;

- Minat baca masyarakat Loktuan masih rendah
- Anak-anak di Kampung Selambai banyak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, atau membantu pekerjaan orangtuanya.
- Pencanaan program Bontang Cerdas tahun 2010.

b. Tujuan

Secara teknis, perumusan tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat Loktuan dengan pendamping. Beberapa pertanyaan diajukan oleh pendamping untuk membantu merumuskan tujuan tersebut, antara lain mengapa minat baca masyarakat Loktuan masih rendah? Kemudian diajukan lagi pertanyaan mengapa anak-anak di Kampung Selambai banyak yang putus sekolah? Bagaimana caranya supaya mereka mau membaca dan anak-anak tersebut kembali sekolah? Bagaimana caranya untuk mendukung program Bontang Cerdas tahun 2010?

c. Analisis Kondisi

Pendamping bersama masyarakat melakukan analisis kondisi berupa unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada masyarakat Loktuan. Pendamping bersama masyarakat menyusun program untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan berupa sarana dan prasarana untuk belajar. Penentuan lokasi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan lahan, dan banyaknya anak usia sekolah sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Dengan meminta bantuan kepada PT. Pupuk Kaltim tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadikan ketergantungan masyarakat itu sendiri.

d. Alternatif Kebijakan

Pendamping membantu masyarakat untuk tidak tergantung dengan bantuan PT. Pupuk Kaltim, dan membantu masyarakat menemukan sendiri proses yang dimilikinya. Beberapa alternatif untuk meningkatkan minat baca dan memotivasi anak-anak supaya mau bersekolah diantaranya adalah :

- Membuat perpustakaan mini dengan swadaya dan swadana dari masyarakat di tempat-tempat yang padat penduduknya. Buku, majalah diharapkan dari masyarakat setempat agar mempunyai rasa memiliki dan menjaga dengan baik keberadaan perpustakaan tersebut.
- Mengadakan kegiatan belajar-mengajar / kursus di tempat tersebut agar selalu ada kegiatan, tidak tampak kosong.
- Mengalokasikan dana dari iuran warga sekitar rumah baca untuk menunjang keberadaan rumah baca.
- Mencari sponsor untuk kelengkapan rumah baca, dan sebagai imbalannya sponsor tersebut mempunyai hak memasang nama perusahaan / produknya di tempat yang disediakan di rumah baca.

PT. Pupuk Kaltim dapat diminta membantu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Loktuan tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. PT. Pupuk Kaltim juga bisa diminta untuk mendidik pengelola rumah baca dalam bidang administrasi dan manajerial perpustakaan.

Dengan demikian usulan pengadaan rumah baca berasal dari masyarakat, sedangkan pihak PT. Pupuk Kaltim memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Loktuan. Dengan adanya proyek percontohan, masyarakat tinggal meniru keberhasilan yang dicontohkan tersebut.

e. Pilihan Kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan tersebut, tampak proses penyatuan konsep yang datang dari masyarakat melalui pendekatan pendamping (*bottom up planning*) dengan konsep dari PT. Pupuk Kaltim (*top down planning*) untuk diambil salah satu alternatif atau bahkan beberapa alternatif tersebut diterapkan semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

f. Implementasi

Penyatuan konsep tersebut menjadi acuan tindak kegiatan yang akan dilakukan untuk masyarakat Loktuan. Masyarakat Loktuan didudukkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu menangani sendiri permasalahannya dengan mempergunakan sumber daya masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan tanpa harus menggantungkan diri dari pihak lain. Sumber daya dari PT. Pupuk Kaltim hanya sebagai suplemen jika diperlukan.

g. Pemantauan

Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, perlu diadakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi selama tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyimpangan yang diketahui segera diadakan koreksi / perbaikan agar tetap sebagaimana yang dikehendaki. Pemantauan tetap dilaksanakan saat proyek sudah selesai dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek tersebut. Apabila ada kelemahan akan segera ditindak lanjuti dengan tindak perbaikan atau modifikasi agar proyek bisa sempurna. Pemantauan harus melibatkan pemangku kebijakan dan masyarakat Loktuan sebagai penerima manfaat.

5.6.3 Usulan Strategi

Untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta dalam rangka menanggulangi kendala/kelemahan dan mengatasi tantangan/ancaman, maka strategi yang digunakan dalam menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan program *community development* di Kelurahan Loktuan adalah :

1. Koordinasi

Sesuai tugas dari Kementerian Negara BUMN, maka kegiatan koordinasi bersama BUMN yang mempunyai kewajiban melaksanakan program *community development* merupakan kegiatan inti yang harus dilaksanakan. Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program *community development* koordinasi harus dilakukan. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Pemkot Bontang) sangat penting agar tidak terjadi program tumpang tindih, dan bisa saling mengisi.

2. Sosialisasi

Agar seluruh program *community development* dapat diketahui dan dipahami oleh *stakeholder* yaitu seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ornop), maka kegiatan sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi program *community development* ini diselenggarakan bukan hanya agar diketahui dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya dengan sektor lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya program masing-masing sektor saling mendukung dan sinergis sehingga dapat terwujud masyarakat yang maju dan mandiri sebagaimana diharapkan. Di sisi lain kegiatan sosialisasi

ini diselenggarakan untuk mendapatkan suatu persepsi yang sama sehingga masing-masing komponen baik instansi lain maupun masyarakat berperan serta sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya

3. Pembentukan Kelompok Kerja

Keberadaan kelompok kerja atau tim pada hakekatnya adalah membantu dalam proses kegiatan *community development*. Oleh karena itu, dalam rangka terselenggaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan, maka pembentukan kelompok kerja atau tim yang terdiri dari berbagai komponen sangat diperlukan. Di samping itu, kelompok kerja juga merupakan suatu forum koordinasi dan sinkronisasi untuk saling memberikan informasi sehingga diperoleh suatu persamaan persepsi yang dapat melancarkan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

4. Kemitraan

Agar pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan *community development* berjalan dengan baik dan mencapai sarannya maka diperlukan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* yaitu seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ornop) dan unsur masyarakat sebagai penerima manfaat. Kemitraan ini menekankan *stakeholders* sebagai subyek dan dalam paradigma *common interest*. Pola ini dapat saja didukung oleh *resource-based partnership* dimana *stakeholders* diberi kesempatan menjadi *shareholders*.

5. Pengkajian

Kegiatan pengkajian dilakukan dengan menganalisis hasil pelaksanaan kebijakan atau melalui hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang diselenggarakan sebagai bahan masukan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan *community development* yang akan datang.

6. Advokasi

Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang disusun oleh kalangan internal, tanpa mendapat masukan dari pihak eksternal maka pelaksanaan kebijakan dan strategi belum dapat mengantisipasi secara baik berbagai kendala di depannya. Pada prakteknya bahwa pelaku kegiatan dalam era otonomi adalah daerah dan masyarakat, oleh karena itu maka kegiatan advokasi dalam bentuk pemberian masukan, arahan, penyamaan persepsi, kesepakatan atau pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasional program *community development*

7. Monitoring, dan evaluasi

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan di tingkat lapangan. Dengan diketahui hasil pelaksanaan kebijakan melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program *community development*.

8. Fasilitasi

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif dan efisien, antara lain jika difasilitasi dan

diberikan kemudahan ataupun pelayanan terhadap program yang diselenggarakan. Fasilitasi yang dilakukan yakni dengan memberikan dorongan dan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan program *community development*. Perlu dilakukan pendekatan yang arif agar tidak terkesan atau dianggap mengintervensi tugas *stake holder* yang dikoordinasikan.

9. Data dan Informasi

Untuk dapat terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi sehingga pelaksanaan program di tingkat lapangan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka *stake holder* yang dikoordinasikan perlu didukung dengan data dan informasi yang berkaitan dengan program *community development*. Data dan informasi diperlukan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijakan, selain itu data dan informasi yang akurat juga sebagai alat koordinasi. Data dan informasi program *community development* dikomunikasikan melalui berbagai kesempatan dan forum serta media yang ada.

10. Pemberdayaan

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi maka seluruh *stakeholder* perlu didorong untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengintegrasian program *community development*. Upaya mensinergikan kekuatan antara *stake holder* dengan PT. Pupuk Kaltim secara intensif adalah sebagai bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan dan men-sinkronkan penyelenggaraan program. Selain itu pemberdayaan berbagai sektor lain perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih, baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya di lapangan, disamping itu untuk memberikan keleluasaan namun terkendali dan terintegrasi dalam pelaksanaan program-program yang menjadi kebijakannya.

11. Fokus

Koordinasi program peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan agar dapat berhasil secara efektif dan efisien, maka dalam pemilihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya harus difokuskan sehingga diharapkan dapat dicapai suatu hasil yang optimal. Memfokuskan suatu program dimaksudkan untuk mengkonsentrasikan pengelolaan, dana, daya, dan sarana yang ada.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan program Bina Lingkungan sebagai bagian dari *community development* PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan sebagaimana tersebut di bawah.

- 1 Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan belum bisa dikatakan program *community development* yang sejati karena unsur swadaya dan swadana masyarakat belum kelihatan, proses yang ada lebih bersifat pilantropis (derma) karena secara umum program dirancang oleh perusahaan dan tidak ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat pasca operasinya PT. Pupuk Kaltim.
- 2 Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif, pembangunan sosial (*social development*) dan dilakukan pada konteks *partnership* dan tata kelola (*governance*) tersebut adalah bentuk *corporate citizenship*. Prinsip ini memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia, membantu memberikan bantuan sumberdaya untuk pembangunan sosial dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas.
- 3 Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim di Kelurahan Loktuan belum mengikuti kaidah / prinsip *community development* yang baik, akibatnya muncul pendapat di kalangan masyarakat penerima manfaat dan juga *stakeholders* lainnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang. Komentar bernada miring tersebut di antaranya adalah :
 - a. program *community development* tidak lebih dari metode ganti rugi atas sebagian kecil dampak negatif gangguan / ketidak-nyamanan, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Pupuk Kaltim
 - b. program *community development* dengan berbagai variasinya hanya sedikit saja yang berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
 - c. hampir semua program *community development* bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, tetapi berdasarkan realitas yang ada, masyarakat masih belum mampu mandiri.
 - d. adanya pengeluaran yang cukup besar dari dana *community development* untuk sumbangan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat di Kota Bontang dan juga tidak menjadi penerima dampak negatif kerusakan lingkungan

- e. kewajiban program *community development* bagi PT. Pupuk Kaltim ini juga telah membuka peluang bagi munculnya banyak LSM calo yang mengatas-namakan masyarakat untuk bisa mendapatkan dana dari perusahaan.
 - f. masyarakat Kelurahan Loktuan juga berharap *community development* yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim bisa mempersiapkan mereka menghadapi pasca gas, yaitu bilamana industri yang bertumpu pada pasokan gas terpaksa berhenti beroperasi akibat sudah tidak ada gas lagi.
3. PT. Pupuk Kaltim terkesan berjalan sendirian di dalam melaksanakan program *community development* tanpa melibatkan *stakeholders* yang ada, dan hal ini disebabkan adanya kelemahan dari *stakeholders* itu sendiri yaitu :
- a. kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi
 - b. kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan, dan hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
 - c. kurang dikuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi, serta lemahnya Sumber Daya Manusia.
5. Secara umum keberadaan PT. Pupuk Kaltim bisa diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai pelopor pembangunan khususnya di Kelurahan Loktuan, namun melalui program-program *community development* yang dilaksanakannya belum mampu membantu pemecahan masalah sosial yaitu pengangguran dan kemiskinan.
6. Berdasarkan kuesioner pelaksanaan *community development* dalam format PROPER yang dikeluarkan oleh KLH, PT. Pupuk Kaltim sudah bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan Proper Hijau dengan catatan segala aspek yang dipersyaratkan untuk pencapaian Proper Hijau telah dilaksanakan.

6.2 SARAN – SARAN

Mengingat Kota Bontang sebagian besar wilayahnya adalah perairan (laut), maka sudah selayaknya apabila konsentrasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kaltim di Kota Bontang bertumpu kepada masyarakat pesisir dan laut. Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam bentuk jasa, misalnya industri wisata bahari, kawasan konservasi, transportasi laut, yang di masa mendatang akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diyakini pula bahwa laut juga dapat berfungsi dominan sebagai media pemersatu dan sekaligus perekat kesatuan bangsa, yang pada saat ini menunjukkan gejala dis-integrasi.

Banyak negara yang maju karena pembangunan kelautan dan perikanan dikelola dengan baik dan mendapat dukungan pemerintahnya. Negara Islandia, Norwegia dan Thailand adalah beberapa dari contoh sukses pembangunan perikanan dan kelautannya. Padahal Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang lebih besar dan kaya ketimbang negara-negara tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut, dan juga keinginan masyarakat Kota Bontang yang bisa kita tangkap berdasarkan pengamatan langsung kami memberikan saran – saran sebagai di bawah ini.

- 1 Dengan gambaran potensi sumber daya kelautan dan perikanan, maka sudah selayaknya apabila salah satu *entry-point* untuk memulai *community development* yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan investasi di sektor ini, yang diyakini dapat menjadi industri kelautan yang kuat dan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Paling tidak terdapat 5 (lima) kelompok industri kelautan yaitu :
 - a. industri mineral dan energi laut,
 - b. industri maritim termasuk industri galangan kapal,
 - c. industri pelayaran,
 - d. industri pariwisata, dan
 - e. industri perikanan.
2. Peran serta / partisipasi *stakeholders* di dalam melaksanakan program *community development* merupakan salah satu kunci keberhasilan, dan hal ini berarti tugas-tugas staff Biro Humas PT. Pupuk Kaltim semakin ringan. Strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong peran serta / partisipasi *stakeholders* adalah:
 - a. Menyediakan *skilled facilitator* yang direkrut khusus atau bekerjasama dengan lembaga profesional pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi proses partisipasi.
 - b. Membangun sistem informasi dan komunikasi berbagai komunitas
 - c. Melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris untuk meningkatkan kemampuan cara-cara berpartisipasi dalam sebuah kegiatan untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM maupun tokoh masyarakat
3. Sekelompok orang atau organisasi yang masih berpikiran negatif terhadap kebijakan PT. Pupuk Kaltim sebaiknya diajak bekerja sama dalam melaksanakan program-program *community development*. Dengan demikian mereka yang awalnya berseberangan dengan PT. Pupuk Kaltim benar-benar mengetahui proses pelaksanaan program *community development* PT. Pupuk Kaltim untuk masyarakat. Dari mereka inilah nantinya yang menjadi “Humas” tidak resmi PT. Pupuk Kaltim bilamana ada yang masih mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
4. Perlu diberikan insentif terhadap upaya yang bersifat *eco-efficiency* kepada industri kimia yang memperoleh PROPER BIRU atau berada pada tingkat taat (*in compliance*) yang telah melakukan *re-use* / daur-ulang terhadap air dari proses produksi,

DAFTAR PUSTAKA

-, Kementerian Lingkungan Hidup, Proper
-, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Profil Perusahaan, Bontang
-, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Lingkungan, Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.
-, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Hadi, Sudharto P. 2005, *Community Development*, Catatan Kuliah, Program Magister Ilmu Lingkungan, 2005, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi, Sudharto P. dan Samekto, Adji FX., 2006, Laporan Kunjungan di PT. Freeport Indonesia
- Hadi, Sudharto P. dan Samekto, Adji FX., 2007, Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Koestoer, Y. 2004. *Corporate Citizenship: Corporate Social /Environment Responsibility*. IBL Jakarta. Makalah Disampaikan pada Pertemuan Para Mitra Yayasan Ford Bidang Pembangunan dan Lingkungan. Ciawi 28 - 31 Maret 2004.
- Prasetyantoko, A. 2004. Menanti Tanggung Jawab Sosial Sektor Finansial di Indonesia. The Business Watch Indonesia-Widya Sari Press. Solo.
- The World Bank Institute. 2004. *Corporate Social Responsibility and Sustainable Competitiveness. Module-1. CSR Main Concepts*
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Coorporate Social Responsibility*, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya
- Wimpy S. Tjetjep Kepala Badan Litbang ESDM, Seminar Nasional Tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* 26 Mei 2005, di Hotel Four Seasons Jakarta).
- Muhammad Jafar Hafisah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M Badri, Peran Public Relations (PR) dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam www.percikanpikiran-badri.blogspot.com

